

**PEMIKIRAN
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
TENTANG KEISLAMAN - KEINDONESIAAN
1947-1997**



2x6.63
SIT
P
C-1

00000047 H 01

22 AUG 2001

Oleh:

DRS. H. AGUSSALIM SITOMPUL
Nomor Induk : 96303/DBT

DISERTASI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Doktor Dalam Ilmu Agama Islam**

**Yogyakarta
2001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul

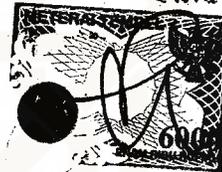
NIM : 96303/DBT

Jenjang : Program S3 Doktor Bebas Terkendali

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Yogyakarta, 30 April 2001

Saya yang menyatakan.



Drs. H. Agussalim Sitompul



DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

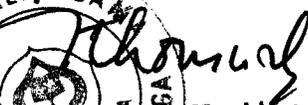
PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : **PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) TENTANG
KEISLAMAN-KEINDONESIAAN 1947-1997**

Ditulis oleh : **Drs. H. Agussalim Sitompul**
NIM : **96303/S3/DBT**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 2 Juli 2001

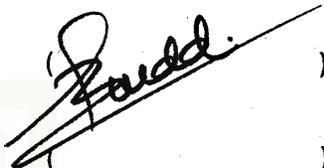
Rektor/Ketua Senat

H.M. Atho Mudzhar
NIP. 150077526





DEPARTEMEN AGAMA
IAIN SUNAN KALJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PROMOTOR I : **Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif, M. A.** 

PROMOTOR II : **Prof. Dr. H. Azyumardi Azra** 

PROMOTOR III :



**NOTA DINAS PARA PROMOTOR
DAN ANGGOTA PENILAI**

- | | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| 1. Prof. Dr.H.A. Syafii Maarif, M.A. | (Promotor I) | VI ₁ |
| 2. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra | (Promotor II) | VI ₂ |
| 3. Prof. Dr.H.M. Atho Mudzhar | (Ketua/Anggota Penilai) | VI ₃ |
| 4. Prof. Dr. T.H. Ibrahim Alfian, M.A. | (Anggota Penilai) | VI ₄ |
| 5. Prof. Dr. H. Djoko Suryo | (Anggota Penilai) | VI ₅ |
| 6. Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A. | (Anggota Penilai) | VI ₆ |
| 7. Dr. Kuntowijoyo | (Anggota Penilai) | VI ₇ |

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W. W.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan disertasi berjudul :

**PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
TENTANG KEISLAMAN – KEINDONESIAAN 1947-1997**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul
NIM : 96303/S3/DBT
Jenjang : Doktor Bebas Terkendali

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 12 Maret 2001

Promotor/Anggota Penilai



Prof. Dr.H.A. Syafii Maarif, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W. W.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan disertasi berjudul :

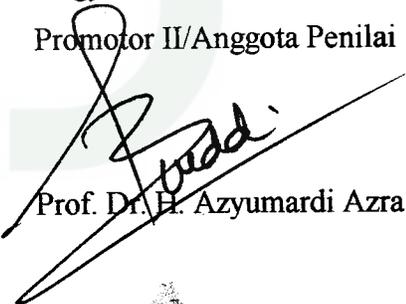
**PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
TENTANG KEISLAMAN – KEINDONESIAAN 1947-1997**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul
NIM : 96303/S3/DBT
Jenjang : Doktor Bebas Terkendali

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 5 Februari 2001
Promotor II/Anggota Penilai


Prof. Dr. H. Azyumardi Azra

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W. W.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan disertasi berjudul :

**PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
TENTANG KEISLAMAN – KEINDONESIAAN 1947-1997**

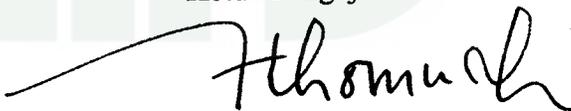
yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul
NIM : 96303/S3/DBT
Jenjang : Doktor Bebas Terkendali

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 14 April 2001

Ketua/Penguji



Prof. Dr.H.M Atho Mudzhar

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W. W.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan disertasi berjudul :

**PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
TENTANG KEISLAMAN – KEINDONESIAAN 1947-1997**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul
NIM : 96303/S3/DBT
Jenjang : Doktor Bebas Terkendali

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Jakarta, 18 Februari 2001

Anggota Penilai



Prof. Dr. T.H. Ibrahim Alfian, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W. W.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan disertasi berjudul :

**PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
TENTANG KEISLAMAN – KEINDONESIAAN 1947-1997**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul
NIM : 96303/S3/DBT
Jenjang : Doktor Bebas Terkendali

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 12 Maret 2001

Anggota Penilai



Prof. Dr. H. Djoko Suryo

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W. W.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan disertasi berjudul :

**PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
TENTANG KEISLAMAN – KEINDONESIAAN 1947-1997**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul
NIM : 96303/S3/DBT
Jenjang : Doktor Bebas Terkendali

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Jakarta, 5 Februari 2001

Anggota Penilai



Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum W. W.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap penulisan disertasi berjudul :

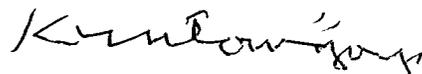
**PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
TENTANG KEISLAMAN – KEINDONESIAAN 1947-1997**

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul
NIM : 96303/S3/DBT
Jenjang : Doktor Bebas Terkendali

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 November 2000, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, Maret 2001
Anggota Penguji



Dr. Kuntowijoyo

ABSTRAK

Penyusun : Drs. H. Agussalim Sitompul
Judul : **Pemikiran Himpunan Mahasiswa Islam Tentang Keislaman – Keindonesiaan 1947-1997**

Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI muncul bersamaan dengan berdirinya HMI 5 Februari 1947 setelah mengalami suatu proses, yang bersumber dari tujuan HMI.

Yang dimaksud dengan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI adalah : Terintegrasinya antara pemikiran keislaman dan keindonesiaan di atas titik temu Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis. Tidak terdapat kesenjangan antara keislaman dan keindonesiaan, antara Islam dengan Pancasila, selaras dengan realitas sosial budaya bangsa Indonesia dengan ciri utama, *pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan*. Corak pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI adalah *substansif, proaktif, inklusif, integratif, ilmiah dan modern*. Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI sebagai ideologi HMI, sehingga dapat menampilkan Islam bercorak khas Indonesia. Pemikiran itu mampu melakukan perubahan, sesuai dengan tuntutan kontemporer menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT – masa depan Indonesia Baru sebagaimana dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI merupakan antitesis terhadap gagasan Sukarno tentang penyatuan paham Nasionalisme – Islamisme – Marxisme (NASIMAR) tahun 1926, maupun terhadap konsep Nasional – Agama – Komunis (NASAKOM) tahun 1961.

Pada awalnya pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI hanya terdiri dari 5 aspek pemikiran, yaitu bidang *politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan agama*. Setelah mengalami pasang surut perkembangan 50 tahun, sesuai dengan realitas sosial, politik, dan budaya yang terjadi di Indonesia, pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI mencakup berbagai bidang kehidupan yang sangat luas sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Setelah diidentifikasi mencakup 21 bidang.

Melihat dari substansi keseluruhan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, pemikiran tersebut merupakan ideologi HMI. Sebagai ideologi, pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI merupakan *antitesis* terhadap paham *nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme* serta konsep *nasional, agama, dan komunis* (Nasakom), yang kedua-duanya digagas Sukarno. Adapun konteks pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI ditinjau dari persepektif pemikiran Islam termasuk tipologi *neo-modernisme*.

Walaupun HMI sudah mencetuskan berbagai pemikiran keislaman – keindonesiaan, namun realisasi pelaksanaannya tergantung kepada berbagai pihak. Untuk menanamkan suatu nilai seperti terdapat dalam pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, memerlukan waktu yang lama, mungkin satu atau dua generasi bahkan bisa lebih. Hal ini disebabkan antara lain karena heterogenitas Indonesia sangat tinggi.

Kedudukan HMI dalam masyarakat modern sangat strategis, mengingat HMI *berstatus* sebagai organisasi mahasiswa yang *di dalamnya terbina kelas menengah masyarakat yang tinggal di kota, yang senantiasa bergumul dan akrab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi*, sebagai *penggerak modernisasi*, yang didasari agama Islam, dan dibingkai dengan ideologi keislaman – keindonesiaan. Kedudukan itu terkait erat dengan HMI yang *berstatus* sebagai organisasi mahasiswa dengan ciri utama keilmuan, *berfungsi* sebagai organisasi kader dan *berperan* sebagai organisasi perjuangan, yang akan melakukan perubahan, perombakan, pendobrakan, dan penyempurnaan sesuai dengan tuntutan kontemporer menuju masa depan masyarakat *Indonesia Baru*, yang bercorak khas Indonesia.

SEPAJAH KATA

Tiada kata yang paling pantas memulai Sepatah Kata ini, kecuali ucapan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang atas petunjuk dan berkah-Nya, penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam tertuju kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah Islam, pembuka pintu peradaban dan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan disertasi ini akan mengalami berbagai kendala. Berkenan dengan itu, rasa hormat dan penghargaan yang setulus-tulusnya serta ucapan terima kasih atas bantuan dan dorongan berbagai pihak, penulis sampaikan kepada :

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar dan segenap sivitas akademiknya yang telah memberi kesempatan penyelesaian studi dan penulisan disertasi ini.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, beserta seluruh sivitas akademika yang telah memberi dorongan dan bantuan bagi kelancaran selama mengikuti kuliah dan penyelesaian penulisan disertasi ini, dan khususnya buat Bapak Prof. Dr. H Nourouzzaman Shiddiqi, M.A. yang semasa hayatnya sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sebagai penasehat akademik penulis.
3. Mantan Dekan Fakultas Ushuluddin Prof. Dr. H. Burhanuddin Daja dan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Dr. Djam'annuri, M.A. serta segenap sivitas akademi lainnya yang telah memberi suport kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif selaku Promotor I dan Bapak Prof. Dr.H. Azyumardi Azra, M.A. selaku Promotor II yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta perkenannya menyediakan waktu untuk penulis dalam rangka penyelesaian disertasi ini.
5. Khusus kepada Bapak Prof. Drs. H. Lafran Pane pemrakarsa pendiri HMI (wafat 24 Januari 1991) yang semasa hayatnya telah memberikan informasi dan pengetahuan yang luas sekali tentang HMI kepada penulis, sehingga dapat diwarisi. Juga berkat dorongan almarhum, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku-buku tentang HMI.
6. Kepada mantan-mantan Ketua Umum maupun Pj Ketua Umum, PB HMI, Letjen (Purn) H. Achmad Tirtosudiro, A. Dahlan Ranuwihardjo, SH, Prof. Dr. Deliar Noer, Drs. Amir Rajab Batubara, H. Ismail Hasan Metareum, S.H., Drs. Noersal, Drs. H. Oman Komaruddin, Dr. Sulastomo M.P.H., Prof.Dr.H.Nurcholish Madjid, Ir. Akbar Tanjung, Drs. H. Ridwan Saidi, Drs. H. Chumaidi Syarif Romas, Drs. Ahmad Zacky Siradj, Ir. H. M. Saleh Khalid, M.M., Ir. Herman Widyananda, M. Yahya Zaini, S.H., Drs. Ferry Mursyidan Baldan, Drs. Anas Urbaningrum,

serta fungsionaris PB HMI Dr. Abdul Ghofur, Drs. Jusuf Syakir, Drs. H. Asmuni Bisri Syuhada, serta aktivis HMI Darmin P. Siregar, S.E., H.M. Nur Haji Said (Pontianak), Gurzal (Pontianak), Eggy Sudjana, S.H., M.Si, Tamsil Linrung, yang semuanya telah berkenan diwawancarai, untuk melengkapi data yang dibutuhkan, maupun dorongan moral yang diberikan kepada penulis. Demikian pula kepada Bapak Ir. H. M. Sanusi, H. Achmad Tirtosudiro, Prof. Bintoro Tjokroamidjojo, M.A., Dr. H. Tarmizi Thaher, Drs. Syarifuddin Harahap, Prof. Dr. Ir. Beddu Amang, M. A., Dr. Ir. A.M Syaifuddin, Drs. H. Fathi Siregar, Prof. Drs. H. A. Malik Fajar, M. Sc., Prof. Dr. H. M. Amin Rais, M.A., Ir. Akbar Tanjung, Prof. Dr. Makmuri Muchlas, Ph.D, Sp.Kj, Machnan M. Kamaluddin, Ibu Anniswati M. Kamaluddin, S.E., Drs. Sugeng Saryadi, Drs. A. Rahman Pasha, Ir. Drs. H. A. Asri Harahap, M.M., Ir. H. Mulyono, M.A., Ir. H. Pamudji Rahardjo, Drs. H. Marwan Saridjo, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Dr. Fuad Bawazier, Dr. H.Husni Rahim, Ir. H. Suryadarma, M.B.A., PhD, Dra. Siti Moerdjilah, Dr. Laode M. Kamaludin, M.Sc., Tamsil Linrung, M. Yahya Zaini, S.H., Drs. M. Thoyib, Drs. H. Tarmizi, S., Drs. H. A. Amin Thaib BR, Lukman Hakim, dan Ir. Afni Achmad, Ambia B. Boestam, yang dengan penuh semangat kekeluargaan telah memberikan dorongan moral maupun material, yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian penulisan disertasi ini.

7. Kepada Pengurus Besar HMI, Pengurus Majelis Nasional KAHMI, Pengurus HMI Cabang Yogyakarta dan segenap keluarga besar HMI, KAHMI seluruh Indonesia yang telah memberikan simpati dan dorongan semangat untuk penulisan dan penyelesaian disertasi ini.

Penulis sadari, tugas ini dapat diselesaikan tiada lain karena doa dan dorongan yang diberikan Abang Radja Sitompul, BBA & istri, Abang Daud Sitompul & istri, isteri tercinta Irmasari Harahap, serta ananda Salmandrajat Sitompul, Rahmat Al Fajar Sitompul, Ardi Junaidi Sitompul, Lutfi Rafiuddin Sitompul, Zulfahmi Sitompul, Helvizar Muhammad Imansyah Sitompul dan Shalih Mangara Sitompul, S.H. dan segenap keluarga besar H. Salih Lobe Raja Sitompul yang berada di *Janjangkola, Sipirok, Padangsidempuan, Mandailing, Medan, Bona ni Pasogit, Jakarta, Yogyakarta, dan Malang*. Tak terkecuali segenap handai tolan di mana saja berada, yang telah memberikan dorongan maupun dukungan kepada penulis, yang sangat besar maknanya.

Terakhir, semoga semua bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, senantiasa mendapat ganjaran di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkati kita semua, dan disertasi ini bermanfaat buat *Agama, Nusa dan Bangsa. Amin.*

Yogyakarta, 6 Shafar 1422 H

30 April 2001 M

Drs. H. Agussalim Sitompul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN REKTOR	iii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR	v
HALAMAN NOTA DINAS PARA PROMOTOR DAN ANGGOTA PENILAI	vi
ABSTRAK	v ii
SEPATAH KATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I : PENGANTAR	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	21
C. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah	22
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
E. Kerangka Teori	23
E. Tinjauan Pustaka	25
F. Metodologi	35
G. Sistematika	41
BAB II : TINJAUAN HISTORIK WACANA HMI	43
A. Hubungan Lafran Pane dengan HMI	43
B. Latar Belakang Munculnya Pemikiran Keislaman – Keindonesiaan dan Berdirinya HMI	49
1. Penjajahan Belanda atas Indonesia dan Tuntutan Perang Kemerdekaan	50
2. Kebutuhan akan pemahaman dan penghayatan keagamaan	83
3. Munculnya Polarisasi Politik	85
4. Berkembangnya Faham dan Ajaran Komunis	88
5. Kedudukan Perguruan Tinggi dan Dunia Kemahasiswaan Yang Strategis	96
6. Kemajemukan Bangsa Indonesia	102
7. Tuntutan Modernisasi dan Tantangan Masa Depan	110
C. Hubungan HMI dan Organisasi Islam Terdahulu	130
D. Dinamika HMI Merespon Tantangan	148
BAB III : DINAMIKA ORGANISASIONAL HMI	217
A. Dinamika Kuantitatif HMI 1947-1997	217
1. Perkembangan Jumlah Anggota	217
2. Perkembangan Cabang dan Badko	220
3. Perkembangan Badan-Badan Khusus	225
<i>Pertama</i> , Lembaga-Lembaga HMI	226
<i>Kedua</i> , Badan Khusus KOHATI	232

	<i>Ketiga, Badan Khusus KAHMI</i>	236
	4. Perkembangan HMI dari Kongres ke Kongres dan keputusan-keputusan pokok	244
	B. Perkembangan Perkaderan HMI	265
BAB IV	: DIALEKTIKA WACANA	
	KEISLAMAN - KEINDONESIAAN HMI	289
	A. Perkembangan Pemikiran	
	Keislaman – Keindonesiaan HMI	290
	1. Periode 1947-1965	291
	2. Periode 1966-1984	325
	3. Periode 1985-1997	429
	B. Corak Pemikiran Keislaman – Keindonesiaan HMI	523
	1. Substantif	527
	2. Proaktif	529
	3. Inklusif	531
	4. Integratif	533
	5. Modernis	535
	6. Ilmiah	538
	C. Relevansi Pemikiran Keislaman – Keindonesiaan HMI dengan Wacana Intelektual Islam, dan dengan Realitas Negara - Bangsa Indonesia	547
	D. Konteks Pemikiran Keislaman – Keindonesiaan HMI dengan Islam di Indonesia, dan Pemikiran Keislaman - Keindonesiaan HMI Ditinjau dari Perspektif Pemikiran Islam	567
BAB V	: REFLEKSI KRITIS ATAS GERAKAN DAN WACANA HMI	582
	A. Posisi HMI di Tengah Gerakan Islam Kontemporer	606
	B. Wacana HMI dan Relevansinya dengan Perkembangan Agama, Sosial, Dan Politik di Indonesia	606
	C. Munculnya Gerakan dan Wacana Islam Kontemporer Berbasis Kampus	609
	D. Kritik terhadap HMI	617
BAB VI	: KESIMPULAN DAN SARAN	644
	A. Kesimpulan	644
	B. Saran – Saran	649
	Daftar Bacaan	651
	Daftar riwayat hidup	662
	Lampiran-Lampiran	667

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1 : Tarombo (silsilah) Lafran Pane (hal...49).....	I
2. Lampiran 2 : Keputusan Sidang MPK II di Ciloto Nomor : 1/Kpts/MPK-2/07/1405 tanggal 4 April 1985, tentang draf penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya azas HMI (hal 188)	II
3. Lampiran 3 : Memori Penjelasan Tentang Pancasila Sebagai Asas HMI (hal..188).....	III
4. Lampiran 4 : Surat Keputusan Bersama Pimpinan HMI Cabang tanggal 15 Maret 1986, Tentang Pembentukan MPO (hal..189).....	V
5. Lampiran 5 : Tanda Penghargaan Pangdam XVII Tjendrawasih (hal... 212)	XI
6. Lampiran 6 : Data berbagai Peristiwa yang Terjadi Pada Saat HMI Memasuki Fase Pengembangan dan Konsolidasi Organisasi selama 13 Tahun (1950-1963) (hal ..298).....	XII
7. Lampiran 7 : Enam Esensi Kepribadian HMI (hal 301).....	XIX
8. Lampiran 8 : Statemen Pengurus Besar HMI (hal..314).....	XX
9. Lampiran 9 : Daftar Buku –buku yang menjadi sumber pemikiran keislaman keindonesiaan HMI dari tahun 1947-1997 (hal...348).....	XXI
10. Lampiran 10 : Pendapat Akbar Tanjung (hal....446).....	XXVIII
11. Lampiran 11 : Daftar khasanah HMI yang meliputi Buku-buku, Risalah Sarjana Muda, Skripsi, Tesis dan Disertasi (hal.. 461).....	XXIX
12. Lampiran 12 : Sambutan Ketua Umum PB HMI M. Yahya Zaini, pada Upacara Peresmian Pembukaan Kongres ke-20 HMI di Istana Negara tanggal 21 Januari 1995(hal ...655).....	XXXIV
13. Lampiran 13 : Tawaran M. Yahya Zaini tentang perbaikan organisasi (hal...643).....	XXXIX
14. Lampiran 14 : Tawaran Anas Urbaningrum Tentang Memulihkan kredibilitas HMI (hal...643).....	XL

BAB I

PENGANTAR

BAB I
PENGANTAR

A. Latar Belakang Masalah

Di ibukota Republik Indonesia Yogyakarta¹ tanggal 14 Rabiulawal 1366 H, bertepatan 5 Februari 1947 M berdiri Himpunan Mahasiswa Islam disingkat HMI. HMI diprakarsai berdirinya oleh Lafran Pane² mahasiswa tingkat I STI³, yang ketika itu genap berusia 25 tahun⁴. Lafran Pane mendirikan HMI bersama 14 orang mahasiswa STI lainnya⁵ tanpa campur tangan pihak luar kecuali oleh mahasiswa sendiri di ruang kuliah.⁶

Ketika HMI didirikan, di Indonesia sedang berkecamuk Perang Kemerdekaan yang berjuang untuk mempertahankan dan membela Proklamasi 17 Agustus 1945 dan kehormatan negara Republik Indonesia. Saat itu Indonesia dalam keadaan tertindas di bidang politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan agama. Tujuan HMI ketika didirikan, seperti tercantum dalam Anggaran Dasarnya pasal 4.

¹ Tanggal 4 Januari 1946 Presiden dan Wakil Presiden RI pindah ke Yogyakarta. Kedudukan Perdana Menteri buat sementara tetap di Jakarta. Untuk itu lihat Osman Raliby, *Dokumenta Historika Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1953), hlm. 176.

² Mengenai riwayat hidup Lafran Pane dapat diikuti dalam Sudjoko Prasodjo, "Biografi Drs. Lafran Pane" pada Majalah *Media No. 7 Th. III*, (Yogyakarta : Penerbit PB HMI, 1957), hlm 32, dan dalam Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI (TH. 1947-1975)*, (Surabaya : Penerbit Bina Ilmu, 1976), hlm. 157.

³ Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan di Jakarta 27 Rajab 1364 H atau tanggal 8 Juli 1945. Karena ibukota RI hijrah ke Yogyakarta maka STI pun ikut pindah. Setelah perpindahan itu, secara resmi 10 April 1946, STI dibuka kembali, memiliki Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ekonomi. Tanggal 10 Maret 1948 STI ditingkatkan menjadi Universitas Islam Indonesia (UII). Lihat Supardi dkk. (Penyunting), *Setengah Abad UII Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit UII Press, 1994), hlm. 25.

⁴ Sebenarnya Lafran Pane lahir di Padangsidempuan 5 Februari 1922. Untuk menghindari berbagai macam tafsiran, Lafran Pane mengubah tanggal lahirnya menjadi 12 April 1923. Sewaktu mendirikan HMI, usianya persis 25 tahun. Hal itu untuk pertama kali diungkapkan Dra. Tetty Sari Rakhmiati putri bungsu Lafran Pane didampingi abangnya Ir. M. Iqbal Pane dan Ibu Lafran Pane tanggal 25 Januari 1991 ketika jenazah almarhum Lafran Pane mau dimakamkan. Peristiwa itu disaksikan Menpora RI Ir. Akbar Tanjung, Drs. Musa Ahmad, mantan Ketua Umum HMI Komisariat FKSS IKIP Yogya, Drs. A. Taufik Daldiri, mantan Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, penulis, dan beberapa orang anggota HMI lainnya.

⁵ Para pendiri HMI lainnya adalah Karnoto Zarkasyi, Dahlan Husein, Maisaroh Hilal, Soewali, Yusdi Ghozali, Mansyur, Siti Zainah, M. Anwar, Hasan Basri, Marwan, Zulkarnaen, Tayeb Razak, Toha Mashudi, dan Bidron Hadi. Untuk itu lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI*, hlm. 23.

⁶ HMI didirikan adalah sebagai gerakan intelektual, yang dimulai dari dan berbasis di kampus. Lihat *Ketetapan Seminar Sejarah HMI di Malang tanggal 27-30 November 1975, Nomor : 001/SS/HMI/1975*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1975), hlm. 2.

Pengantar

- a. Mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia.
- b. Menegakkan dan mengembangkan agama Islam.⁷

Kedua tujuan itu merupakan respon terhadap situasi politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, agama yang tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Respon itu diharapkan mampu membawa perubahan radikal, terbebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda, sehingga tercipta suatu kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Ketika HMI didirikan muncul reaksi dan Persyarikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) yang sudah berdiri tahun 1946. Reaksi ini bersifat ideologis karena PMY berhaluan komunis. HMI dituduh pemecah belah mahasiswa. Reaksi juga muncul dari kalangan Partai Masyumi yang disuarakan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang didirikan di Jakarta 2 Oktober 1945, dan juga dari Pelajar Islam Indonesia (PII), yang berdiri di Yogyakarta tanggal 4 Mei 1947, 14 bulan setelah HMI didirikan. HMI dituduh pemecah belah mahasiswa, karena pemuda, juga adalah mahasiswa, dan tidak perlu mendirikan organisasi mahasiswa secara khusus. Reaksi-reaksi itu berjalan sembilan bulan dan baru hilang di akhir November 1947.⁸

Menghadapi reaksi dan tantangan itu HMI mengadakan berbagai acara untuk memperkenalkan HMI lewat ceramah-ceramah dari kalangan tokoh-tokoh terkemuka. Ceramah itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran berideologi, berpolitik, dan berorganisasi bagi mahasiswa-mahasiswa Islam. Ceramah-ceramah itu meliputi masalah yang up to date, seperti *Pengakuan Mesir dan Politik Arab League* oleh Ismail Banda, M.A., *Inter Asian Relation Conference*, oleh Mr. Ali Sastroamidjojo, dosen STI dan lain-lain. Hasil ceramah itu dipublikir dan disebar di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Dengan demikian HMI semakin populer, berkembang cepat melebarkan sayapnya sejalan dengan pertumbuhan universitas, perguruan tinggi

⁷ Lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI (TH. 1947-1975)*, (Surabaya : Penerbit Bina Ilmu, 1976), hlm. 20.

⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

Pengantar

dan akademi di seluruh nusantara. HMI tumbuh meninggi dengan kegiatan-kegiatannya, memberi isi, melebar dengan perkenalannya dalam masyarakat luas⁹. Masa-masa kritis selama 9 bulan telah dilalui. Kongres I HMI dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 30 November 1947. Rumusan tujuan HMI, mengalami perubahan sehingga berbunyi :

- a. Mempertegak dan mengembangkan agama Islam.
- b. Mempertinggi derajat rakyat dan negara Republik Indonesia.¹⁰

Melihat rumusan tujuan HMI, sejak awal berdiri, HMI telah memiliki pemikiran keislaman dan keindonesiaan, yang muncul dari suatu proses panjang. Ketika pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI muncul, Indonesia bukan dalam vakum dan kosong. Terjalin hubungan historis dan aspiratif dengan organisasi-organisasi Islam terdahulu, dalam hubungan sejarah intelektual. Pemikiran keislaman tergambar pada rumusan tujuan pada butir b, hasil Keputusan Rapat tanggal 5 Februari 1947, atau pada butir a hasil Keputusan Kongres I tahun 1947. Adapun pemikiran keindonesiaan tertuang dalam rumusan tujuan HMI butir a hasil Keputusan Rapat tanggal 5 Februari 1947, atau pada butir b hasil keputusan Kongres I HMI tahun 1947¹¹. Rumusan itu mengisyaratkan bahwa antara keislaman - keindonesiaan HMI tidak ada dikotomi, justru satu kesatuan yang integral.

Sejalan dengan pemikiran di atas, Nurcholish Madjid, mengemukakan :

Dalam suasana kehidupan politik nasional, yang ditandai kemantapan masalah-masalah asasi kenegaraan, tatapan terhadap masa depan bangsa dan tanah air, oleh orang-orang Muslim akan mewujudkan diri dalam sikap hidup nasional, yang tidak lagi melihat kesenjangan antara keislaman dan keindonesiaan. Peniadaan kesenjangan itu sendiri bukanlah usaha luar biasa dari pihak orang-orang Muslim. Sebab yang terjadi ialah pengulangan apa yang telah ada dalam rekaman sejarah nusantara.

Lebih mendasar lagi, orang-orang Muslim Indonesia menyongsong masa depan bangsa dan negara dalam semangat tiadanya lagi kesenjangan antara Islam dan Pancasila. Peniadaan

⁹ Lihat *Sejarah Perjuangan HMI*, (Yogyakarta : Penerbit Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, 1966), hlm. 9. Lihat juga *Media*, Nomor 6/7, Januari-Februari, 1956, (Yogyakarta : Penerbit PB HMI, 1956), hlm. 16.

¹⁰ Lihat naskah lengkap Anggaran Dasar HMI Hasil Keputusan Kongres I HMI di Yogyakarta tanggal 30 November 1947, yang terdiri dari 12 pasal. Untuk itu lihat Agussalim Sitompul, *Historiografi HMI 1947-1993*, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1995), Lampiran 2, hlm. 246.

¹¹ Bandingkan rumusan tujuan HMI yang pertama dan yang kedua, untuk memperoleh gambaran yang jelas.

Pengantar

inipun tidak memerlukan usaha ekstra dari pihak orang-orang Muslim, karena memang begitulah yang dikehendaki oleh para ulama yang terlibat langsung dalam perumusan dasar negara itu.¹²

Kemerdekaan Indonesia yang diperoleh tahun 1945, telah membawa suasana dan *trace* baru bagi kehidupan rakyat. Berbeda dengan pasca pengakuan kedaulatan rakyat tahun 1949, agama Islam juga mengalami pertumbuhan, perkembangan, di atas realitas kemajemukan. Kemajemukan itu sendiri, sudah menjadi suatu kenyataan baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka.

Untuk melalui masa sekarang dan menyongsong masa depan, umat Islam berpikir dan bekerja dalam rangka pelaksanaan ajaran Islam. Untuk pelaksanaan itu diperlukan pengertian yang benar dan utuh tentang ajaran Islam sendiri, maupun tentang lingkungan Indonesia sebagai tempat melaksanakan ajaran Islam. Berkaitan itu Nurcholish mengungkapkan :

Maka setiap langkah melaksanakan ajaran Islam harus memperhitungkan kondisi sosial budaya yang ciri utamanya ialah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan. Belum diperoleh suatu pola sosial budaya yang dapat dipandang sebagai bentuk permanen kebudayaan, baik sebagai sistem nilai maupun sebagai pranata. Maka dalam proses pertumbuhan dan perkembangan itulah umat Islam Indonesia diharapkan memberi saham dan tanggung jawab dengan jumlah numerikal mereka.¹³

Tentang pertumbuhan dan perkembangan mengandung makna, bahwa dalam pelaksanaan ajaran Islam, perlu dilakukan secara bertahap. Tidak ada suatu pekerjaan apalagi pekerjaan besar yang bisa diselesaikan sekaligus untuk selamanya, atas segala hidup dan kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan, karena perubahan waktu dan tempat¹⁴. Gagasan mengenai perubahan dan perkembangan ini terefleksikan dalam berbagai ide, mengenai bagaimana caranya melaksanakan ajaran Islam dalam masyarakat. Hal ini berkaitan erat dengan masalah *kesadaran*

¹² Nurcholish Madjid, *Keislaman dan Keindonesiaan Menatap Masa Depan*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina, 1986), hlm. 23.

¹³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. Ixi.

¹⁴ *Ibid*, hlm. Ixiv.

Pengantar

historis, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu mengenai tatanan hidup manusia ada sangkut pautnya dengan perbedaan zaman dan tempat.¹⁵

Menurut A. Sonny Keraf, masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sangat pluralistik atau majemuk. Indonesia, suatu negara fenomena pluralisme telah menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari secara historis maupun empiris. Kenyataan ini sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kemajemukan masyarakat Indonesia dalam segala aspeknya, merupakan modal dasar bagi kemajemukan. Akan tetapi di pihak lain kemajemukan itu dapat menjadi batu sandungan bagi kemajuan suatu bangsa¹⁶. Pluralitas ada dalam skala dan dimensi nasional dan skala serta dimensi-dimensi di bawahnya. Untuk yang berskala dan berdimensi nasional, telah tergambar bagaimana pluralitas itu melembaga dalam bentuk beragamnya agama, suku, ras, adat istiadat, bahasa, bentuk fisik, sosial politik, budaya, ideologi, dan sebagainya. Salah satu perwujudan pluralitas bangsa Indonesia adalah dalam bentuk keberagamaan. Terdapat enam agama di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katholik dan Khong Hu Cu.¹⁷

Pluralitas di bidang kebudayaan pun sangat menonjol. Nurcholish Madjid berpendapat, bahwa Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang paling kompleks dan rumit dari segi budaya. Tidak ada satu unsur budaya pun di Indonesia yang begitu murni sehingga tidak memasukkan unsur-unsur budaya lain. Unsur-unsur subkultur yang ada di Indonesia, antara lain keislaman, kosmopolitisme, nativisme, kebaratan, kejawaan, keluarjawaan, keagamaan, ketidakagamaan, dan kekristenan¹⁸. Pluralitas atau kemajemukan dalam aspek politik, sosial,

¹⁵ *Ibid*, hlm. Ixi.

¹⁶ A. Sony Keraf, "Masyarakat Majemuk dan Politik Kebudayaan", dalam *Prisma*, Tahun XXVI, No. 4, 1997, hlm. 3.

¹⁷ Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1969, agama Khong Hu Chu termasuk agama yang diakui resmi di Indonesia. Tetapi berdasarkan kebijaksanaan pemerintah sehubungan dengan terjadinya Gestapu PKI tahun 1965, maka agama Khong Hu Chu tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan.

¹⁸ Nurcholish Madjid, "Pola-Pola Budaya Indonesia dan Implikasi dalam Bidang Politik", dalam *Sarasehan*, (Jakarta : Penerbit Departemen Kader PB HMI, 1980), hlm. 11.

Pengantar

budaya, dan kemasyarakatan, ditandai munculnya berbagai macam corak organisasi sosial, partai politik, dan pemuda, baik yang bercorak Islam, nasional, Kristen Protestan dan Katholik, serta bercorak sosialis dan komunis. Pluralisme dalam intern umat Islam Indonesia juga tergambar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari dataran pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. Realitas ini disebabkan antara lain karena keterbelakangan di bidang pendidikan, ekonomi, dan faktor politik. Pluralisme umat Islam nampak pula, terpolanya mereka dalam berbagai organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan, pemahaman agama dengan adanya *mazhab-mazhab*. Karena bagian terbesar penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka keberadaan umat Islam di Indonesia signifikan dengan persoalan bangsa pada umumnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim sebagai gambaran kultural dan sosiologis yang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Kenyataannya klasifikasi nilai dan intensitas keislamannya cukup beragam.¹⁹

Selain persoalan-persoalan di atas muncul persoalan ideologis tiga bulan menjelang Proklamasi Kemerdekaan. Isu yang paling krusial dalam perdebatan itu ialah pembicaraan tentang dasar dan falsafah ideologi negara bagi Indonesia setelah kemerdekaan. Ada dua aliran politik yang muncul ke permukaan. Islam dan aliran pemisahan negara dan agama. Aliran pertama dibela ahli-ahli agama yang bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia. Sedang faham kedua, adalah seperti disarankan Mohammad Hatta, yaitu faham yang memisahkan antara urusan negara dan urusan Islam, bukan negara Islam.²⁰

Isu tentang dasar negara yang dilematik, akhirnya dapat diselesaikan dengan sebuah kompromi politik dalam bentuk *Piagam Jakarta* tanggal 22 Juni 1945, sebagaimana diungkapkan Syafii Maarif :

¹⁹ Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, (Yogyakarta : Penerbit SIPRESS, 1994), hlm. 73.

²⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Studi Tentang Percaturan dalam Konsituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1996), hlm. 104.

Pengantar

Masalah dasar negara muncul kembali setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Kelompok minoritas, menolak anak kalimat : “..... **dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya**” itu, masuk dalam Pembukaan UUD 1945. Setelah melewati saat-saat kritis, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil umat Islam akhirnya menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Akan tetapi sila pertama, yaitu sila **Ketuhanan** mendapat tambahan atribut yang sangat menentukan, hingga menjadi : **Ketuhanan Yang Maha Esa**.²¹

Kasus ini menandakan bahwa dalam masyarakat terdapat berbagai golongan yang mempunyai sikap tentang Piagam Jakarta, yaitu golongan Islam, Nasionalisme Sekuler, golongan Kristen, dan golongan komunis.

Dalam konteks bermasyarakat, pluralisme seringkali menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu integritas masyarakat. Masih terdapat pandangan negatif terhadap pluralisme. Pluralisme dipahami sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan implikasi-implikasi sosial baik karena bertolak dari suatu kepentingan keagamaan sempit, maupun bertolak dari supremasi budaya kelompok masyarakat tertentu. Pada kehidupan modern, masalah pluralisme merupakan agenda kemanusiaan yang perlu mendapatkan respon secara arif dan konstruktif. Karena bagaimana pun, pluralisme merupakan kenyataan sosiologis yang tidak dapat dihindari. Ia merupakan bagian dari **sunnatullah**. Pencegahan implikasi negatif pluralisme yang perlu dilakukan, adalah dengan pengembangan sikap arif dalam menerima pluralisme menjadi kenyataan sinergis dalam kehidupan masyarakat di masa depan. Dalam konteks inilah, **agama dan demokrasi**, mempunyai peranan strategis. Agama dalam konteks pluralisme akan menjadi landasan etis, sementara demokrasi akan menjadi semacam common denominator.²²

Sulit sekali bagi pemimpin bangsa Indonesia untuk menggariskan satu kebijaksanaan kultural tertentu, berdasarkan satu pola kultural tertentu, yang sesuai atau yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia walaupun penduduknya Muslim atau mengaku Muslim, kata Nurcholish Madjid. Sikap agama terhadap pluralisme sangat jelas. Agama tidak menolak adanya pluralisme,

²¹ *Ibid*, hlm. 109.

²² Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, hlm. 33-34.

Pengantar

bahkan agama memberi kerangka sikap etis. Dari sudut pandangan Islam, sikap positif tersebut dan kerangka sikap etis yang harus dikembangkan, tercermin dari beberapa ayat Al Quran yang secara eksplisit mengakui kenyataan tersebut²³. Misalnya Al Quran mengatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar mereka saling mengenal dan menghargai (Q.S., 49 : 13)²⁴

Terdapat dua paham yang dominan di Indonesia. *Pertama*, paham Islam, yang telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7/8 Masehi²⁵. *Kedua* paham nasionalisme atau kebangsaan. Paham nasionalisme ini bersamaan timbulnya pada masa Indonesia mengalami kebangkitan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo 1908 dan Syarikat Islam 1911²⁶. Beberapa tahun setelah paham Islam dan nasionalisme berkembang, tahun 1913 muncullah paham Marxisme masuk di Indonesia. Ketiga paham itu bertemu dan bersaing di pentas perpolitikan Indonesia.²⁷

Semasa mudanya, Sukarno tahun 1926 menulis gagasannya tentang *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme* di Suluh Indonesia Muda. Ketika pertama kali mengemukakan gagasannya Sukarno mengatakan :

Dan keinsyafan akan tragic inilah yang menyadarkan rakyat-rakyat jajahan itu; sebab, walaupun lahirnya sudah kalah dan takluk, maka Spirit of Asia masih kekal. Rokh Asia masih hidup sebagai api yang tiada padamnya. Keinsyafan akan tragic inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat Indonesia-kita yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai tiga sifat: nasionalistis, islamistis, dan marxistis-lah adanya.²⁸

²³ *Ibid*, hlm. 34.

²⁴ Lihat *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta : Penerbit Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran, 1984), hlm. 847.

²⁵ Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia sangat beragam. Salah satu di antaranya adalah teori Hamka. Untuk itu lihat *Sejarah Masuknya Islam keIndonesia, Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia*, (Jakarta : Penerbit 1963), hlm.265.

²⁶ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Penerjemah Hardjowidjono Dharmono (Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press, 1995), hlm 248.

²⁷ Wiratmo Sukito, "Pengaruh Marxisme Sebagai Ideologi Terhadap Gagasan-gagasan Sukarno", dalam *Persepsi*, Th. I No.3, Oktober-November-Desember, (Jakarta : Penerbit Yayasan Pancasila Sakti, 1979), hlm.1.

²⁸ Sukarno, *Di bawah Bendera Revolusi*, Jilid pertama, (Jakarta : Penerbit Panitia Penerbit di Bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm.2.

Pengantar

Memperpanjang gagasannya itu, selanjutnya Sukarno menulis :

Islam sejati tidaklah mengandung asas anti nasionalistis, Islam yang sejati tidaklah bertabiat anti-sosialistis. Selama kaum Islamis memusuhi paham-paham nasionalisme yang luas budi, dan marxisme yang benar, selama itu kaum Islam tidak berdiri di atas Shiratal Mustaqim, selama itu tidaklah ia bisa mengangkat Islam dari kenistaan dan berusaha tahadi.²⁹

Uraian setebal dua puluh tiga halaman itu, Sukarno mengambil suatu konklusi bahwa tiga kekuatan ideologi yang terdapat di Indonesia : nasionalisme, Islam dan Marxisme harus bersatu padu menghadapi kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, apabila ingin mencapai Indonesia merdeka akan berhasil.

Secara sosiologis, konsep Bung Karno itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang religius. Apalagi dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah Pancasila, yang juga digagasnya sendiri. Pancasila dengan sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti Tauhid, mengakui Tuhan dan kekuasaannya. Berarti mengakui adanya Agama. Maka ideologi komunis bertentangan dengan Pancasila. Menurut Marxisme-Leninisme, agama adalah candu bagi masyarakat. Sebelum ilmu pengetahuan ada, agama telah mengungkung manusia dengan konsep-konsep yang tidak dapat dipertahankan. Setelah pengetahuan ada, Marx dan Lenin berpendapat bahwa agama merintang proses ke arah sosialisme, dan harus dilenyapkan³⁰. Indonesia akan dijadikan satelit dari Uni Sovyet.

Tiga puluh lima tahun setelah gagasannya hendak mempersatukan Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, tahun 1961, Sukarno kembali mengajukan gagasannya. Konsep itu dibungkus dengan baju baru yaitu NASAKOM (Nasional – Agama – Komunis). Substansi antara gagasan Bung Karno tahun 1926, dan tahun 1961 adalah sama yaitu ingin mempersatukan faham Nasional, Agama, dan Komunis di Indonesia. Gagasan Soekarno mau menyatukan NASIMAR, faham Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, maupun dalam konsep Nasional – Agama – Komunis (NASAKOM) secara diametral tidak sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 10.

³⁰ M. Rasyidi, *Islam Menentang Komunisme*, (Jakarta : Penerbit Islam Studi Club Indonesia, 1965), hlm. 11.

Pengantar

religius. Islam tidak mungkin dapat disatukan dengan Marxisme atau Komunisme, malah selanjutnya akan terjadi konflik.

Sebelum Sukarno dapat mempersatukan Nasionalisme – Islamisme – Marxisme, di Madiun tanggal 18 September 1948, PKI melakukan pengkhianatan dan pemberontakan. Tanpa mengenal perikemanusiaan, PKI membantai para ulama, pemimpin dan umat Islam. Puluhan ribu umat Islam dan golongan nasionalis menjadi korban keganasan PKI itu. Tujuh belas tahun kemudian, ketika gencar-gencarnya Presiden Sukarno mempropagandakan persatuan NASAKOM, tanggal 30 September 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) kembali melakukan pemberontakan dan perebutan kekuasaan.³¹

Dapat disebutkan bahwa pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, merupakan antitesis terhadap gagasan Sukarno. Baik gagasan itu mau mempersatukan Nasionalisme – Islamisme – Marxisme (NASIMAR) tahun 1926, maupun dalam konsep Nasional – Agama – Komunis (NASAKOM) tahun 1961. Antara Islam dengan komunis secara antagonis keduanya bertentangan, tidak mungkin dipersatukan. Antara teks yaitu gagasan Sukarno untuk menyatukan Nasionalisme – Islamisme – Marxisme dengan realitas bahwa bangsa Indonesia adalah masyarakat religius, tidak dapat dipersatukan.

Munculnya antitesis ini, karena adanya suatu dialektika. Dialektika artinya tentang persatuan hal-hal yang bertentangan. Menurut Hegel, semua yang berujud adalah dalam keadaan berubah. Tidak ada barang yang tetap. Unsur dari dialektika adalah *tesis*, *antitesis*, dan *sintesis*. *Tesis* merupakan suatu keadaan yang tertentu. *Antitesis* merupakan suatu tantangan terhadap antitesis yang akan mengubahnya. Lantas dari pertentangan antara keadaan tertentu serta saingannya tersebut akan timbul suatu keadaan baru sebagai hasil adu kekuatan. Keadaan baru

³¹ Lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan*, hlm. 32, 72.

Pengantar

ini yang disebut sintesis³². Akan tetapi pada saat sintesis itu muncul ia telah menjadi tesis lagi, karena berhadapan dengan tantangan baru, dan begitu seterusnya.

Dialektika, juga teori tentang persatuan hal-hal yang hidup dan berwujud selalu dalam keadaan berubah malah musnah. Tidak ada sesuatu yang tetap kecuali Allah. Tesis, suatu keadaan tertentu yaitu gagasan Sukarno untuk mempersatukan faham Nasionalisme – Islamisme dan Marxisme tahun 1926, atau dengan baju baru NASAKOM tahun 1961. Antitesis yaitu pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI merupakan suatu tantangan terhadap tesis, yang akan mengubahnya, karena tesis Sukarno tidak sesuai dan bertentangan dengan Islam. Dari pertentangan antara gagasan Sukarno serta pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI akan muncul suatu keadaan baru sebagai hasil adu kekuatan, yaitu pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, sebagai satu ideologi yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan dan keislaman di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena antara pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI ada titik temu yaitu Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia. Kondisi baru inilah yang disebut sintesis. Pada sintesis muncul, ia telah menjadi tesis (yaitu pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI) lagi, karena berhadapan dengan tantangan baru (pemikiran baru).

Dari pembahasan ini dapat diajukan teori :

Dua ideologi atau lebih yang saling bertentangan, tidak mungkin bersatu. Islam, Pancasila, secara prinsip bertentangan dengan komunis – tidak mungkin dipersatukan. Gagasan mempersatukan Nasionalisme – Islamisme – Marxisme adalah utopia, karena di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan. Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI merupakan antitesis terhadap gagasan Soekarno yang mau mempersatukan antara

³² M. Rasyidi, *Islam Menentang*, hlm. 12.

Pengantar

Nasionalisme – Islamisme, dan Marxisme (NASIMAR) tahun 1926, maupun konsep Nasional – Agama, dan Komunis (NASAKOM) tahun 1961.

Berdasarkan teori konflik, Karl Marx melihat masyarakat manusia adalah sebuah proses perkembangan yang akan mengakhiri konflik melalui konflik, dalam suatu bentuk kedamaian yang harmonis. Munculnya konflik sosial disebabkan faktor ekonomis. Marx melihat, konflik sosial terjadi terutama di antara kelompok-kelompok atau kelas-kelas daripada individu-individu.³³

Lewis A. Coser melihat bahwa konflik itu adalah disfungsional bagi suatu kelompok. Coser mencoba mengemukakan kondisi-kondisi yang secara positif, konflik membantu mempertahankan struktur sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya terbentuk dan dipertahankan. Konflik juga dapat menyatukan para anggota kelompok, dengan cara pengukuhan kembali identitas kelompok. Apakah konflik merupakan sumber perpecahan kelompok, kata Coser itu tergantung dari awal ketegangan, isu tentang konflik, bagaimana cara menangani ketegangan, dan bagaimana tipe struktur konflik itu berkembang, Coser membedakan antara konflik *in – group* dan konflik dengan *out – group*, antara nilai inti dengan masalah yang lebih bersifat pinggiran, antara konflik yang menghasilkan perubahan struktur lawan konflik yang disalurkan lewat lembaga-lembaga katup penyelamat, dan antara konflik pada struktur berjaringan longgar dan struktur berjaringan ketat. Coser juga membedakan konflik realistik dengan non realistik. Keseluruhan butir-butir tersebut merupakan faktor-faktor yang mencantumkan fungsi konflik sebagai suatu proses sosial.³⁴

Dasar teori Ralf Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan parsial serta perumusan kembali teori Karl Marx. Ia menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelasnya dalam masyarakat industri kontemporer. Bagi Dahrendorf, kelas tidak berarti pemilihan sarana-sarana produksi, akan tetapi lebih merupakan pemilihan kekuasaan, yang mencakup hak absah untuk menguasai orang lain. Perjuangan kelas dalam masyarakat modern, baik dalam perekonomian, kapitalis maupun komunis, dalam pemerintahan bebas dan totaliter, berada di seputar pengendalian kekuasaan.

Dahrendorf melihat kelompok-kelompok pertentangan sebagai kelompok yang lahir dari pertentangan kepentingan bersama para individu yang mampu berorganisasi. Menguraikan proses ini, melalui mana perubahan kelompok semu menjadi kelompok kepentingan mampu memberi dampak pada struktur. Lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari kepentingan-kepentingan itu merupakan jembatan di atas mana perubahan sosial terjadi. Berbagai usaha harus diarahkan untuk mengatur pertentangan-pertentangan sosial melalui institusi-institusi yang efektif daripada melalui penekanan pertentangan itu. Teori Dahrendorf adalah teori masyarakat yang bersifat material. Lewat teori itu dia

³³ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, diterjemahkan Mochtar Mas'od, dkk., (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 134.

³⁴ Margareth, M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan Tim Penerjemah Yasogama, (Jakarta : Penerbit CV. Rajawali, 1984), hlm. 127.

Pengantar

menunjukkan bagaimana organisasi-organisasi dapat dan benar-benar lahir dari pertentangan kelas.³⁵

Terjadinya konflik merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai negara, baik di negara sosialis, kapitalis, maupun negara yang berbasis Islam. Konflik terjadi untuk mempertahankan kelompok dan kemungkinan konflik sosial. Konflik bisa mereda, asalkan ada yang dapat dijadikan katup penyelamat. Konflik terbuka juga terjadi antara HMI (baca : Islam) dengan kaum komunis, di saat PKI dan pendukungnya menargetkan pembubaran HMI sebelum G 30 S/PKI dicetuskan. Konflik yang terjadi antara HMI dengan *out – group*, memperkuat identitas dan solidaritas para anggota HMI (*in- group*).

Kenyataan di Indonesia menunjukkan, adanya konflik antara Islam, Pancasila, dengan komunis. Konflik itu berakhir ketika terjadi pemberontakan Gestapu/PKI tahun 1965, karena faham komunis sudah dilarang. Terciptalah satu kedamaian dan keharmonisan di antara bangsa Indonesia yang sangat majemuk, di atas titik temu Pancasila.

Agama Islam di Indonesia adalah alat pemersatu. Semangat nasionalisme Indonesia itu, salah satu perekatnya adalah bahasa Melayu, yang dipakai untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian agama Islam tersebar merata di seluruh kepulauan Indonesia. Kebudayaan – kebudayaan daerah setelah mendapatkan pengaruh dari Islam, dapat bersatu menjadi kebudayaan nasional. Tanpa Islam, nasionalisme Indonesia itu *tidak ada*. Pada awalnya semangat nasionalisme itu baru dilakukan pada elite HMI. Setelah tahun 1969, semangat nasionalisme itu menjadi massif dan tuntas, dengan proses panjang. Hal itu disebabkan karena dari tahun 1947 sampai tahun 1965, masalah ideologi dalam kehidupan bangsa Indonesia sangat menonjol, yang ditandai faham nasionalisme, komunisme, di samping ide Bung Karno untuk mempersatukan faham Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, sehingga menjadi Nasakom. Untuk menjawabnya pun, harus berdasarkan ideologi. Bahkan, sewaktu menghadapi PKI, rasa nasionalisme itu lebih tebal,

³⁵ *Ibid.*, hlm. 145.

Pengantar

karena ditopang kerja sama dengan ABRI khususnya Angkatan Darat, menghadapi bahaya komunisme yang diimpor dari luar³⁶. Bahkan, kata Sulastomo, di sinilah bertemu wawasan yang paling mendasar antara ABRI dengan HMI, yaitu wawasan kebangsaan atau Nasionalisme, dan bisa dipersatukan dalam satu pandangan. Pertemuan ini unik, karena tanpa kekuatan satu organisasi, rasanya sulit dipersatukan.³⁷

Dengan ungkapan yang berbeda Ridwan Saidi sependapat dengan Yusuf Syakir. Indonesia yang berpuak-puak, memiliki wilayah yang luas, budaya yang berbeda, akan tetapi menurut pemikiran Islam, semuanya itu satu, tidak dibedakan. Motivasi semangat kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia muncul dari Islam, yang untuk pertama kali diintrodusir Sarekat Dagang Islam (SDI)³⁸. Dikatakan Ridwan Saidi, Islam dan kebangsaan, atau nasionalisme Indonesia marak dalam perdebatan intelektual dan ulama Indonesia sejak tahun 1920-an. Seringkali ditafsirkan, bahwa Islam dan kebangsaan seolah-olah sebagai dua komponen yang saling berhadapan. Jika diamati, sebenarnya hubungan Islam dan kebangsaan dalam perspektif sejarah cukup wajar saja. Jika pernah terjadi polemik antara tokoh Islam dan tokoh nasionalis dalam pelbagai masalah kenegaraan hal itu juga wajar, apabila dihubungkan dengan konteks upaya bangsa merumuskan landasan kehidupan bernegara.³⁹

Bagaimana Islam memandang nasionalisme itu ? Seperti ditulis Samadikun, Kasman, Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk dapat membangkitkan jiwa kebangsaan pada rakyat, kita harus menghayati Islam. Untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, kita harus membangkitkan

³⁶ Wawancara dengan Yusuf Syakir, Sekjen PB HMI 1965-1966 di Gedung DPR/MPR RI Jl Gatot Subroto Jakarta, tanggal 18 Maret 1998.

³⁷ Wawancara dengan Sulastomo, Ketua Umum PB HMI periode 1963-1966, di Pondok Indah, Jl. Kartika Pinang SH 13 Jakarta Selatan, tanggal 29 Maret 1998.

³⁸ Wawancara dengan Ridwan Saidi, Ketua Umum PB HMI periode 1974-1976, di Jl. Burung Merak II/31 Blok N-3 Bintaro Jaya Jakarta Selatan, tanggal 24 Maret 1998.

³⁹ Ridwan Saidi, *Islam dan Nasionalisme Indonesia Mengungkap dokumen sangat eksklusif 1920 s/d 1950-an tentang pemikiran Islam mengenai masalah kebangsaan*, (Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995), hlm. 1.

Pengantar

semangat Islam. Antara agama dan nasionalisme begitu erat kaitannya⁴⁰. Menurut Kasman Singodimejo, bagi seorang Muslim, nasionalisme merupakan salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh agama. Berjuang untuk nusa dan bangsa sungguh termasuk kewajiban agama. Seorang Muslim yang tidak mau berjuang untuk nusa dan bangsanya, sesungguhnya telah melalaikan salah satu kewajiban suci. Setiap Muslim harus menjadi seorang nasionalis yang berpartisipasi demi untuk kemajuan nusa dan bangsa, dengan kesadaran bahwa yang demikian itu akan membawa kemajuan bagi seluruh umat manusia.⁴¹

Melihat betapa Islam sebagai tali pengikat di antara bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara melihat Sarekat Islam sebagai pergerakan nasionalisme, bukan sebagai pergerakan agama. Untuk kurun waktu itu, cuma Islam yang dapat dijadikan alat pengikat seluruh penduduk Hindia Timur. Penyebaran agama Islam merata di seantero kawasan yang pada waktu itu bernama Hindia Timur⁴². Dari ungkapan Samadikun, Ki Hajar Dewantoro, Kasman Singodimedjo ini, berarti Islam itu memberikan motivasi yang kuat bagi terciptanya jiwa dan semangat kebangsaan. Antara Islam dan semangat kebangsaan atau nasionalisme itu saling mengisi. Bukan saling berhadapan, seperti banyak ditafsirkan berbagai kalangan.

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Berarti jika pintu ijtihad telah tertutup maka berhenti pulalah manusia berpikir tinggal menerima dan merasa puas terhadap apa yang sudah ada. Akan tetapi akibatnya umat Islam hidup dalam suasana taqlid, jumud, yang sama sekali tidak memikirkan lagi soal-soal keduniaan, apalagi memperhatikan pengaruh perubahan dalam masyarakat Indonesia. Kehidupan para alim ulama sangat tertutup,

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 7.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 20.

⁴² Ridwan Saidi, *Kebangkitan Islam: Era Orde Baru Studi Kepeloporan Cendekiawan Islam Sejak Zaman Belanda sampai ICMI*, (Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1993), hlm. 67.

Pengantar

baik dalam cara hidup dan alam pikiran. Mereka berpendirian bahwa kemiskinan dan penderitaan itu, salah satu jalan untuk dapat bersatu dengan Tuhan.⁴³

Menutup pintu ijtihad adalah cara berpikir yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam selalu menyuruh dan mendorong umatnya untuk selalu berpikir. Berarti pintu ijtihad tidak pernah tertutup biar sesaat pun. Karenanya cara berpikir yang salah itu harus dirubah, sehingga umat Islam menyadari betapa pentingnya berpikir. HMI berpendapat, bahwa pintu ijtihad selamanya terbuka dan senantiasa mendorong untuk terus menerus berpikir dan berusaha mendapatkan yang lebih baik.

Berkaitan dengan problem yang dikemukakan dapat diajukan hipotesis :

1. Pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI adalah suatu pemikiran yang relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang dalam pertumbuhan, perkembangan dan kemajemukan.
2. Pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI adalah pengejawantahan dari sifat independensi HMI.

Memperhatikan secara seksama bahwa sebelum munculnya pemikiran HMI berkembang berbagai fenomena mengenai kehidupan masyarakat Indonesia. *Pertama*, kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, yang ciri utamanya adalah pertumbuhan, perkembangan dan kemajemukan. *Kedua*, timbulnya gagasan Sukarno untuk menyatukan paham nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. *Ketiga*, mengiringi proklamasi 17 Agustus 1945, munculnya faham dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang kuat di kalangan bangsa Indonesia. *Keempat*, adanya pikiran dan pendapat bahwa pintu Ijtihad telah tertutup. *Kelima*, adanya organisasi Islam terdahulu seperti SDI, Muhammadiyah, MIAI, JIB, dan Masyumi, yang juga mempunyai pemikiran tentang keislaman dan keindonesiaan. Masyarakat dengan kondisi seperti itu memerlukan suatu ideologi baru, yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagai titik temu. Ideologi tersebut juga harus relevan dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang

⁴³ Lihat Lafran Pane, "Keadaan dan Kemungkinan", hlm.57.

Pengantar

mayoritas beragama Islam, dan dapat diterima seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sekarang yang menjadi problem adalah bagaimana membangun kehidupan bersama di kalangan bangsa Indonesia, di atas realitas yang sedang dalam *pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan*. Kehidupan bersama itu secara efektif dapat menciptakan dan menjamin tercapainya kepentingan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Problem lain bagaimana ideologi baru itu dapat diterima dan dilaksanakan dalam satu kerangka berpikir khas Indonesia, sehingga tidak terdapat dikotomi antara keduanya. Problem lain yang nampak, mengapa HMI mengajukan konsep pemikiran keislaman – keindonesiaan sebagai alternatif untuk mencegah timbulnya berbagai problem dan implikasi dari pluralisme di kalangan bangsa Indonesia. Bagaimana pula corak pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI.

Menjelang berakhirnya abad ke-20, pemikiran keislaman-keindonesiaan di Indonesia mengalami perkembangan sangat menonjol. Barangkali inilah salah satu ciri abad ini, menghasilkan corak pemikiran yang sangat kaya dalam khazanahnya. Indikasinya terlihat tampilnya pemikiran-pemikiran atau tesa-tesa baru dari intelektual muda, berwawasan kreatif-inovatif. Pertanda ini ditopang suasana kebebasan berpendapat yang menjebol rintangan-rintangan ideologi politik aliran yang kaku. Sebagai tradisi ilmiah, gejala itu juga mendatangkan umpan balik berupa bangkitnya gerakan revivalisme, dengan membuahakan pemikiran-pemikiran berbeda atau antitesis terhadap pendapat sebelumnya. Hal ini sangat menggembirakan, akan tetapi di pihak lain, perbedaan pendapat ini sebagai warisan historis masa lalu dunia Islam.

Menelaah kurun waktu sejarah pergerakan pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia ditandai tampilnya tokoh-tokoh pemikir yang dimotori pendiri Muhammadiyah K.H.A. Dahlan sampai Lafran Pane dengan HMI-nya. Jika dikomparasikan, pemikiran kedua tokoh tersebut memiliki aksentuasi gerakan yang berbeda. K.H. Ahmad Dahlan pada awal gerakannya

Pengantar

mencanangkan kembali kepada Al Quran dan Sunnah. Usaha Ahmad Dahlan itu untuk membersihkan Islam dari praktek-praktek *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat* yang menyesatkan, dan tidak menumbuhkan semangat Islam yang senantiasa membawa pesan-pesan pembaharuan⁴⁴. Bermodalkan semangat kembali kepada Al Quran dan As Sunnah, yang memberikan roh kepada gerakannya, Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan pemikiran dalam Islam, dan pendidikan. Adapun Lafran Pane dengan HMI-nya, menekankan pada pencerahan pemikiran ideologi, politik, pendidikan, ekonomi, dan sosio kultural. Gerakan pembaharuan pemikiran Islam semakin signifikan, karena mengalami modifikasi dengan menggunakan metodologi dari penafsiran tekstual menjadi penafsiran kontekstual, untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Wacana-wacana keislaman telah menampilkan Islam secara nyata di alam modern. Wacana-wacana itu terlihat dalam pemikiran Abdurrahman Wahid dengan tema *Pribumisasi ajaran Islam*, Harun Nasution dengan *Islam Rasionalnya*, Munawar Sadzali berupa *Reaktualisasi ajaran Islam*, Nurcholish Madjid tampil dengan tema *Sekularisme ajaran Islam*, Jalaluddin Rakhmat dengan *Islam Aktual*, Muslim Abdurrahman dengan *Islam Transformatif*⁴⁵. Muncul pula Syahrin Harahap dengan *Islam Dinamis*, Alwi Syihab dengan *Islam Inklusif*, Bambang Pranowo dengan *Islam Faktual*, dan *Islam Murni* oleh Abdul Munir Mulkan. Sayyed Husein dengan *Islam Tradisinya* dan Robert D. Lee dengan *Mencari Islam Autentik*, Azyumardi Azra dengan *Islam Substantif*, dan M. Amin Abdullah dengan *Dinamika Islam Kultural*.⁴⁶

Semaraknya Islam dengan wacana modernitas, merupakan salah satu jawaban terhadap globalisasi yang memberi nuansa transparansi yang memungkinkan tingkat daya kritis umat Islam semakin tinggi. Demikian pula interaksi dialogis di antara penganut agama-agama besar dunia

⁴⁴ Lihat *Proposal Kolokium Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Panitia Kolokium Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia, PB HMI, 1996), hlm. 12.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 14.

⁴⁶ Munculnya judul-judul buku tersebut, adalah suatu manifestasi tumbuhnya kebebasan berpikir dalam Islam. Judul masing-masing buku tersebut, adalah salah satu metode untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ajaran Islam secara empiris dan kontekstual, untuk memenuhi kebutuhan kontemporer.

Pengantar

semakin terbuka. Akan tetapi harus disadari, bahwa umat Islam dan para intelektual Muslim, meminjam istilah Nurcholish Madjid, masih lebih banyak mengurus masalah “domestik”. Para intelektual Muslim belum dapat menghindar dari konflik-konflik sosial dan teologis di tingkat tertentu dengan golongan-golongan lain. Pemunculan wacana-wacana keilmuan yang bercita-cita pada usaha menampilkan atau mengakrabkan ajaran Islam dengan situasi yang selalu berubah di alam modernitas tersebut adalah suatu keharusan sejarah. Ajaran Islam yang universal dan kejayaan masa lalu, seakan-akan tidak bersahabat dengan dunia modern. Doktrinasi *tekstual - eksklusivistik* yang pernah dimiliki umat Islam masa lalu, harus diganti dengan wajah baru Islam yang *kontekstual-inklusif-integratif*, dan *pro-aktif*. Jaringan interaksi dan komunikasi, kemungkinan terjadinya perbenturan ide-ide dasar, dan sebaliknya sangat memungkinkan pula terjadinya pertemuan-pertemuan gagasan yang beragam. Akan tetapi yang ingin dilakukan dari kondisi seperti ini adalah gagasan orisinal Islam yang mengindonesia dan modern. Hasil pemikiran keislaman di Indonesia, harus berjalan paralel dengan nilai-nilai keindonesiaan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, bagaimana mereformulasi pemahaman keislaman - keindonesiaan dalam visi baru bagi bangsa Indonesia.⁴⁷

Membahas pemikiran keislaman - keindonesiaan, dilakukan dengan pendekatan *ideologis* yaitu dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman secara realistis, jauh dari sifat kaku, eksklusif, akan tetapi harus inklusif pro-aktif. Pendekatan kultural, diperlukan agar nilai-nilai yang terdapat pada berbagai kultur yang telah membudaya di Indonesia dapat diatasi dengan penuh kearifan dan kesantunan. Menurut Dawam Rahardjo pendekatan fungsional haruslah ditilik dari fungsinya sebagai pandangan hidup yang mementingkan kesejahteraan warga masyarakat. Nilai-nilai Islam harus dapat difungsikan sepenuhnya dalam sebuah bangsa, terlepas dari bentuk negara

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 5.

Pengantar

yang digunakan⁴⁸. Selain tiga pendekatan itu, umat Islam harus memiliki kesadaran historis, yaitu kesadaran bahwa semua tatanan hidup manusia ada sangkut pautnya dengan perbedaan waktu dan tempat. Ini menuntut pemahaman yang benar terhadap keluasan ajaran-ajaran Islam⁴⁹. Seperti ditulis oleh Syamsul Arifin dan Tobroni, untuk memberi pijakan yang kuat bagi kemanunggalan keislaman - keindonesiaan, pembaharuan pemikiran keislaman harus dilakukan. Pembaharuan itu dilakukan didasarkan kepada usaha umat Islam mengkonsepsikan pesan-pesan teologis umat Islam, agar ajaran Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai problem yang muncul dalam konteks perkembangan ruang dan waktu.⁵⁰

Kajian ini meninjau berbagai permasalahan dari aspek historis, sosiologis, dan politis, untuk memperoleh gambaran mengenai tahap-tahap perkembangan pemikiran HMI tentang keislaman-keindonesiaan memasuki abad ke-21, dan bagaimana relevansinya dengan kehidupan kontemporer. Sebagai subjek kajian ini akan membahas bagaimana HMI membina dan mengembangkan jati dirinya di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, memainkan peranannya baik di kalangan bangsa Indonesia maupun umat Islam.

Berhadapan dengan latar belakang yang dikemukakan, maka timbullah keinginan dan tertarik mengkaji secara serius pemikiran HMI tentang keislaman - keindonesiaan yang tersimpan dalam berbagai naskah dan dokumen secara utuh. Sebab apabila pemikiran HMI tentang keislaman - keindonesiaan HMI, berhasil diinventarisir, disistematisir, serta diinterpretasikan secara sistematis, niscaya akan didapatkan gambaran, pemahaman, dan penghayatan yang komprehensif tentang pemikiran keislaman - keindonesiaan HMI. Sebagai seorang yang menekuni bidang pemikiran Islam, penulis menganggap penting untuk mengangkat masalah ini sebagai

⁴⁸ Lihat M. Dawam Rahardjo, "Mencari Bentuk Negara yang Emansipatoris" dalam *Nuansa*, Desember, 1984, hlm. 75.

⁴⁹ Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. Ixi.

⁵⁰ Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme*, hlm. 55.

Pengantar

fokus kajian. Kepentingan bukan saja dilihat dari segi kekayaan dan keunikannya serta problematika pemikiran HMI, tetapi juga karena pemikiran organisasi kemahasiswaan seperti HMI belum memperoleh perhatian secara proporsional untuk diteliti. Dari sini timbullah ide untuk menelitinya secara serius, dan mengangkatnya sebagai karya disertasi, dengan judul :

PEMIKIRAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM TENTANG KEISLAMAN - KEINDONESIAAN 1947-1997

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan, maka seluruh telaah yang akan dikembangkan sebagai fokus kajian dalam penelitian atau pertanyaan yang hendak dijawab, tercakup dalam 6 (enam) permasalahan :

1. Bagaimana hubungan antara situasi historis, sosiologis, dan politis dengan pemikiran HMI tentang keislaman – keindonesiaan.
2. Aspek-aspek apa saja pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, dan bagaimana coraknya.
3. Bagaimana relevansi pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dengan wacana intelektual Islam, dan pemikiran keislaman - keindonesiaan HMI dengan realitas negara – bangsa Indonesia. Bagaimana pula konteks pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dengan Islam Indonesia, serta konteks pemikiran keislaman - keindonesiaan HMI ditinjau dari perspektif pemikiran Islam.
4. Bagaimana refleksi/aktualisasi corak pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dalam kurun waktu 1947-1997.
5. Bagaimana kontinuitas dan perubahan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dalam kaitannya dengan lingkungan nasional dan internasional yang juga terus berubah.

Pengantar

6. Bagaimana respon HMI sebagai anak zaman – anak bangsa menghadapi berbagai tantangan yang timbul dalam masyarakat.

C. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan dapat difokuskan kepada pokok permasalahan yang sebenarnya, perlu dijelaskan ruang lingkup penelitian dengan menetapkan batasan-batasan secara konkrit, seperti pembatasan waktu dan lokasi tempat penelitian dilaksanakan.

1. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan dari tahun 1947-1997. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan mengarah kepada aspek-aspek yang diteliti. Dalam kurun waktu lima puluh tahun, akan diteliti mengenai periodisasi perkembangan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI.

2. Pembatasan Wilayah Penelitian dan Waktu

Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi mahasiswa berlingkup nasional pertama dan tertua di Indonesia⁵¹. Karena itu penelitian tidak terbatas hanya di satu kota. Akan tetapi akan dipusatkan di pulau Jawa, khususnya di kota Jakarta dan Yogyakarta. Alasannya, karena di dua kota itu terdapat dokumen-dokumen HMI yang berkaitan dengan penelitian. Di kota itu tinggal alumni dan tokoh HMI yang akan dijadikan nara sumber. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa wawancara telah dilakukan di lima kota, yaitu di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surakarta dan Pontianak.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang masalah, batasan penelitian dan perumusan masalah yang diajukan, sudah mengimplisitkan bahwa tujuan dan kegunaan utama penelitian adalah untuk menginventarisasi konsep-konsep pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI. Pemikiran tersebut digali dari berbagai pedoman, peraturan-peraturan HMI, serta tulisan-tulisan baik berupa makalah,

⁵¹ Victor Tanja, *HMI Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1982), hlm.4.

Pengantar

buku-buku tentang HMI. Bahan-bahan itu masih bertebaran, kemudian diinterpretasikan secara sistematis, guna memperoleh gambaran yang jelas, sebagai pengetahuan yang baru mengenai pemikiran HMI, tentang keislaman – keindonesiaan. Kontribusi ilmiah yang akan dihasilkan studi ini, akan memperkaya khazanah pemikiran Islam, sebagai warisan intelektual Muslim dari masyarakat Islam Indonesia umumnya dan dari HMI khususnya. Umpan balik hasil penelitian ini berguna bagi HMI untuk memperluas dan mempertajam wawasan keislaman - keindonesiaan, yang menjadi landasan kebijaksanaan HMI. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa dengan hasil penelitian ini, HMI dapat melakukan peninjauan ulang maupun menilai kembali terhadap pemikiran HMI tentang keislaman – keindonesiaan, untuk diperbaharui, disempurnakan, dan dikembangkan secara kontekstual. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti, yang berkeinginan melakukan studi atau penelitian mengenai HMI di masa mendatang.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini terfokus pada HMI dan pemikirannya tentang keislaman – keindonesiaan. Berarti bahwa *pemikiran HMI dan keislaman – keindonesiaan* adalah kata kunci dalam penelitian ini. Karena baik *pemikiran HMI dan keislaman-keindonesiaan*, senantiasa berhubungan dengan waktu. Jadi konsep pemikiran HMI dan keislaman – keindonesiaan merupakan kerangka analisis yang dipakai dalam penelitian ini. Dalam waktu terjadi 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan dan perubahan. Perkembangan terjadi apabila berturut-turut masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran, sama dengan perkembangan. Akan tetapi asumsinya ialah adanya perkembangan besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat⁵². Maka konsep perkembangan, perubahan juga merupakan kerangka analisis yang diterapkan dalam penelitian ini.

⁵² Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Yayasan Benteng Budaya, 1995), hlm.13.

Pengantar

Selo Soemardjan mengatakan bahwa konsep perubahan sosial yang dimaksudkan untuk mencakup bermacam-macam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola tingkah lau antar kelompok dalam masyarakat⁵³. Sedang G.J. Rinier menyebut hukum perubahan telah menimbulkan suatu doktrin sosiologi yang terkenal dengan sebutan *historisme*. Doktrin ini dan dengan tuntutanannya untuk memperkirakan masa depan masyarakat ahli sejarah tidak khawatir. Untuk menjadi sadar terhadap hukum perubahan secara mendalam dan gamblang adalah berpikir secara historis. Untuk mengetahui dan merasakan hukum perubahan, adalah dengan menyadari bahwa apa yang tidak diperlukan sekarang, dan apakah yang tidak selalu ada.⁵⁴

Perubahan itu adalah keniscayaan. Perubahan itu adalah tuntutan sesuai dengan perkembangan masyarakat, yang terus menerus mengalami perubahan. Begitu juga pemikiran HMI mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan pemikiran HMI tentang keislaman – keindonesiaan, adalah sebagai respon terhadap perubahan yang ada. Jika pemikiran HMI mengalami perkembangan, maka dengan sendirinya konsep keislaman – keindonesiaan sebagai hasil pemikiran HMI juga mengalami perkembangan, dan pasang surut.

Perubahan yang terjadi di masyarakat berlangsung secara terus menerus, sesuai dengan hukum perubahan. Berbagai kondisi yang muncul mengharuskan perlunya perubahan. Kondisi-kondisi yang muncul berbeda dari keadaan sebelumnya dan sangat mendesak. Situasinya tidak bisa ditawar lagi, yang harus dilakukan perubahan mendasar seperti dalam aspek politik, sosial dan kultural, melalui transformasi sosial. Perubahan masyarakat *feodal* ke masyarakat *demokratis*. Kondisi seperti ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Masyarakat sudah mengalami perkembangan, karena tumbuh dan berkembangnya faham demokrasi. Seperti halnya juga masyarakat *agraris*

⁵³ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press, 1981), hlm. 3.

⁵⁴ Rinier, G. J., *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, diterjemahkan A. Muin Umar, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 1997), hlm.250.

Pengantar

menuju masyarakat industri. Walaupun sifat agraris masyarakat Indonesia tetap berjalan, tetapi perubahan ke masyarakat industri juga serentak harus dilakukan. Faktor ini disebabkan karena kemajuan teknologi, sebagai bagian dari masyarakat maju. Perubahan dari masyarakat *tradisional* menuju masyarakat *modern*, merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar. Menghindarinya akan menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan sehari-hari. Maka nampak di sini adanya suatu kebutuhan yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Masyarakat menghadapi problem yang memerlukan pemecahan.

Begitu juga halnya tentang munculnya pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, tidak lepas dari suatu respon untuk melakukan berbagai perubahan di lingkungan kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai perubahan yang terjadi, dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Adapun konsep perubahan sosial dapat meliputi berbagai macam perubahan di dalam lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, adat istiadat, kepercayaan, sikap, tingkah laku di dalam masyarakat.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di muka, penelitian ini memfokuskan pembahasannya pada pemikiran HMI tentang keislaman – keindonesiaan. Pemikiran tersebut meliputi waktu 50 tahun, terdiri dari berbagai aspek. Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, secara terus menerus mengalami perkembangan, sebagai respon terhadap berbagai perubahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana masalah ini pernah ditulis orang lain sebelum penelitian ini dilakukan. Kemudian akan ditinjau, apa yang ditulis, bagaimana pendekatan dan metodologi yang dipergunakan. Apakah ada persamaan dan perbedaan di antara tulisan yang ada itu dengan penulisan disertasi ini. Terakhir, dengan tinjauan pustaka ini

⁵⁵ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, (Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm.7.

Pengantar

penulis dapat menempatkan posisi dalam penulisan disertasi ini, untuk menghindari penulisan yang sama. Ada beberapa karya tulis baik berupa buku, skripsi, tesis, maupun penelitian, yang membahas tentang HMI.

1. *Fragmen Lintasan Sejarah Perjuangan HMI periode Yogyakarta, (1970)*, ditulis oleh A. Halim Mubin dari Makassar. Buku ini terdiri dari 7 bab, yang meliputi (i) situasi Umat Islam Indonesia, (ii) background sejarah berdirinya HMI, (iii) faktor-faktor obyektif yang mendorong lahirnya HMI, (iv) sekitar berdirinya HMI, (v) popularisasi, pembinaan, dan perkembangan HMI, (vi) tantangan maut, darah, dan air mata (1947-1950), (vii) pasang surut perjalanan HMI dari Yogyakarta hingga sampai ke Jakarta. Dari judulnya dan bab-babnya, dapat diketahui bahwa isinya berkisar tentang perjalanan HMI pada periode Yogyakarta sampai Pengurus Besarnya pindah ke Jakarta. Buku ini sama sekali tidak menyinggung pemikiran HMI tentang keislaman - keindonesiaan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan historis, walaupun belum semua data dan peristiwa dapat diungkapkan.⁵⁶

2. *Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966 (1989)* karya Sulastomo. Isi buku ini terdiri dari 12 butir, yang membahas berbagai masalah, sebagai pengalaman pribadi Sulastomo memimpin HMI tahun 1963-1966. Isi buku ini sangat beragam, terlihat dari butir-butir yang ditulis, lebih banyak membicarakan masalah-masalah politik, yang memang pada waktu itu HMI terlibat kuat dengan masalah-masalah politik, karena tahun 1963-1965, HMI mau dicoba dibubarkan oleh PKI. Pendekatan yang dilakukan juga pendekatan historis. Melihat isinya, buku ini tidak membahas tentang pemikiran HMI mengenai keislaman - keindonesiaan.⁵⁷

3. *HMI Menjawab Tantangan Zaman (1990)*, disunting oleh Muchriji Fauzi HA dan Ade Komaruddin Mochamad. Buku ini terdiri dari 4 bagian, **Kesatu** : perkaderan HMI dalam

⁵⁶ A. Halim Mubin, *Fragmen Lintasan Sejarah Perjuangan HMI periode Yogyakarta*, (Makassar : Penerbit Pengurus HMI BADKO Intim, 1970).

⁵⁷ Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966*, (Jakarta : Penerbit CV. Haji Mas Agung, 1989).

Pengantar

menjawab Tantangan Zaman, **kedua** :perkembangan HMI dalam menjawab tantangan zaman, **ketiga** : HMI dan Dinamika Mahasiswa, **keempat**, HMI, Islam, dan Modernisasi. Masing-masing bagian berisikan kumpulan tulisan dari berbagai kalangan sebanyak 17 orang, dari dalam maupun dari luar HMI. Salah satu tulisan membahas tentang komitmen HMI terhadap keislaman, keindonesiaan, dan kemahasiswaan, adalah karya Endang Saifudin Anshari. Mengkaji tentang komitmen HMI terhadap Islam, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan ideologis semata dan belum memasuki substansi persoalan. Pada akhir bahasannya Endang mengatakan, agar masing-masing pembaca menyimpulkan sendiri bagaimana seharusnya komitmen HMI. Berarti Endang tidak mencoba merumuskan pemikiran yang utuh tentang keislaman – keindonesiaan dan kemahasiswaan HMI. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan struktural. Dengan sendirinya konsep yang dibutuhkan tidak ditemukan dalam tulisan tersebut.⁵⁸

4. *Mencipta dan Mengabdikan Komitmen Nilai Islam untuk Masa Depan Bangsa* (1997), dengan editor Moksen Idris Sirfefa dan M. Alfian Alfian M. Buku ini juga merupakan kumpulan tulisan dari berbagai tokoh baik dari dalam maupun dari luar HMI. Isi buku terdiri dari empat bagian, (i) Kronika 50 Tahun HMI, terdiri dari 8 artikel, (ii) Dinamika Keumatan dan Kebangsaan, memuat 8 buah tulisan, (iii) Kepemudaan dan Kemahasiswaan, diisi tujuh buah tulisan, (iv) HMI dan Visi Abad 21, terdiri dari sebelas buah tulisan.

Meneliti keseluruhan isi buku, secara substansial tidak ada yang membahas secara memadai apalagi komprehensif, tentang pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, sebagaimana yang akan dibicarakan dalam disertasi ini. Isi buku sangat beragam, mulai dari *sejarah, ke-HMI-an, politik, ekonomi, dan bisnis*. Semuanya ditulis dan ditujukan kepada HMI yang sedang merayakan ulang tahun emas ke-50.⁵⁹

⁵⁸ Muchriji Fauzi H.A. dan Ade Komaruddin Mochamad (Penyunting), *HMI Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta : Penerbit P.T. Gunung Kulabu, 1990).

⁵⁹ Moksen Idris Sirfefa dan M. Alfian Alfian M., *Mencipta dan Mengabdikan Komitmen Nilai Islam Untuk Masa Depan Bangsa*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1997).

Pengantar

5. Skripsi pertama tentang HMI, ditulis Muhammad Mansur dari Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijga, Jurusan Perbandingan Agama tahun 1971. Judul Skripsi, *Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Asas dan Sikap Perjuangannya* di bawah bimbingan Dr. H. A. Mukti Ali dan Drs. H. Syamsuddin Abdullah. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) sebagai salah satu bentuk pemikiran HMI tentang keislaman, dibahas dalam skripsi ini. Pembahasannya dengan pendekatan ideologis dan sangat normatif. Aspek yang dibahas seperti (i) Dasar-dasar Kepercayaan, (ii) Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan, (iii) Pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan, (iv) Ikhtiar dan Takdir, (v) Individu dan Masyarakat, (vi) Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi, (vii) Kemanusiaan dan Ekonomi, (viii) Evaluasi Masalah Umat, (ix) Jalan Keluar.

Jika yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pemikiran HMI tentang keislaman - keindonesiaan, maka pembahasan yang dilakukan Muhammad Mansur adalah sikap independensi HMI dalam memahami ajaran Islam dalam bidang politik. Dari perbedaan tersebut, substansi pembahasan kedua tulisan itu tidak bertemu. Hal ini terjadi, karena pendekatan yang dilakukan masing-masing penulis memang berbeda.⁶⁰

6. *Modernisasi Politik di Indonesia : Suatu Kajian Mengenai Peranan Islam dan HMI MPO*, (1995). Thesis ini ditulis Rusli Karim yang dikemukakan untuk memperoleh Sarjana Sastra pada Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pembahasan thesis mencoba mencari jawaban tentang corak hubungan antara Islam dan Politik, sikap pemerintah Indonesia yang telah menghilangkan peranan agama dalam politik dan akibat yang mungkin terjadi dari sikap tersebut, terutama yang berkait erat dengan peranan HMI MPO di dalam perubahan sosial dan politik, sebagaimana nampak dalam kes penolakan oleh HMI MPO

⁶⁰ Muhammad Mansur, *Himpunan Mahasiswa Islam (HMI); Asas dan Sikap Perjuangannya* (Skripsi sarjana Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijga, Yogyakarta, 1981).

Pengantar

terhadap asas negara Pancasila, untuk menggantikan yang telah digunakan HMI sejak masa revolusi Indonesia.⁶¹

Dalam pembahasan Rusli Karim, HMI MPO justru mempersoalkan perubahan dasar HMI dari Islam menjadi Pancasila. Berarti dalam masih ada pemikiran dikotomi antara Islam dan Pancasila. HMI yang didirikan tahun 1947, justru untuk menghilangkan adanya pemikiran dikotomi antara Islam dan Pancasila. Nampak salah satu letak perbedaan pembahasan Rusli Karim dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

7. *Himpunan Mahasiswa Islam Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia* (1979). Semula buku ini adalah disertasi Victor I. Tanja, yang dipertahankannya pada Dewan Pengajar *De Hartford Seminary Foundation, Harford, Connecticut*, untuk melengkapi syarat mencapai gelar *Doctor of Philosophy (Ph.D.)*. Judul asli penelitian ini adalah *(Islamic Student's Association) : Its History and Its Place Among Muslim Reformist Movements in Indonesia*. Victor Tanja telah berupaya mengungkapkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan HMI, kegiatannya, kedudukan ideologi HMI dan kedudukannya di tengah gerakan-gerakan Muslim pembaharu di Indonesia, sikap HMI tentang pembangunan, hubungan antar agama, sekularisasi, serta persoalan-persoalan yang terkait.

Memang Victor dalam kesimpulan penelitiannya mengatakan bahwa sejarah HMI terjalin sangat sempurna dengan sejarah Indonesia modern, sehingga orang akan gagal menimbanginya secara adil jika HMI dilihat sebagai sebuah turunan belaka dari gerakan pembaharu Muslim di dunia Arab atau di anak Benua India. HMI sebagai putra Indonesia dan Muslim sejati, sejak awal telah berusaha menemukan jawabannya dengan caranya sendiri, agar dengan demikian dapat membangun identitasnya di dalam kerangka Indonesia⁶². Akan tetapi bangunan atau pemikiran

⁶¹ Muhammad Rusli Karim, *Modernisasi Politik di Indonesia Satu Kajian Mengenai Peranan Islam dan HMI MPO*, (Tesis dikemukakan untuk memperoleh ijazah Sarjana Fakultas Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia), Kuala Lumpur, 1995.

⁶² Tanja, *HMI Sejarah dan Kedudukannya*, hlm. 169.

Pengantar

identitasnya, yaitu kemanunggalan pemikiran keislaman - keindonesiaan, Victor Tanja tidak membahas secara khusus, sebagaimana akan dibahas dalam penelitian ini, yang mengandung muatan nilai filosofis.

8. *Konsep Nasionalisme HMI sebagaimana tercermin Dalam Pidato Dies dan Penerapannya Dalam Gerakan Angkatan '66*, (1994). Penelitian ini ditulis Saifullah SA., diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam. Pokok masalah yang dibahas adalah tentang bagaimana persepsi HMI mengenai nasionalisme, sebagaimana termuat dalam beberapa pidato Dies Natalis HMI dalam bentuk konseptual. Bagaimana pengejawantahannya dalam gerakan Angkatan '66 untuk memperjuangkan Orde Baru. Bagaimana pula hubungan antara Islam dan Nasionalisme.⁶³

Saifullah dalam pembahasannya melakukan pendekatan ideologis. Penelitian ini sendiri melakukan pendekatan historis. Maka sudut pandang dan jawaban terhadap masalah menjadi berbeda. Pembahasan tentang nasionalisme tidak sekaligus menggandengkannya dengan pembahasan keislaman. Karena apabila hal itu tidak dilakukan, pasti akan menemui kesulitan dan tidak akan menemukan jawaban yang proporsional. Bagi HMI masalah nasionalisme dengan keislaman, atau masalah keindonesiaan - keislaman tidak bisa dipisahkan. Jika pandangan ini tidak ditetapkan sebagai landasan berpikir, akan selalu menimbulkan dikotomi antara nasionalisme dengan keislaman, atau antara keindonesiaan - keislaman. Kerancuan ini terjadi karena peneliti mengabaikan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang pluralistik, dan sifat HMI yang independen. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran klasik, padahal yang dibutuhkan adalah konsep sesuai kebutuhan kontemporer. Masyarakat pluralistik harus didekati secara integralistik.

Tentang kesimpulan kedua yang mengatakan bahwa dalam konteks universal dan konseptual posisi Islam berada "di atas" nasionalisme, bukan "di samping" apalagi "di

⁶³ Saifullah S. A., *Konsep Nasionalisme HMI Sebagaimana Tercermin Dalam Pidato Dies dan Penerapannya Dalam Gerakan Angkatan '66*, (Penelitian Doktor Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994).

Pengantar

bawahnya”. Secara posisional Islam “mengatasi” bukan menjadi sub sistem dari sistem-sistem yang ada. Secara ideologis kesimpulan itu benar. Akan tetapi kenyataan kulturalnya tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang pluralistik, dan sifat HMI yang independen. Kesimpulan yang diambil akan menimbulkan kesenjangan yang berkepanjangan antara wawasan nasionalisme dengan wawasan keislaman. Antara kedua wawasan itu dibuat berdiri sendiri. Akan tetapi kenyataannya, antara keduanya terdapat ketergantungan dan saling mempengaruhi, dan di antaranya tidak ada dikotomi malah terdapat titik temu. Lantas bagaimana Islam dalam konteks nasional dan bagaimana nasionalisme dalam konteks Islam di negara yang majemuk dengan dasar Pancasila. Hal ini luput dari perhatian dan analisis peneliti. Memberlakukan pengetahuan masa lalu dengan situasi sekarang atau sebaliknya harus hati-hati. Apabila tidak hati-hati akan terjadi kesalahan. Letak perbedaan pembahasan yang terdapat dalam penelitian Saifullah dengan pembahasan pada penelitian ini nampak di sini. Lewat penelitian ini, mudah-mudahan kekurangan tersebut dapat diisi.

Jika dibandingkan dengan kajian-kajian di atas, dengan kajian pada disertasi ini sangat jauh berbeda. Disertasi yang ditulis ini mengkaji aspek-aspek pemikiran keislaman - keindonesiaan HMI, yang tumbuh dan berkembang sejak berdiri hingga tahun 1997, yang dalam karya-karya lain hal ini tidak ditemukan. Penelitian ini juga akan menelusuri tentang corak pemikiran keislaman - keindonesiaan HMI. Pembahasan seperti itu tidak disinggung dalam pembahasan karya-karya terdahulu. Kajian lain yang nampak pada penelitian ini adalah tentang bagaimana relevansi pemikiran keislaman dan wacana intelektual Islam, dan relevansi pemikiran keindonesiaan HMI dengan realitas negara-bangsa Indonesia. Memperhatikan fokus pembahasan karya-karya terdahulu sama sekali tidak mengungkapkan kajian tersebut. Begitu pula tentang pembahasan mengenai konteks pemikiran keislaman HMI dengan Islam di Indonesia maupun

Pengantar

konteks pemikiran keindonesiaan HMI ditinjau dari perspektif Islam, adalah salah satu pembahasan yang sama sekali tidak dibahas dalam semua kajian terdahulu.

Dari tinjauan pustaka ini, apabila ditarik kesimpulan dengan melihat perhatian pada buku-buku, skripsi, thesis, dan dua penelitian tentang HMI, penulis belum melihat adanya pembahasan khusus mengenai pemikiran HMI tentang keislaman - keindonesiaan dalam satu konsep yang terpadu, atau belum pernah terkumpul dan tertulis dalam suatu naskah yang utuh. Maka penulis mengambil obyek lain, untuk diteliti secara khusus, merupakan sesuatu yang penekanannya berbeda, baru, dan belum pernah diteliti. Jadi penelitian ini mempunyai spesifikasi tersendiri. Kiranya penelitian yang dilaksanakan ini dapat menunjukkan sesuatu yang baru serta mengisi kekurangan-kekurangan tersebut.

Terlihat dari tinjauan pustaka ini, HMI telah banyak dikaji dari berbagai dimensi. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, telah berlangsung sampai terbentuknya nasionalisme Indonesia. Revolusi Indonesia dilihat dari berbagai sudut pandangan, seperti dari sudut militer, pergerakan politik. Ada pula revolusi dilihat dari peranan kaum muda, karena revolusi itu digerakkan oleh angkatan muda, yang ditandai berdirinya Tentara Pelajar, Hizbullah, Corps Mahasiswa. HMI ikut berjuang bersama kelompok lain seperti militer, partai politik, dalam Perang Kemerdekaan. Maka posisi HMI pada setting pergerakan ketika itu adalah sebagai kaum muda intelektual. Maka dalam disertasi ini posisi HMI pun ditempatkan sebagai organisasi kaum muda intelektual dalam perspektif untuk menghadapi berbagai tantangan dan jawabannya. Suatu pergerakan tanpa peranan kaum muda dan intelektual akan mengalami hambatan. Perang mengusir penjajah, perang kemerdekaan, perang melawan PKI di Madiun 1948 berhasil karena peranan pemuda. Begitu juga perlawanan terhadap Gestapu/PKI tahun 1965, gerakan Tritura 10 Januari 1966, turunnya Surat Perintah 11 Maret 1966, bubarnya PKI 12 Maret 1966, dan turunnya Soekarno sebagai Presiden yang digantikan Presiden Soeharto 12 Maret 1967, tidak lepas karena peranan Angkatan 66,

Pengantar

gerakan mahasiswa 77/78, yang terdiri dari pemuda, pelajar, mahasiswa yang sangat besar dan menentukan. HMI sebagai organisasi pemuda, mahasiswa, yang sehari-hari akrab dan bergumul dengan pengetahuan dan teknologi yang berbasis di kampus-kampus, seluruh anggotanya adalah mahasiswa dan pemuda. Peranan setiap gerakan pemuda seperti terungkap di atas, untuk melakukan perubahan dalam masyarakat, menunjukkan posisi HMI.

Ketika menghadapi berbagai tantangan, dan jawaban yang harus diberikan, muncul kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan perlunya dilakukan perbaikan, yang tidak bisa ditawar lagi, untuk memecahkan masalah sebagai realisasi tujuan umum organisasi. Harus dilihat, apakah yang dihasilkan selama ini sudah sesuai dengan yang digariskan semula ? Atau terjadi penyesuaian ! Banyak kejadian yang muncul tidak terduga semula, baik positif maupun negatif. Negatif umpamanya, Presiden Soekarno mengusulkan supaya dibentuk Kabinet Gotong Royong dan PKI diikut sertakan, adanya program dari Gerakan Komunis Internasional untuk mengkomuniskan Indonesia, munculnya Manipol – Usdek, terjadinya PRRI/Permesta pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup, konsep Nasakom, Demokrasi Pancasila, Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai/organisasi. Yang positif, adanya sidang Konstituante untuk menentukan dasar negara. Munculnya tuntutan Islam sebagai dasar negara, berubahnya sikap pemerintah terhadap umat Islam. Yang tidak diduga itu kurang diperhatikan.

Dalam kondisi seperti itulah, kemungkinan akan terjadi penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian itu terjadi karena ada elemen-elemen yang ikut menentukan, yang muncul bukan dari *mainstream*. Keadaan seperti ini terjadi di organisasi manapun. Ketika itu HMI tidak bisa keluar dari situasi zaman. Tidak ada pilihan lain, dan harus masuk grup. Dalam situasi seperti itu terjadi kondisi keterpaksaan antara menerima dan menolak, dan antara hidup atau dibubarkan, situasi sangat dilematis. Masalah Manipol – Usdek, tuntutan Islam sebagai dasar negara, hegemoni rezim Soeharto, penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas partai/organisasi dan lain-lain. Itu semua

Pengantar

bukan hanya persoalan HMI, akan tetapi adalah persoalan seluruh bangsa Indonesia, semuanya ikut terlibat. Dalam persoalan ini tidak bisa menilai normatif – yaitu baik/buruk, akan tetapi sangat subjektif, tergantung dari perkembangan situasi.

Arus perubahan yang sedang menggelora tidak mungkin dihadapi secara frontal, apalagi hanya oleh sebuah organisasi seperti HMI. Karena itu, di sini dibutuhkan kebijaksanaan, kecakapan dan kelincahan pimpinan organisasi untuk mempergunakan strategi taktik perjuangan yang tepat. HMI, meskipun bukan menjadi tujuan, dan hanya sekedar alat, eksistensinya harus tetap dipertahankan sebagai sarana mencapai tujuan, dan tetap ikut berperan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Situasi yang terjadi saat itu berlandaskan pada sendi-sendi yang rapuh dan tidak wajar. HMI sebagai anak zaman – anak bangsa – kaum muda intelektual, harus dapat memberikan kebijaksanaan dan solusi yang terbaik, tepat, dan cepat, untuk mensikapi tuntutan situasi. Atas dasar sikap itulah HMI mengadaptir pelaksanaan perjuangan HMI secara rasional dalam menghadapi realita, dengan tetap berpegang kepada dasar/identitas maupun kepribadian HMI, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang majemuk. Itulah salah satu ciri khas HMI menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan dengan solusi yang terbaik.

Dari pembahasan dan data-data yang ada dapatlah dirumuskan suatu teori :

HMI adalah anak zaman – anak bangsa – kaum muda intelektual, akrab dan bergumul dengan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis di kampus-kampus. HMI berstatus sebagai organisasi mahasiswa, berfungsi sebagai organisasi kader, dan berperan sebagai organisasi perjuangan. Kemampuan beradaptasi, ketepatan HMI mempergunakan strategi taktik perjuangan dalam situasi yang berubah, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perjuangan HMI, merupakan kunci keberhasilan HMI untuk tetap survive.

G. Metodologi

1. Pendekatan dan Kerangka pemikiran

Penulisan disertasi ini adalah sebuah penelitian sejarah. Pendekatan yang patut dilakukan mengenai sejarah pemikiran seperti dikemukakan Taufik Abdullah, ada dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan horizontal, yang mengkaji hubungan antara berbagai cabang, sehingga kajian itu telah menampakkan ke dalam realias sosial dan pribadi, serta mendapat keterangan struktural yang bersifat internal. *Kedua*, pendekatan vertikal, yaitu bagaimanakah ajaran (ketentuan hukum dan etika) simbol serta idiom keagamaan itu berinteraksi dengan struktur realitas. Keterangan yang diperoleh itu ialah suatu keterangan dialektis⁶⁴. Tujuan penelitian dalam rangka penulisan disertasi ini akan menghasilkan satu penelitian sejarah HMI. Maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sejarah yang dipusatkan pada peristiwa-peristiwa sejarah secara berkesinambungan. Lewat pendekatan sejarah, diharapkan dapat diperoleh suatu penulisan sejarah secara kritis. Pendekatan itu akan dapat mengungkap latar belakang munculnya pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI maupun hubungan – hubungan yang terkait, dengan organisasi-organisasi Islam terdahulu, berbagai kecenderungan fenomena yang muncul serta perkembangannya sebagai organisasi yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa berfungsi sebagai organisasi kader, dan berperan sebagai organisasi perjuangan. Begitu juga melalui pendekatan ini akan dapat mengangkat persoalan-persoalan realitas sosial, budaya, politik, dan keagamaan yang mengitarinya.⁶⁵

Secara spesifik, Sartono Kartodirdjo mengemukakan :

Dengan perlengkapan metodologis baru, seperti pendekatan ilmu sosial, studi sejarah kritis memperluas daerah pengkajiannya. Terbukalah kemungkinan melakukan penyorotan aspek atau dimensi baru dari pelbagai gejala sejarah. Pada umumnya segi prosesus yang menjadi fokus perhatian sejarawan dengan pendekatan ilmu sosial, dapatlah digarap aspek

⁶⁴ Taufiq Abdullah dan Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Penerbit PT Tiara Wacana, 1991), hlm.33

⁶⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta : Penerbit PT Gramedia, 1982), hlm.41.

Pengantar

strukturalnya. Selanjutnya dipahami bahwa banyak aspek prosedural yang hanya dapat dimengerti apabila dikaitkan dengan aspek strukturalnya, bahkan dapat dikatakan pula bahwa proses hanya dapat “berjalan” dalam kerangka struktural.⁶⁶

Ibrahim Alfian, dengan mengutip Gilber J. Garraghan mengemukakan, bahwa metode penelitian sejarah atau metode sejarah, adalah seperangkat aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah, secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis.⁶⁷

Louis Gottschalk, mengemukakan :

Yang dinamakan metode sejarah di sini adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). Dengan mempergunakan metode sejarah dan historiografi yang sering dipersatukan dengan nama metode sejarah. Sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari masa lampau manusia.⁶⁸

Metode sejarah yang dipakai memuat pula sejarah sosial yaitu tentang peristiwa-peristiwa sejarah, yang menjadikan masyarakat sebagai kajian. Fakta sosial sebagai bahan kajian, seperti kemiskinan, penambahan penduduk, migrasi, urbanisasi⁶⁹ menjadi bahan kajian dalam penulisan ini. Metode sejarah juga melahirkan pendekatan dengan sejarah kebudayaan. Berkaitan dengan itu, sejarah kebudayaan mempunyai peranan penting karena hanya dengan melihat ke masa lalu, kita akan dapat membangun masa depan yang lebih baik, dengan penuh kritis. Untuk itu diperlukan rekonstruksi sejarah.⁷⁰

Selain pendekatan sejarah yang dipergunakan dalam penulisan disertasi ini, dipakai pula pendekatan *hermeneutik* atau *hermeneutika*. Secara etimologis, kata *hermeneutik*, berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti *menafsirkan*. Maka kata benda *hermeneia* secara harfiah

⁶⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : Penerbit PT Gramedia, 1992), hlm. 123.

⁶⁷ Ibrahim Alfian, “ Pengantar Metode Penelitian Sejarah” dalam *Bunga Rampai Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta : Reproduksi Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1983), hlm.14.

⁶⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah Pengantar Metode Sejarah*, diterjemahkan Nugroho Notosusanto, (Jakarta : Penerbit Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm.32.

⁶⁹ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit PT Tiara Wacana, 1994), hlm.34.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. III.

Pengantar

dapat diartikan sebagai *penafsiran* atau interpretasi⁷¹. Hermeneutik kontemporer sekurang-kurangnya dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu hermeneutik sebagai *teori*, hermeneutik sebagai *filsafat*, dan hermeneutik sebagai *kritik*. Hermeneutika yang diperbincangkan di sini adalah hermeneutik sebagai teori, yang memfokuskan pada masalah teori umum tentang interpretasi sebagai metodologi ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk ilmu-ilmu sosial. Metode *verstehen* (pemahaman) dianggap sebagai metode yang sesuai untuk mengungkapkan kembali pengalaman dan pemikiran tentang apa yang dirasakan dan dipikirkan penulis secara original.⁷²

Teori hermeneutik kata Joko Siswanto, membahas problematik bagaimana membuat suatu interpretasi serta menetapkan patokan-patokan interpretasi. Asumsi dasar teori hermeneutika adalah bahwa kita sebagai pembaca teks tidak mempunyai akses langsung kepada penulis naskah. Karena perbedaan ruang, waktu maupun kebiasaan. Penulis mengekspresikan diri dalam bahasa teks, dengan demikian ada makna subjektif. Masalahnya bagaimana membawa keluar makna subjektif sebagai ekspresi objektif kepada orang lain. Dapat disebut bahwa hermeneutik, suatu usaha untuk mengungkapkan horizon masa lalu kepada dunia kontemporer.⁷³

Pendekatan hermeneutik, bermaksud untuk menjelaskan dengan menafsirkan suatu yang relatif kabur menjadi jelas maknanya. Hermeneutik juga dipahami dari suatu keadaan yang relatif samar-samar, menuju suatu ungkapan yang konkrit, tidak menimbulkan keraguan lagi. Dari segi bahasa, mencoba mengganti bahasa asing yang tidak paham artinya kepada bahasa sendiri yang pengertiannya dapat dipahami dengan gamblang. Jika berbentuk pemikiran yang tidak jelas, digantikan menjadi pemikiran yang jelas. Kerangka pikiran seperti itu, semuanya berkaitan dengan pekerjaan tafsir-menafsirkan. Melalui pendekatan sejarah dan hermeneutik, disertasi ini akan dapat mengungkapkan di mana posisi HMI yang berstatus sebagai organisasi mahasiswa,

⁷¹ E. Sumaryono, *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999), hlm. 23.

⁷² Joko Siswanto, *Metode keilmuan Hermeneutika (Makalah)*, disampaikan pada Interskip Dosen-Dosen Filsafat Ilmu se Indonesia, di Yogyakarta tanggal 21 September 1997, hlm.4

⁷³ *Ibid.*

Pengantar

berfungsi sebagai organisasi kader berperan sebagai organisasi perjuangan, dalam pemikiran keislaman – keindonesiaan dan gerakan Islam kontemporer. Juga akan ditelusuri HMI sebagai gerakan kaum muda intelektual, serta pembaharuan pemikiran Islam yang bersifat independen.

HMI sebagai organisasi mahasiswa sekaligus sebagai organisasi pemuda, secara aspiratif dan historis HMI berkaitan erat dengan berbagai organisasi yang muncul sebelumnya. Organisasi yang dimaksud seperti SI, JIB, MIAI dan Masyumi.

Sejarah intelektual bukan saja suatu ringkasan, atau sintesa dari data demikian, tetapi biasanya juga mencoba mencari kembali dan mengerti penyebaran karya pemimpin-pemimpin kebudayaan, ide-ide mereka pada masyarakat tertentu. Sejarah intelektual mencoba mengerti hubungan antara ide demikian pada satu pihak dan lain pihak kecenderungan” (drives) dari kepentingan (interest) serta faktor-faktor non intelektual pada umumnya, dalam sosiologi perorangan dan masyarakat. Dari sudut pemikiran yang sempit, sejarah intelektual mencoba menceritakan siapa yang menghasilkannya dan bagaimana hasil intelektual dapat mendekati sesuatu dari sosiologi retrospektif, bahkan suatu sosiologi retrospektif yang umum.⁷⁴

Berkaitan dengan sejarah intelektual yang melekat pada HMI, akan dikaji tentang perkembangan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI yang saling berhubungan dengan ide-ide sebelumnya. Diharapkan penelitian ini akan dapat mengungkapkan perspektif yang luas dan dalam tentang berbagai aspek pemikiran HMI selama lima puluh tahun, maupun realitas sosial, budaya yang mengitarinya.

Pemikiran HMI yang berkembang dalam kurun waktu 50 tahun, menampakkan relevansinya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pada sisi ini akan ditelusuri bagaimana partisipasi dan peran yang diambil HMI dalam ikut membentuk kepribadian, identitas bangsa Indonesia di tengah realitas sosial budaya dengan ciri pertumbuhan, perkembangan dan kemajemukan. Atas konsep independensinya, peran HMI akan dicoba diungkapkan dalam upaya persatuan dan kesatuan nasional dari seluruh komponen bangsa, maupun latar belakang sosial budaya, politik, dan keagamaan. Pancasila sebagai konvergensi nasional dijadikan sebagai

⁷⁴ Taufiq Abdullah, Abdurrachman Surjomihardjo, (Penyunting), *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, (Jakarta : Penerbit PT Gramedia, 1985), hlm. 201.

Pengantar

platform untuk menuju integrasi nasional yang harmonis. Kemudian atas wawasan kebangsaan – keislaman HMI, melahirkan pemikiran keislaman – keindonesiaan, sebagai satu ideologi untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Anggota HMI adalah pemuda dan mahasiswa calon sarjana yang bersifat massif. Para anggota/massa tersebut menjadi perilaku dari segala macam yang ada dan timbul di HMI, baik itu perilaku, ide, konsep, dan pemikiran. Melihat kenyataan ini diperlukan pendekatan psikologis untuk mengetahui suasana kejiwaan yang mempengaruhi tingkah laku setiap ide, konsep, dan gagasan mereka.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber yang sepadan dengan objek penelitian.

Pertama, sumber primer, yaitu bahan tertulis yang diperoleh dengan melakukan riset perpustakaan. Penelitian ini mengutamakan sumber tertulis, berupa dokumen-dokumen, naskah serta sejumlah literatur yang memuat pemikiran, ide-ide, gagasan dan konsep HMI tentang keislaman - keindonesiaan. Data-data itu, lebih mengutamakan dokumen-dokumen resmi yang dibuat HMI dalam buku-buku, pedoman-pedoman, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, laporan, naskah-naskah pidato. Sumber tersebut, termasuk makalah-makalah yang disampaikan para tokoh dan alumni HMI yang secara resmi mengatas namakan organisasi, dalam media-media resmi HMI, KAHMI, atau media lainnya. Wawancara dilakukan secara informal. Tujuan wawancara adalah untuk memperkaya data maupun untuk memecahkan data apabila ada keraguan terhadap fakta yang terdapat dalam sumber tertulis. Semua bahan tertulis maupun hasil wawancara, diklasifikasikan sebagai bahan atau sumber primer.

Kedua, sumber sekunder, berupa keterangan dan informasi dari hasil-hasil penelitian yang dibuat orang lain mengenai HMI. Termasuk di dalam sumber sekunder itu adalah artikel dalam mass media yang tidak secara resmi menyatakan sebagai pembawa suara HMI.

Pengantar

Data yang berasal dari sumber sekunder hanya akan digunakan apabila data yang diperlukan tidak terdapat pada sumber primer. Untuk memelihara keabsahan dan keotentikan data yang diperoleh dari sumber-sumber sekunder akan dicocokkan atau dikonsultasikan kepada sumber primer. Sebagai penelitian yang mengutamakan penggalian data dari sumber dokumen, maka prinsip-prinsip kritik intern dan ekstern akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Lewat penelitian yang dilakukan, telah berhasil ditemukan data dari sumber primer, yaitu :

- a. Dokumen/surat-surat, sebanyak 6 buah.⁷⁵
- b. Pidato-pidato Dies Natalis HMI sejak tahun 1947-1997, sebanyak 31 buah.⁷⁶
- c. Laporan pertanggung jawaban PB HMI pada Kongres, sebanyak 14 buah.
- d. Keputusan-Keputusan Kongres HMI, berupa Rekomendasi-Rekomendasi Kongres HMI 12 buah.⁷⁷
- e. Wawancara dilakukan kepada mantan-mantan Ketua-Ketua Umum PB HMI, Pj. Ketua Umum, fungsionaris PB HMI dan aktivis-aktivis HMI, sebanyak 28 orang.
- f. Buku-buku tentang HMI yang erat kaitannya dengan obyek penelitian sebanyak 31 buah buku.
- g. Makalah-makalah dari alumni HMI maupun bukan alumni HMI, yang secara resmi disampaikan di forum resmi HMI, sebanyak 27 buah.

⁷⁵ Dokumen/surat-surat tersebut adalah : (1) Surat PB HMI tanggal 13 Oktober 1947 kepada Pengurus PPMI di Yogyakarta, (2) Anggaran Dasar HMI hasil Keputusan Kongres I HMI di Yogyakarta tanggal 30 November 1947, (3) Surat A. Dahlan Ranuwihardjo tanggal 1 Oktober 1951 kepada anggota PB HMI tentang menggiatkan HMI, (4) Laporan Pimpinan HMI Cabang Yogyakarta tahun 1951, (5) Surat A. Dahlan Ranuwihardjo tanggal 15 Juli 1953 kepada Bung Karno Presiden RI, Bung Hatta Wakil Presiden RI, dan tembusan kepada Pak Natsir Ketua Umum DPP Masyumi, Pak Sidik, Ketua Umum DPP PNI, tentang pembentukan Kabinet Poros Islam - Nasional, dan (6) Surat Mr. M.S. Mintaredja, tanggal 29 April 1964, tentang penulisan Sejarah HMI. Untuk itu lihat Agussalim Sitompul, *Historiografi HMI*, hlm. 245-277.

⁷⁶ Setelah dilakukan pelacakan naskah Pidato Dies Natalis HMI yang tidak berhasil ditemukan sebanyak 19 buah, yaitu naskah pidato Dies Natalis ke-2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 27, 32, 40, 41, 44, 46, dan ke-48.

⁷⁷ Rekomendasi Kongres HMI baru ada sejak Kongres ke-10 HMI di Palembang tahun 1971. Sebelumnya, Kongres mengeluarkan pernyataan-pernyataan: Isinya belum merupakan suatu pemikiran yang utuh.

Pengantar

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai sasaran seperti yang diharapkan maka sistematika pembahasan ini dibagi menjadi enam bab.

Bab pertama, berisikan pengantar yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi, dan sistematika pembahasan. Dimaksudkan dengan pendahuluan, agar para pembaca sudah dapat mengetahui garis besar penelitian. Bab pertama ini adalah sebagai pengantar. Adapun isi penelitian, terdapat pada bab II, III, IV, dan V. Sedangkan inti dari penelitian seluruhnya tertuang dalam bab VI, berisi kesimpulan.

Bab kedua, membahas tinjauan historik wacana HMI, yang membahas hubungan Lafran Pane dengan HMI, sebagai landasan untuk melihat lebih jauh mengenai latar belakang munculnya pemikiran keislaman – keindonesiaan dan berdirinya HMI. Pembahasan tentang hubungan Lafran Pane dengan HMI adalah untuk mengetahui posisi Lafran Pane di sekitar munculnya pemikiran keislaman – keindonesiaan dan berdirinya HMI. Hal ini penting dipahami bahwa ide lahirnya pemikiran tersebut dan berdirinya HMI datang dari Lafran Pane. Munculnya pemikiran keislaman – keindonesiaan dan berdirinya HMI, merupakan faktor penting yang harus diketahui. Karena tanpa mengetahui lebih dahulu hal ini akan menemui kendala untuk melacak lebih jauh tentang pemikiran keislaman – keindonesiaan dan berdirinya HMI. Pembahasan ini merupakan kunci pengetahuan untuk pembahasan bab-bab berikutnya. Kemudian diikuti pembahasan tentang hubungan HMI dan organisasi Islam terdahulu. Terakhir dibahas tentang dinamika HMI menghadapi berbagai tantangan.

Bab ketiga, dinamika organisasional HMI yang membahas masalah-masalah internal HMI. Dimaksudkan dengan pembahasan ini agar dapat diketahui konfigurasi HMI sebagai gambaran dinamika perjuangannya. Karena selain membahas tentang pemikiran keislaman – keindonesiaan

Pengantar

HMI, perlu pula dibahas tentang dinamika intern HMI. Dengan pembahasan ini akan terlihat kepadanan antara dinamika organisasi dengan dinamika pemikiran keislaman – keindonesiaannya.

Bab keempat, membahas tentang dialektika wacana keislaman – keindonesiaan HMI, yang membahas tentang perkembangan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI. Pembahasan berikutnya mengenai corak pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, relevansi pemikiran HMI dengan wacana intelektual Islam dan dengan realitas negara – bangsa Indonesia. Konteks pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dengan Islam di Indonesia, dan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI ditinjau dari perspektif pemikiran Islam. Pembahasan pada bab ini, merupakan inti pembahasan disertasi ini. Pada bab inilah diungkapkan tentang pengertian, perkembangan, sumber, aspek-aspek, corak, relevansi dan konteks pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI.

Pembahasan bab IV ini, mempunyai kaitan logis baik isi maupun metodologinya dengan bab III. Begitu juga dengan bab V. Tanpa pembahasan pada bab IV tidak akan diperoleh keterangan tentang perkembangan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dalam tiga hal, yaitu pengertian tentang pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, sumber-sumber pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, dan aspek-aspek pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dan substansinya. Di sini terdapat hubungan kausal satu sama lain.

Bab kelima, refleksi kritis atas gerakan dan wacana HMI, yang membahas posisi HMI di tengah gerakan Islam kontemporer serta wacana HMI dan relevansinya dengan perkembangan agama, sosial, dan politik di Indonesia.

Bab keenam, berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab VI, sebagai kesimpulan, adalah konsekuensi dari metodologi. Pengambilan kesimpulan ini harus dilakukan untuk menemukan jawaban sebagai inti dari permasalahan yang diajukan pada penelitian ini.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hubungan antara situasi *historis*, *sosiologis*, dan *politis* dengan pemikiran HMI tentang keislaman dan keindonesiaan, terletak: pada situasi *historis*, munculnya tantangan dan hambatan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, ideologi, dan agama yang dihadapkan kepada bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya. Tantangan, hambatan itu harus direspon secara konkrit dan konsepsional sesuai dengan tuntutan modernisasi dan masa depan bangsa Indonesia. Situasi *sosiologisnya*, terletak adanya kesadaran HMI, bahwa untuk melaksanakan ajaran Islam di Indonesia secara cermat dan rasional harus mempertimbangkan kondisi sosial budaya dengan ciri utamanya adalah *pertumbuhan*, *perkembangan*, dan *kemajemukan*, dengan tetap memperhatikan bahwa bangsa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Situasi *politisnya*, terletak pada tuntutan perang kemerdekaan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila. Menjadi tekad dan keyakinan HMI, bahwa hanya dalam negara yang merdeka dan berdaulat saja, harkat, martabat, dan derajat rakyat Indonesia, serta menegakkan dan melaksanakan ajaran agama Islam dapat dilakukan. Ketiga hubungan itu memunculkan pemikiran keislaman – keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yaitu :

Terintegrasinya antara pemikiran keislaman dan keindonesiaan di atas titik temu Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harmonis. Tidak terdapat lagi kesenjangan antara keislaman – keindonesiaan, antara Islam dan Pancasila, selaras dengan realitas sosial budaya bangsa Indonesia dengan ciri utama pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan. Pemikiran keislaman – keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai ideologi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Kesimpulan dan Saran

menampilkan Islam yang bercorak khas Indonesia. Pemikiran itu mampu melakukan perubahan, sesuai dengan tuntutan kontemporer menuju masyarakat adil makmur yang diridloi Allah SWT - masa depan Indonesia baru, sebagaimana dicita-citakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI merupakan antitesis terhadap gagasan Sukarno tentang penyatuan paham Nasionalisme – Islamisme – Marxisme (NASIMAR) tahun 1926, maupun terhadap konsep Nasional – Agama – Komunis (NASAKOM) tahun 1961.

Aspek-aspek pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, pada awal berdirinya HMI hanya lima aspek, yaitu aspek politik, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan agama sebagai kebutuhan jangka pendek yang mendesak. Selama lima puluh tahun, mengalami pasang surut dan perkembangan, baik *sumber-sumber*, *pengertian*, dan *aspek-aspek* pemikiran keislaman - keindonesiaan HMI serta substansinya. Penelitian berhasil mengidentifikasi 37 aspek – aspek pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dan substansinya pada tiga periode, terdiri dari : **Periode pertama, tahun 1947-1965**, sebanyak 10 aspek, terdiri 1) aspek Agama, 2) Aspek Kebudayaan, 3) Islam Sebagai Dasar Negara, 4) Komunis Bertentangan Dengan Islam, 5) Peranan Agama dalam Pembangunan, 6) Aspek Politik, 7) Aspek Ekonomi, 8) Aspek Pendidikan, 9) Generasi Muda Islam, 10) Pembinaan Demokrasi dan Pembangunan. **Periode kedua, tahun 1966-1984**, terdapat 18 aspek, yaitu 1) dasar kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, 2) pengertian dasar tentang keimanan, 3) kemerdekaan manusia (ikhtiar) dan keharusan universal (taqdir), 4) ketuhanan yang Maha Esa dan Perikemanusiaan, 5) individu dan masyarakat, 6) Keadilan sosial dan keadilan ekonomi, 7) integrasi umat, 8) keseimbangan, 9) aspek politik, 10) aspek ekonomi, 11) aspek pendidikan, 12) aspek hukum, 13) aspek kebudayaan, 14) aspek pembinaan demokrasi dan pembangunan, 15) aspek generasi muda dan kemahasiswaan, 16) tentang Pancasila, 17) tentang UU perkawinan dan Keluarga Berencana, dan 18) hubungan luar

Kesimpulan dan Saran

negeri. Adapun **Periode ketiga, tahun 1985-1997**, meliputi 9 aspek, yaitu : 1) pembaharuan pemikiran Islam, 2) modernisasi, 3) aspek politik, 4) aspek ekonomi, 5) aspek pendidikan, 6) aspek hukum, 7) aspek pembinaan demokrasi dan pembangunan 8) aspek generasi muda dan kemahasiswaan, 9) aspek kewanitaan. Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, bercorak *substantif, proaktif, inklusif, integratif, modernis, dan ilmiah*. Corak inilah yang membedakan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dengan pemikiran organisasi lain.

Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI relevan dengan wacana intelektual Islam, yang terletak pada ; banyak persamaan aspek dan coraknya, yaitu *substantif, proaktif, inklusif, integratif, modern, dan ilmiah*. Juga cirinya terdapat beberapa persamaan seperti universal, lentur, dan adaptif. Adapun relevansi pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dengan realitas negara bangsa Indonesia, tidak terdapat kesenjangan. Titik temunya yaitu Pancasila. Wujudnya, berupa saling pengertian, untuk memberi dan menerima masing-masing kelompok, golongan maupun agama. Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI adalah visi Indonesia baru, paralel dengan cita-cita negara dan bangsa Indonesia. Konteks pemikiran keislaman – keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ditinjau dari perspektif pemikiran Islam termasuk tipologi *new modernisme*, yaitu kombinasi pemikiran klasik dengan pemikiran modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan kontemporer khas Indonesia. Ijtihad memegang peranan penting. Cirinya, semangat kemajemukan keberagaman, rasa tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai agama dan moral. Konteks pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dengan Islam Indonesia, terdapat dalam kaitan sosiologis – kultural. Pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia, dengan ciri utama *pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan*, yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Kesimpulan dan Saran

Refleksi/aktualisasi corak pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dalam kurun waktu 1947-1997, **Pertama, tahun 1947-1965**. HMI memupuk dan mengembangkan jiwa nasionalisme – kebangsaan yang baru berusia dua tahun, dan memadukan dengan semangat Islam yang universal. HMI dan anggota-anggotanya menceburkan diri dalam perang kemerdekaan dan mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam konteks intelektual, HMI mempelopori dengan dinamika pembentukan kaum intelektual memproduksi sarjana/alumni HMI menjadi kelas menengah masyarakat kota, agen pembaharu, yang memiliki wawasan keislaman – keindonesiaan. Dalam setting sosiologis – historis itu, HMI adalah lapisan masyarakat yang tergolong terdepan. HMI berjuang membendung dan melawan PKI yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila. Tahun 1953, HMI mengusulkan supaya Kabinet dibentuk dengan unsur golongan Agama – Nasional, dengan poros Masyumi – Partai Nasional Indonesia (PNI). Tahun 1960-1965, HMI melawan PKI, tidak sekedar menolak konsep PKI, bahwa Pancasila hanya alat pemersatu, akan tetapi sekaligus mendukung bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa. **Kedua, tahun 1966-1984**. HMI berperan dan terlibat aktif dalam merintis, mendukung dan menegakkan Orde Baru. Bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tahun 1969 HMI berpartisipasi dalam pembangunan yang berparadigma modernisasi dan pembangunan Indonesia seutuhnya. Sejak tahun 1970, dalam gerakan Islam kontemporer HMI tampil dengan berbagai wacana sesuai dengan tuntutan zaman. Wacana kontemporer itu antara lain tertuang dalam orasi ilmiah setiap peringatan Dies Natalis HMI, Rekomendasi Kongres HMI, dalam NDP, Pidato Nurcholish Madjid 2 Januari 1970, yaitu *Keharusan Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam dan Masalah Integrasi Umat*. Pidato Dies Natalis ke-23 tahun 1970 yaitu *Menuju Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* dan lain-lain, guna melakukan pembaharuan dalam masyarakat. **Ketiga, tahun 1985-1997**. Dengan tetap memelihara sifat kritisnya yang konstruktif dan proaktif dan menghindarkan diri dan menentang sikap-sikap apriori, reaktif, dan destruktif, HMI

Kesimpulan dan Saran

menyampaikan berbagai pandangan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, agama, demokrasi, HAM, pembangunan dan lain-lain kepada pemerintah orde baru, partai politik dan GOLKAR serta masyarakat luas. HMI berpandangan bahwa perubahan dan pembaharuan mutlak dilakukan di semua sektor kehidupan, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara, sesuai dengan komitmen Orde Baru. Pada tahun 1994 sampai 1997, HMI melakukan koreksi terhadap pemerintah, atas berbagai kekurangan, kesalahan, dan penyimpangan. Kritik-kritik yang selama ini disampaikan, hanya dijawab Pemerintah dengan kalimat *verbalistik, ideologis, dan normatif*.

Kontinuitas dan perkembangan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dalam kaitannya dengan lingkungan nasional yang selalu berubah, terjadi pasang surut perkembangan yang dinamis, yang terlihat ; *pertama*, perkembangan realitas sosial politik, budaya, agama dan lain-lain baik yang positif dan negatif yang terjadi sangat cepat, *kedua* perkembangan sumber, pengertian, aspek-aspek pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI dan substansinya. Masa mendatang tiga aspek ini akan terus berkembang karena beberapa dokumen belum ditemukan. Tentang lingkungan internasional, juga terjadi pasang surut, sehingga kontinuitas perubahan pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI terjadi secara proaktif, sejalan dengan peristiwa dan perubahan yang muncul di dunia internasional, ditandai dengan maraknya perkembangan wacana keislaman di dunia Islam, serta bekembangnya penerbitan, maupun kemajuan teknologi informasi modern.

Respon HMI sebagai anak zaman – anak bangsa – kaum muda intelektual, menghadapi berbagai tantangan yang timbul dalam berbagai bentuk, sikap, dan jawabannya menjadi teori:

HMI adalah anak zaman – anak bangsa – gerakan intelektual kaum muda. Merespon berbagai masalah yang tidak bisa ditawar dan ditunda lagi harus mampu beradaptasi – lentur, dengan strategi taktik yang tepat sesuai dengan situasi, karena ada unsur yang tidak terduga baik positif maupun negatif, dan kondisi yang melemah, dengan sendi-sendi

Kesimpulan dan Saran

yang rapuh dan tidak wajar, sehingga tidak bisa keluar dari situasi zaman, yang mengharuskan adanya respon. HMI, meskipun bukan menjadi tujuan, dan hanya alat perjuangan, eksistensinya harus tetap dipertahankan sebagai sarana mencapai tujuan. HMI akan tetap berperan untuk merespon setiap tantangan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, untuk melakukan berbagai perubahan.

B. SARAN

Sejarah pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI sudah berlangsung selama usia HMI. Sebagai organisasi perjuangan yang dinamis, pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI akan terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan ruang dan waktu. Salah satu corak pemikiran HMI adalah ilmiah, artinya bahwa pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu disarankan agar pada masa-masa mendatang, untuk menyusun draft rekomendasi-rekomendasi Kongres, yang akan memuat pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, supaya Pengurus Besar HMI mengadakan penelitian terlebih dahulu ke daerah-daerah termasuk ke departemen-departemen, untuk mendapatkan masukan secara langsung dari lapangan. Hal itu perlu dilakukan, agar rekomendasi-rekomendasi Kongres itu, yang akan memuat pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI lebih berkualitas, terhindar dari hanya sekedar “*daftar keinginan belaka*”, dan tidak terjadi pengulangan materi.

Selama ini tertanam kesan, bahwa pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI itu kurang dimasyarakatkan baik di lingkungan intern terlebih-lebih ke masyarakat luas. Dari kesan itu, kalangan HMI sendiri dan masyarakat berpendapat, bahwa HMI terlalu berorientasi kepada masalah-masalah politik praktis, padahal sebenarnya tidak, walaupun itu tidak salah. HMI mempunyai pemikiran yang sangat kaya, juga memiliki pemikiran-pemikiran lain yang amat luas dan komprehensif. Melihat substansinya, bahwa pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI perlu diketahui masyarakat luas. Melihat kenyataan ini, disarankan agar PB HMI dapat

Kesimpulan dan Saran

mensosialisasikan pemikiran-pemikiran HMI secara berencana, kontinyu, dan luas dengan menerbitkan dalam bentuk buku, sehingga dapat diketahui, dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya, secara utuh dan benar. Pemikiran-pemikiran HMI sewaktu-waktu dapat dijadikan bahan evaluasi, sampai sejauh mana hasil yang telah terlaksana, maupun yang belum, sehingga dapat digariskan kebijakan yang akan ditempuh untuk masa mendatang.

Nampaknya wacana tentang HMI terus berlanjut dan meningkat. Para peneliti, sangat membutuhkan data-data tertulis berupa dokumen yang diperlukan. Nampaknya dari pergerakan dan wacana HMI selama ini, membawa umpan balik yang positif. Melihat bahwa pendokumentasian dan sejarah di HMI selama ini nampaknya sangat lemah. Maka untuk itu disarankan, agar Pengurus Besar HMI mendirikan *Laboratorium HMI* atau *Perpustakaan Nasional HMI*, yang mengoleksi semua data dan informasi tentang HMI sejak berdiri hingga yang terakhir, dikelola secara profesional. Melalui laboratorium atau perpustakaan tersebut tersebut, maka bagi setiap orang yang ingin mengadakan studi dan penelitian tentang HMI, dengan mudah dapat memperoleh informasi dan data yang akurat. Pusat Data dan Informasi (PDI) yang sudah ada, kiranya dapat ditingkatkan fungsinya secara profesional. Kemampuan dan potensi untuk itu, nampaknya cukup tersedia di HMI. Dengan adanya bahan-bahan yang terakumulasi dalam disertasi ini, maka wacana tentang pemikiran keislaman – keindonesiaan HMI, dapat dilakukan secara intensif dan efektif, sehingga berhasil dan berdaya guna bagi kepentingan perkembangan bangsa Indonesia di masa-masa seterusnya.

Alhamdulillah berkat anugerah Allah SWT berupa kesehatan, kesempatan yang Penulis peroleh penulisan disertasi ini dapat diselesaikan. Apa yang ditulis di dalam disertasi ini, menurut hemat penulis sudah memenuhi ketentuan yang ada. Semoga sumbangan pikiran ini dapat berguna dan turut memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Semoga.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

A. Primer

- Badan Koordinasi (BADKO) HMI Jawa Barat, *Metodologi Pemahaman Nilai Identitas Kader*, (Bandung, 1989)
- Danandjaja, Utomo, (ed.), *Pembaharuan Pemikiran Islam* (Jakarta : Penerbit Islamic Research Centre, 1970)
- Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, *Kepribadian HMI*, (Yogyakarta, 1964)
- Panitia Pusat Kongres Muslimin Indonesia Bagian Penerangan, *Pedoman Lengkap Kongres Muslimin Indonesia 20-25 Desember 1949*, (Yogyakarta, 1949)
- Pengurus Besar HMI, *Anggaran Dasar HMI, Hasil Keputusan Kongres I HMI di Yogyakarta tanggal 30 November 1947*, (Yogyakarta : Penerbit PB HMI, 1947)
- _____, *Hasil-Hasil Seminar Sejarah HMI di Malang tanggal 26-30 November 1975*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1975)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1963-1966 pada Kongres ke-8 HMI di Surakarta tanggal 10 s.d. 17 September 1966*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1966)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1966-1969 pada Kongres ke-9 HMI di Malang tanggal 3 s.d. 10 Mei 1969*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1969)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1969-1971 pada Kongres ke-10 HMI di Palembang tanggal 3 s.d. 10 Oktober 1971*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1971)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1971-1974 pada Kongres ke-11 HMI di Bogor tanggal 23 s.d. 30 Mei 1974*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1974)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1974-1976 pada Kongres ke-12 HMI di Semarang tanggal 10 s.d. 17 Oktober 1976*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1976)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1976-1979 pada Kongres ke-13 HMI di Ujung Pandang tanggal 5 s.d. 13 Februari 1979*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1979)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1979-1981 pada Kongres ke-14 HMI di Bandung tanggal 23 April 1 Mei 1981*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1981)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1981-1983 pada Kongres ke-15 HMI di Medan tanggal 21 s.d. 31 Mei 1983*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1983)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1983-1986 pada Kongres ke-16 HMI di Padang tanggal 24 s.d. 31 Maret 1986*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1986)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1986-1988 pada Kongres ke-17 HMI di Lhoksemauwe tanggal 24 Juni s.d. 6 Juli 1988*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1988)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1988-1990 pada Kongres ke-18 HMI di Jakarta tanggal 17 s.d. 25 September 1990*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1990)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1990-1992 pada Kongres ke-19 HMI di Pekanbaru tanggal 30 November s.d. 9 Desember 1992*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1992)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1992-1995 pada Kongres ke-20 HMI di Surabaya tanggal 21 s.d. 31 Januari 1995*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1995)
- _____, *Laporan PB HMI Periode 1995-1997 pada Kongres ke-21 HMI di Yogyakarta tanggal 20 s.d. 26 Agustus 1997*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1997)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-8 di Solo tahun 1966*, berisi a.l. AD/ART HMI, Tafsir Asas, Kepribadian HMI, GPP HMI, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1966)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-9 di Malang tahun 1969*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1969)

- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-10 di Palembang tahun 1971*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1971)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-11 di Bogor tahun 1974*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1974)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-12 di Semarang tahun 1976*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1976)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-13 di Ujung Pandang tahun 1979*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1979)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-14 di Bandung tahun 1981*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1981)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-15 di Medan tahun 1983*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1983)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-16 di Padang tahun 1986*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1986)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-17 di Lhoksemauwe tahun 1988*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1988)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-18 di Jakarta tahun 1990*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1990)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-19 di Pekanbaru tahun 1992*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1992)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-20 di Surabaya tahun 1995*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1995)
- _____, *Hasil-Hasil Keputusan Kongres HMI ke-21 di Yogyakarta tahun 1997*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1997)
- _____, *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan*, (Jakarta, 1971)
- _____, *Pedoman Perkaderan HMI (Hasil Seminar Nasional Perkaderan HMI di Pekalongan tahun 1970)*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1970)
- _____, *Pedoman Perkaderan HMI (Hasil Lokakarya Perkaderan HMI di Kaliurang tahun 1975)*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1977)
- _____, *Pedoman Perkaderan HMI (Hasil Lokakarya Perkaderan HMI di Surabaya tahun 1984)*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1984)
- _____, *Pedoman Perkaderan HMI (Hasil Sarasehan dan Lokakarya (Saloka) HMI di Surabaya tahun 1988)*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1988)
- _____, *Pedoman Perkaderan & Pedoman Lembaga Pengelola Latihan (LPL) HMI*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1988)
- _____, *Pedoman Perkaderan HMI (Hasil Lokakarya Perkaderan di Jakarta tahun 1997) dan Ketetapan Kongres ke-21 HMI di Yogyakarta*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1998)
- _____, *Dies Natalis ke Empat Puluh Tiga HMI 5 Februari 1947*, (Jakarta : 1990)
- _____, *Pandangan dan Komentar Tokoh tentang HMI Dies Natalis ke-47 HMI*, (Jakarta : 1994)
- _____, *Proposal Kolokium Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta, 1996)
- _____, *Pedoman Perkaderan HMI dan Pedoman LPL (Hasil Saloka Perkaderan HMI di Surabaya tahun 1988)* (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1988)
- _____, *Surat PB HMI Nomor : 0306/B/Sek/X/1418 tanggal 11 Februari 1998 tentang Piagam Pengabdian yang diberikan kepada Lafran Pane.*
- _____, *Keputusan Sidang PB HMI dan MPK di Ciloto tanggal 1 -5 April 1985*, (Jakarta, 1985)
- _____, *Surat PB HMI No:219/B/Sek/1958*, tanggal 26 Juni 1958, tentang Sikap HMI terhadap Komunis, yang ditandatangani Ismail Hasan Metareum dan Ibrahim Madylao masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PB HMI.

- _____, *Surat PB No.257/A/Sek/1977*, tanggal 30 Maret 1977, tentang Sikap HMI mengenai Pemilihan Umum
- Pengurus 8 Cabang HMI, *Surat Keputusan Bersama Pimpinan Cabang Nomor : 2/KPTS/DRT/A/07/1406 tanggal 15 April 1986*, tentang Penyelamatan Organisasi.
- Pelly, Usman, *Lafran Pane: Tokoh Historis Cendekiawan Nasional*, (Orasi disampaikan pada Malam Kenangan Lafran Pane, yang diselenggarakan Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara di Medan, tanggal 29 Juli 1992)
- Pusat Data dan Informasi (PDI) – PB HMI, *Buku 1 Hasil-Hasil Kongres XXI HMI di Yogyakarta tahun 1997*, (Jakarta, 1998)
- Razak, Nasruddin, dkk., *Sejarah Perjuangan HMI*, (Yogyakarta : Penerbit Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, 1966)
- Surat Edaran Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) No.1458/04/XV/58, tanggal 10 Oktober 1958 tentang Pembajakan IPPI yang dilakukan oleh PKI
- Surat M.S. Mintaredja, yang ditujukan kepada Lafran Pane, (Jakarta, 29 April 1964)
- Sitompul, Agussalim, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997)
- Sitompul, Agussalim, *Lafran Pane : Pemikir Visioner* (Orasi disampaikan pada Malam Kenangan Lafran Pane, yang diselenggarakan Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara di Medan, tanggal 29 Juli 1992)
- Tirtosudiro, Achmad, *Lafran Pane : Sosok Penggagas Besar* (Orasi disampaikan pada Malam Kenangan Lafran Pane, yang diselenggarakan Majelis Wilayah KAHMI Sumatera Utara di Medan, tanggal 29 Juli 1992)

B. Sekunder

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta : Penerbit PT. Pustaka LP3ES, 1996)
- _____, *Islam di Indonesia* (Ed.), (Jakarta : Penerbit Tintamas, 1974)
- _____, *Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi* (Ed.), (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1979).
- _____, (Pengantar), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*, (Jakarta : Penerbit Sekretariat Negara RI, 1995)
- Abdullah, Taufik dan Abdurrahman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*, (Jakarta : Penerbit Gramedia, 1985)
- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim, *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta : Penerbit PT. Tiara Wacana, 1991)
- Aidit, D.N., *Lahirnya PKI dan Perkembangannya*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Pembaharuan, 1955)
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* (Jakarta : Penerbit Gramedia, 1980).
- Ali, Fachry, *Golongan Agama dan Etika Keharusan Demokrasi dalam Islam di Indonesia*, (Surabaya : Penerbit Risalah Gusti, 1996)
- _____, (Pengantar), *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*, (Jakarta : Penerbit Majelis Nasional KAHMI, 1997)
- _____, (Pengantar), *Kemelut Demokrasi Liberal Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1993)
- Ali, Fachry dan Bachtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam di Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1992)

- Ali, A. Mukti, dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta : Penerbit PT Tiara Wacana, 1997)
- Alkostar, Artidjo, (editor), *Identitas Hukum Nasional*, (Yogyakarta : Penerbit Fakultas Hukum UII, 1997)
- Amsyari, Fuad, *Masa Depan Umat Islam Indonesia Peluang dan Tantangan*, (Bandung : Penerbit Al-Bayan, 1993)
- _____, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Gema Insani Press, 1995)
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 1999)
- Ankersmit, F.R, *Refleksi Tentang Sejarah Pendapat-Pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*, (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia, 1987)
- Anshari, M. Isa, *Tugas & Peranan Generasi Muda Islam dan Pembangunan Orde Baru*, (Jakarta : Penerbit Ruhul Islam, 1967)
- Anwar, M. Syafii, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Paramadina, 1995)
- Arifin, Syamsul, *Merambah Jalan Baru Dalam Beragama Rekonstruksi Kearifan Perennial Agama dalam Masyarakat Madani dan Pluralitas Bangsa*, (Yogyakarta : Penerbit Ittaqa Press, 2000)
- A. Steenbrink, Karel, *Metodologi Penelitian Agama Islam di Indonesia. Beberapa Petunjuk Mengenai Penelitian Naskah Melalui Sya'ir Agama dalam Bahasa Melayu dari Abad ke-19*, (Semarang : Penerbit LP3M IAIN Walisongo, 1985)
- Awwas, Irfan. S, *Menelusuri Perjalanan Jihad S.M. Kartosuwiryo*, (Yogyakarta : Penerbit Wihda Press, 1999)
- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani Gagasan, Fakta, dan Tantangan*, (Bandung : Penerbit PT Remaja Rosda Karya, 1999)
- BP 7 Pusat, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta, 1993)
- Baker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Press, 1983)
- Bakri, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1981)
- Barbara Sillars, Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dan Tradisi DII/TII*, (Jakarta : Penerbit PT. Pustaka Utama Grafiti, 1989)
- Basko Carpalo dan Dasrizal, Ed., *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Rajawali, 1986)
- _____, *Aspirasi Umat Islam*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1985)
- Batubara, Cosmas, *Wawasan Kebangsaan Melandasi Perjuangan Bangsa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Panitia 20 Tahun Orde Baru, 1986)
- Boland B.J., *Pergumulan Islam Indonesia 1945-1970*, (Jakarta : Penerbit Grafiti Press, 1985)
- Brakman, Arnold C, *Indonesia Communism a History*, (New York : Frederick A. Praeger Publisher, 1963)
- Bustami, Alex Syaukani, *Partisipasi dalam Organisasi Suatu Studi Terhadap HMI Cabang Yogyakarta*, (Skripsi Sarjana Fakultas Sospol UGM Yogyakarta, 1975)
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, Perbandingan*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1984)
- Dahlan Ranuwihardjo, *A Menuju Pejuang Paripurna Aspek Ideologi dari Islam, Menuju Terbinanya Insan Pejuang Paripurna Leadership, Strategi dan Taktik dalam Perjuangan*, (Ternate : Penerbit Majelis Wilayah KAHMI Maluku Utara, 2000)

- Daja, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam Kasus Sumatra Thawalib*, (Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, 1990)
- Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984)
- Departemen Kader PB HMI, *Sarasehan*, (Jakarta : 1980)
- Dewan Pimpinan Pusat Masyumi, *Hasil Penyelidikan Panitia Kerja Konstitusi Masyumi*, (Jakarta : tanpa tahun terbit)
- D. Ledy, Paul, *Practical Research, Planning, and Design*, (New York Mac Milan Publishing Co., tanpa tahun)
- Effendi, Djohan dan Ismet Natsir, *Pergolakan Pemikiran Islam Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1981)
- Fakhry, Majid, *Sejarah Filsafat Islam*, (Jakarta : Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya, 1987)
- Fauzi HA, Muchriji dan Ade Komaruddin Mochammad, *HMI Menjawab Tantangan Zaman* (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1996)
- Gani, M.A., *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1984)
- Genie, Meredith B.M, *Religion Social Centerest*, (Belmount, California : Wadsworth Publishing Company, 1981)
- Gonggong, Anhar, *Abdul Qahhar Mudzakkar Dari Patriot Hingga Pemberontak*, (Jakarta : Penerbit Gramedia Widiasarana, 1992)
- Gottschalk. Louis, *Mengerti Sejarah* (Terjemahan Nugroho Notosusanto) (Jakarta : Penerbit Yayasan Universitas Indonesia, 1975)
- Harahap, Boerhanoeddin, *Pilar Demokrasi*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1989)
- Harjono, Anwar dan Lukman Hakiem, *Di Sekitar Lahirnya Republik Bakti Sekolah Tinggi Islam dan Balai Muslimin Indonesia Kepada Bangsa*, (Jakarta : Penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1997)
- Haramain, A. Malik, *PMII di Simpang Jalan*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2000)
- Hatta, Muhammad, *Menuju Negara Hukum*, (Jakarta : Penerbit Idayu Press)
- _____, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta : Penerbit Mutiara, 1979)
- Herbert Feith & Lance Castles (Editor), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta : Penerbit LP3S, 1995)
- Hodgson, Marshall G.S, *The Venture of Islam Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia Masa Klasik Islam*, (Jakarta : Penerbit Paramadina, 1999)
- Ibrahim, Muhammad Nur H.I, *Himpunan Mahasiswa Islam dalam Perspektif Sejarah Indonesia (1947-1965)*; Skripsi Sarjana Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 1992)
- Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta : Penerbit PT. Tiara Wacana, 1999)
- J. Benda, Harry, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta : Penerbit Pustaka Jaya, 1980)
- Karim, M. Rusli, *Modernisasi Politik di Indonesia; Satu Kajian Mengenai Peranan Islam dan HMI MPO* (Thesis S2 Fakultas Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan University Kebangsaan Malaysia) (Kuala Lumpur, 1995)
- Kartodirjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- _____, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia, 1982)
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia, 1977)

- _____, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1993)
- Kruger, Muller, *Sejarah Gereja di Indonesia*, (Jakarta : Badan Penerbit Kristen, 1966)
- Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta : Penerbit Shalahudin Press, 1985)
- _____, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit : PT. Tiara Wacana, 1994)
- _____, *Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Yayasan Bentang Budaya, 1995)
- Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), *Agama dan Tantangan Zaman*, (Jakarta, 1985)
- Lembaga Studi Agama dan Filsafat, *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam* (Jakarta, 1989)
- Madjid, Nurcholish, *Keislaman dan Keindonesiaan Menatap Masa Depan*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina, 1986)
- _____, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan* (Bandung : Penerbit Mizan, 1988) *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kristis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta : Penerbit Yayasan Paramadina, 1992)
- _____, *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan* (Bandung : Penerbit Mizan, 1993)
- _____, *Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadina, 1995)
- _____, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Penerbit : Paramadina, 1995)
- _____, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Paramadina, 1997)
- _____, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta : Penerbit Paramadina, 1999)
- _____, *Prospek Perkembangan Intelektual Muslim* (Makalah ditulis sebagai pokok-pokok bahan diskusi dalam Seminar di Pesantren Parenduan Madura, 27 Desember 1966)
- M. Poloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, diterjemahkan Tim Penerjemah Yasogama, (Penerbit : CV. Rajawali, 1979)
- M. Saleh, Hasanuddin, *HMI dan Rekayasa Azas Tunggal Pancasila*, (Yogyakarta : Penerbit Kelompok Studi Lingkaran, 1996)
- Mansur, Muhammad, *Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ; Azas dan Sikap Perjuangannya* (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga) (Yogyakarta, 1981)
- Mas'oed, Muchtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1986)
- Meuleman, Johan Hendrik, *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme Memperbincangkan Pemikiran Mohammed Arkoum*, (Yogyakarta : Penerbit LKIS, 1996)
- Mubin, A.Halim, *Fragmen Lintasan Sejarah Perjuangan HMI Periode Yogyakarta* (Makasar : Penerbit HMI Badko Intim, 1970)
- Muhsin, Ahmad, *Perang Tipu Daya Bung Karno dengan Tokoh-Tokoh Komunis*, (Jakarta : Penerbit PT Golden Trayon Press, 1994)
- Mulyana, Agus, *Peranan HMI dalam Menghadapi Kekuatan PKI di Indonesia 1947-1966*, (Skripsi Sarjana FP IPS IKIP Bandung, 1990)
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan di Indonesia Studi Sosio-legal Atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Utama Grafiti, 1995)
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1982)
- _____, *Islam Ditinjau Dari berbagai Aspeknya* (jilid 1), (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1979)

- Nasution, Harun & Azyumardi Azra (Penyunting), *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1985)
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press, 1995)
- Noer, Deliar, *Gerakan Islam dan Moderen di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1980)
- _____, *Masalah Ulama Intelektual atau Intelektual Ulama ; Suatu Tesis Buat Generasi Muda Islam* (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1974)
- _____, *Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal* (Jakarta : Penerbit Yayasan Perkhidmatan, 1983)
- Pals, Danial, *Seven Theories of Religion*, (New York : Oxford University Press, 1996)
- Panitia Seminar Sejarah Masuknya Islam di Indonesia, *Risalah Seminar Sejarah Masuknya Islam di Indonesia*, (Medan, 1963)
- Penerbit Yayasan Pancasila Sakti, *Persepsi, Tahun V, Nomor 3 Oktober, November, Desember*, (Jakarta, 1979), *Persepsi*, Edisi khusus 20 Mei 1993, (Jakarta, 1993)
- Penerbit Lembaga Pertahanan Nasional, *Persepsi, Tahun I, Nomor 1, April, Mei, Juni 1979*, (Jakarta, 1979)
- Penerbit Mizan, *Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Bandung, 1996)
- Penerbit LP3S, *Prisma*, Nomor 4 – 1997, (Jakarta, 1997)
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Quran Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984)
- Purbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta : Penerbit Gunung Mulia, 1970)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan & Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, (Jakarta, 1975)
- P. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta : Penerbit Grafita Press, 1983)
- Qordhawi, Yusuf, *Al Quran dan As Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam. Beberapa Kaedah & Rambu dalam Memahami dan Menafsirkan*, (Jakarta : Penerbit Rabhani Press, 1997)
- Rahman, Fazrul, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung : Penerbit Pustaka, 1985)
- Raliby, Osman, *Dokumenta Historika*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1953)
- Ramly, A.M, *Agama Menentang Komunis*, (Jakarta : Penerbit Bina Rina Pariwara, 1977)
- Ranuwihardjo, A. Dahlan, *Latar Belakang Sejarah Berdirinya HMI* (makalah), (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1975)
- Rasyidi, M., *Islam dan Indonesia di Zaman Modern* (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1968)
- _____, *Islam Menentang Komunisme*, (Jakarta : Penerbit Islam Study Club Indonesia, 1965)
- _____, *Koreksi Terhadap Dr. Harun Nasution tentang : Islam ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta, 1977)
- Renier, G. J., *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 1997)
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Modern Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press, 1995)
- Rusli, D.M.B, *Islam dan Komunisme*, (Solo : Penerbit Bintang Hijau, 1955)
- Saidi, Ridwan, *Cendekiawan Islam Zaman Belanda Studi Pergerakan Intelektual JIB dan SIS ('25-'42)*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Piranti Ilmu, 1990)
- _____, *Kebangkitan Islam Era Orde Baru Studi Kepeloporan Cendekiawan Islam Sejak Zaman Belanda Sampai ICMI*, (Jakarta : Penerbit LSIP, 1993)

- _____, *Islam dan Nasionalisme Indonesia Mengungkap Dokumen Sangat Eksklusif 1920 s.d 1950-an tentang pemikiran pemimpin Islam mengenai masalah kebangsaan*, (Jakarta : Penerbit LSIP, 1995)
- _____, *Menggugat Gerakan Pembaharuan Keagamaan Debat Besar "Pembaharuan Islam*, (Jakarta : Penerbit LSIP, 1995)
- _____, (Editor), *Biografi, Pemikiran, dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo Sosok Pejuang Muslim Nasionalis dan Pendidik Kader-Kader HMI*, (Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995)
- Saifullah SA, *Konsep Nasionalisme HMI Sebagaimana Tercermin Dalam Pidato Dies, dan Penerapannya Dalam Gerakan Angkatan '66* (Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah), (Jakarta, 1994)
- Santoso, Agus Edi, *Tidak Ada Negara Islam Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid – Mohammad Roem*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, 1997)
- Sekretariat Negara RI, *Gerakan 30 September – Pemberontakan Komunis di Indonesia*, (Jakarta, 1994)
- Sidin, A.D, *Fitnah – Infiltrasi Kudeta – Teror Gestapu PKI dari Masa ke Masa*, (Medan : Penerbit Firma Haris, 1966)
- Sinjal, Daud, *Laporan Kepada Bangsa Militer Akademi Yogyakarta*, (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Kotabaru Jakarta, 1966)
- Siradj, A. Zacky, (Penyunting), *Kenangan 70 Tahun Achmad Tirtosudiro Profil Prajurit Pengabdian* (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1992)
- Sitompul, Agusssalim, *Himpunan Mahasiswa Islam dan Pembangunan* (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga), (Yogyakarta, 1976)
- _____, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, (Surabaya, : Penerbit Bina Ilmu, 1976)
- _____, *HMI Dalam Pandangan Seorang Pendeta*, (Jakarta : Penerbit Gunung Agung, 1982)
- _____, *Citra HMI*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1986)
- _____, *Kapita Selekta Aktivitas dan Pemikiran HMI*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1990)
- _____, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam 1947-1993*, (Jakarta : Penerbit Intermasa, 1991)
- _____, (editor), *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, (Yogyakarta : Penerbit Balai Pengabdian Pada Masyarakat P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1993)
- _____, (editor) *Korps HMI-Wati dalam Sejarah 1966-1994*, (Jakarta : diterbitkan Kohati PB HMI, 1995)
- _____, (Editor) *HMI Mengayuh di Antara Cita dan Kritik*, (Yogyakarta : Penerbit Aditya Media, 1997)
- Smith, W.C, *Islam Dalam Sejarah Modern*, (Jakarta : Penerbit Bharatara, 1964)
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi Vol.1*, (Jakarta : Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963)
- _____, *Negara Nasional dan Cita-Cita Islam*, (Jakarta : Penerbit Pusat Data Indikator, 1999)
- Sudarwo, Imam, Padmosugondo, *Lima Undang-Undang Bidang Pembangunan Politik* (dilengkapi dengan Pembahasan RUU-nya), (Jakarta : Penerbit Koperasi Pegawai Negeri BP-7 Pusat, 1985)
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 1999)
- Sujangi, (Penyunting), *Kajian Agama dan Masyarakat. 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990*, (Jakarta : Penerbit Departemen Agama RI, 1991-1992)
- Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966*, (Jakarta : Penerbit C.V. Haji Masagung, 1989)

- Sumardi, Mulyanto, (penyusun), *Penelitian Masalah Agama dan Pemikiran*, (Jakarta : Penerbit Sinar harapan, 1982)
- Sumaryono, E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999)
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1996)
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila*, Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya, (Yogyakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi UII, 1982)
- Supardi, dkk, *Setengah Abad UII Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit UII Press, 1993)
- Suryobroto, Sumadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Press, 1983)
- Syafii Maarif, Ahmad, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Bandung : Penerbit Mizan)
- _____, *Potret Perkembangan Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Penerbit Salahuddin Press, 1983)
- _____, *Islam Kenapa Tidak!*, (Yogyakarta : Penerbit Shalahuddin Press, 1984)
- _____, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta : Penerbit PT. Pustaka LP3ES, 1996)
- _____, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta : Penerbit LP3ES), 1996)
- _____, *Komunisme Indonesia : Sebuah Sinopsis Historis*, (Yogyakarta : Panitia Seminar Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Eksponen Angkatan '66 Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial UGM Yogyakarta, 1996)
- Syari'ati, Ali, *Man and Islam*, diterjemahkan oleh M. Amien Rais, berjudul Tugas Cendekiawan Muslim, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafiika Persada, 1994)
- Stensilan Papringan, *Ketetapan SU MPRS IV- Juni 1966 & SI MPRS Maret 1967*, (Yogyakarta, 1967)
- Surachmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Riset Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung : Penerbit Tarsito, 1972)
- Tanja, Victor, *HMI Sejarah dan Kedudukannya di Tengah-Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia* (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1982)
- _____, *Pluralisme Agama dan Problema Sosial Diskursus Teologi Tentang Isu-Isu Kontemporer*, (Jakarta : Penerbit PT Pustaka CIDESINDO, 1998)
- Thalib N dan Haris Fajar, *Pembaharuan Paham Islam di Indonesia Dialog Bung Karno-A.Hasan* (Yogyakarta : Penerbit Sumber Ilmu, 1985)
- Thomas F.O., Dea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, (Yogyakarta : Penerbit Yayasan Solidaritas Gadjah Mada, bekerjasama dengan Rajawali Press, Jakarta, Terjemahan Tim Penerjemah YASOGAMA, 1987)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1993)
- Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Universitas Gadjah Mada, *Panduan Akademik Universitas Gadjah Mada 1996*, (Yogyakarta, 1996)
- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik* (Yogyakarta : Penerbit PT. SIPRESS, 1994)
- Umar, A.Muin, dkk, *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia Dalam Sorotan* (Ed.) (Yogyakarta : Penerbit Dua Dimensi, 1985)
- Wach, Joachim, *Sociology of Religion* (Chicago and London : Penerbit The University of Chicago Press, 1971)
- Woodward, Mark R., *Jalan Baru Islam Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1998)

- Yunus, Machmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Mutiara Sumber Widya, 1993)
- Zubaidi, M.Natsir, dkk., (editor), *Pak Timur Menggores Sejarah – PII menyiapkan kader Umat dan Bangsa*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1997)

C. Makalah

- Ali, Fachry, *Agenda Pembaruan Pemikiran Islam dan Tantangan Bangsa di Masa Depan*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- Anwar, M. Syafi'i, *Agenda Pembaruan Pemikiran Islam dan Tantangan Bangsa di Masa Depan*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- Azra, Azyumardi, *Peta Sosio – Historis Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia : Dari Awal Masuknya Islam Sampai Awal Abad 20*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- Biro Penerangan KAMI Pusat, *Sampai Dimana Peranan Presiden Soekarno dalam Gestapu/PKI*, (Jakarta, 1967)
- Effendy, Bachtiar, *Peta Sosio – Historis Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- _____, *Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia : Mempertimbangkan Pemikiran Nurcholish Madjid*, (Jakarta, 1995)
- Effendi, Djohan, *Visi Indonesia Memasuki Milenium Ketiga Perspektif Agama, Politik, dan Negara*, (Jakarta : Majelis Nasional KAHMI, 1999)
- Hikam, Muhammad A.S., *Membangun Masyarakat Sipil di Indonesia dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- Madjid, Nurcholish, *Kontribusi Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan dalam Pembentuk Masyarakat yang Dicitakan*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- _____, *Integritas Kader Muslim Cendekia, Manifestasi dan Peran Historisnya dalam Konteks Indonesia Modern*, (Jakarta : PB HMI, 1992)
- _____, *Misi HMI dalam Tantangan Perjuangan Pro-aktif yang Terus Meningkat*, (Jakarta : PB HMI, 1995)
- _____, *Kultur Politik Orde Baru Ketegangan antara Kultur Pesisir dan Kultur Pedalaman*, (Jakarta : Kerja Sama Paramadina dan Media Indonesia, 1996)
- _____, *Prospek Perkembangan Intelektual Muslim di Indonesia*, (Ditulis sebagai Pokok-Pokok Bahan Diskusi dalam Seminar di Pesantren Parenduan, Madura 27 Desember 1996, Jakarta : 1996)
- Maarif, A. Syafii, *Agenda Pembaruan Pemikiran Islam dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- Majelis Wilayah Jawa Timur, *Visi Indonesia Memasuki Milenium Ketiga Perspektif Kepemimpinan Nasional*, (Jakarta : Majelis Nasional KAHMI, 1999)
- Majelis Wilayah Jawa Barat, *Visi Indonesia Memasuki Milenium Ketiga Perspektif Sosial Politik*, (Jakarta : Majelis Nasional KAHMI, 1999)
- Mas'udi, Masdar F., *Memperkuat Gagasan Keadilan Sosial dan Ekonomi dalam Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- Muhajir, Noeng, *Islam Ideologi Transformasi* (Yogyakarta : Panitia LK II HMI Cabang Yogyakarta, 1996)

- Pelly, Usman dkk., *Visi Indonesia Memasuki Milenium Ketiga Perspektif Agama, Politik, dan Negara*, (Jakarta : Majelis Nasional KAHMI, 1996)
- Rahman, Budhy - Munawar, *Pemikiran Pembaharuan Islam di Indonesia : Quo Vadis ?*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- Tanja, Victor I., *Refleksi Kritis Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta : Panitia Kolokium Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia PB HMI, 1996)
- Tanjung, Akbar, *Visi Indonesia Memasuki Milenium Ketiga, Perspektif Kepemimpinan Nasional*, (Jakarta : Majelis Nasional KAHMI, 1999)

D. Majalah, Jurnal, dan Surat Kabar

1. Majalah

- Majalah Gema Islam No.11 Th. I*, tanggal 1 Juli 1962
- Majalah Gema Islam Th. II*, 1964
- Majalah Suara Muhammadiyah No.16*, Agustus 1968

2. Jurnal

- Dewan Pimpinan Pusat Masyumi Bagian Penerangan, *Maklumat No.1*, (Jakarta, 1960)
- Al-Jamiah No. 31*, (Yogyakarta : Penerbit IAIN Sunan Kalijaga, 1984)
- Lembaga Pertahanan Nasional. *Persepsi, Edisi Khusus 20 Mei 1993*, (Jakarta, 1993)
- Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) dan ICMI, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran No.1 Vol. IV Th. 1993*
- LP3ES, *Jurnal Prisma No.4*, April 1984, (Jakarta, 1984)
- _____, *Jurnal Prisma No.5 Th.XVII*, (Jakarta, 1988)
- Pengurus Besar HMI, *Jurnal Madani Vol.2 No.4*, (Jakarta, 1999)
- Yayasan Wakaf Paramadina, *Seri KKA, No.07 Th.I*, (Jakarta, 1987)

3. Surat Kabar

- Harian API*, Jakarta, tanggal 31 Oktober 1965
- Harian Berita Yudha*, Jakarta, tanggal 14 September 1965
- Harian Indonesia Raya*, Jakarta, No.65 Th.VIII, tanggal 5 Maret 1957
- Harian Kompas*, Jakarta, tanggal 26 September 1985
- Harian Pedoman*, Jakarta, tanggal 18 Agustus 1960
- Harian Pelita*, Jakarta, tanggal 22 Oktober 1981
- Harian Republika*, Jakarta, tanggal 6 Mei 1967
- Harian Suara Islam*, Jakarta, tanggal 14 September 1965
- Mingguan Anti Komunis*, Jakarta, No.4 Th. I, tanggal 9 Februari 1958
- Mingguan Anti Komunis*, Jakarta, No.5 Th. I, tanggal 16 Februari 1958
- Mingguan Anti Komunis*, Jakarta, No.8.Th.I, tanggal 9 Maret 1958

Daftar Riwayat Hidup

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Drs. H. Agussalim Sitompul
2. Tempat dan tanggal lahir : Tapanuli Utara, 12 Desember 1944
3. Alamat Asal : Jl. Padangsidempuan no. 4
Sipirok, Tapanuli Selatan 22742
Telp (0634) 41102
4. Alamat di Yogyakarta : Perumahan IAIN Blok E 1
Yogyakarta 55281
Telp (0274) 519720
5. Pekerjaan : Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta,
6. Alamat kantor : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281
Telp (0274) 512156
7. Isteri : Irmasari Harahap
8. Anak : 1) Salmandrajat Sitompul
2) Rahmat Al Fajar Sitompul
3) Ardi Junaidi Sitompul
4) Lutfi Rafiudin Sitompul
5) Zulfahmi Sitompul
6) Helvizar Muhammad Imansyah Sitompul
9. Pendidikan :
 - a. Sekolah Rakyat Negeri (SRN) No.8 Padangsidempuan, tamat tahun 1956
 - b. Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) Muhammadiyah di Padangsidempuan, tamat tahun 1960.
 - c. Pendidikan Guru Agama Atas (PGAA) Muhammadiyah Kauman Yogyakarta, tamat tahun 1962.
 - d. Sekolah Persiapan IAIN Yogyakarta, tamat tahun 1963.
 - e. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Ilmu Perbandingan Agama, tamat tahun 1976.
 - f. Studi Purna Sarjana (SPS) dosen-dosen IAIN seluruh Indonesia, Departemen Agama, Yogyakarta, 10 Agustus 1981- 27 April 1982.
 - g. Program Pascasarjana Doktor Bebas Terkendali (DBT) tahun 1996, sekarang dalam proses penyelesaian.

B. LATIHAN DAN PENATARAN

1. Penataran P-4 tingkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (tipe A), tahun 1980.
2. Penataran Penelitian Sosial, kerjasama YIIS dan IAIN Semarang tahun 1981.
3. Penataran Penelitian secara Grounded Lembaga Research IAIN Yogyakarta dan PPSK UGM, Yogyakarta, tahun 1981.
4. Penataran Pengawasan Melekat (Waskat), Yogyakarta tahun 1989.
5. Penataran DPL KKN se-DIY dan Jawa Tengah, LPPM UGM, Yogyakarta, tahun 1989.
6. Penataran Petugas Bimbingan dan Konseling Islami, UII Yogyakarta tahun 1990.
7. Penataran Kewaspadaan Nasional (Tarpadnas), Departemen Agama dan Lemhanas, Jakarta, tahun 1993.

8. Penataran P-4 Tingkat Nasional Calon Penatar Bagi Ormas, BP-7 Pusat, Jakarta tahun 1995.
9. Executive Management Workshop Entitled, Departemen Agama dan ICIHED, Yogyakarta tahun 1996.
10. Penataran Calon Penatar P-4, BP-7 DIY, Yogyakarta tahun 1996.
11. Penataran dan Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN), kerjasama Pusat P2KKN LPM – UGM dengan Forum Komunikasi KKN Jateng – DIY (Pemakalah), Yogyakarta tahun 1997.

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Cabang Padangsidempuan, tahun 1956 - 1960.
2. Anggota Muhammadiyah sejak tahun 1961, NBM : 162.221
3. Kepala Regu Pandu Hizbul Wathon (HW), Pasukan HM Farya, Padangsidempuan I, tahun 1956-1960.
4. Anggota Pelajar Islam Indonesia (PII) Kotamadya Yogyakarta, tahun 1961 sampai sekarang.
5. Sekretaris HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin tahun 1964-1965.
6. Sekretaris Umum HMI KORKOM IAIN tahun 1965-1966.
7. Ketua Umum HMI KORKOM IAIN Sunan Kalijaga tahun 1965-1966.
8. Sekretaris DEPERTIM HMI Cabang Yogyakarta tahun 1965-1966.
9. Sekretaris HMI Cabang Yogyakarta tahun 1966-1967.
10. Ketua Umum Keluarga Abituren Pendidikan Guru Agama Atas Muhammadiyah (KAPGAM) Yogyakarta periode 1967 sampai sekarang.
11. Deputi Ekstern HMI Cabang Yogyakarta tahun 1967-1968.
12. Ketua HMI Cabang Yogyakarta tahun 1968-1969.
13. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (IMATAPSEL) Cabang Yogyakarta periode 1968-1969.
14. Ketua Presidium Generasi Muda Islam (GEMUIS) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1968-1969.
15. Sekretaris Umum Kekeluargaan Tapanuli Siala Sampagul (KTSS) Yogyakarta periode 1977-1979, dan 1979-1990.
16. Sekretaris Partai Muslimin Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1969-1971.
17. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Gendeng tahun 1977-1990.
18. Sekretaris Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Majelis Hikmah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1979-1985.
19. Anggota Golongan Karya (NPAG : 11030016393), sejak 1987.
20. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gondokusuman tahun 1979-1985.
21. Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kotamadya Yogyakarta tahun 1985-1990.
22. Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Majelis Pustaka Kotamadya Yogyakarta tahun 1985-1990.
23. Ketua KAHMI Majelis Wilayah DIY, periode 1990-1995, dan periode 1995-2001.

D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. NIP :150 169 820
2. Pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda, Lektor Kepala IV/c

3. Tahun 1983-1989 : Sekretaris Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) IAIN Sunan Kalijaga.
4. Tahun 1989-1993 : Kepala Balai Pengabdian Pada Masyarakat P3M IAIN Sunan Kalijaga.
5. Tahun 1993-1996 : Pembantu Dekan II Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga.

E. KARYA TULIS, PENELITIAN, DAN SEMINAR

1. Karya tulis

- 1) *HMI dan Pembangunan* (Skripsi) tahun 1976.
- 2) *Sejarah Perjuangan HMI* (TH. 1947-1975), Penerbit Bina Ilmu Surabaya, tahun 1976.
- 3) *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Agama Islam*, Penerbit Dinamika, Yogyakarta, tahun 1980.
- 4) *HMI dalam Pandangan Seorang Pendeta, Antara Impian dan Kenyataan*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta, tahun 1982.
- 5) *Manusia dan Agama*, Penerbit Dinamika, Yogyakarta, tahun 1984.
- 6) *Jejak Langkah, Cita dan Pemikiran Dr.K.H.E.Z. Muttaqien*, Penerbit Integrita Press Jakarta, tahun 1985.
- 7) *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan IAIN*, Penerbit LPPM IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 1986.
- 8) *Pengertian Agama Ditinjau dari Berbagai Segi*, Penerbit Sumbangsih Offset, Yogyakarta, tahun 1987.
- 9) *Pandangan Islam terhadap Teologi Kerukunan*, Penerbit Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 1987.
- 10) *Kapita Selekta Aktivitas dan Pemikiran HMI*, Penerbit Sumbangsih Offset, Yogyakarta, tahun 1990.
- 11) *Kode Etik dan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Penerbit LPPM IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 1991.
- 12) *Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat*, Penerbit Balai Pengabdian Pada Masyarakat P3M IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 1993.
- 13) *Historiografi HMI tahun 1947-1993*, Penerbit Intermedia Jakarta, tahun 1995.
- 14) *KOHATI dalam Sejarah 1966-1994* (editor), Penerbit KOHATI PB HMI, Jakarta, tahun 1995.
- 15) *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Penerbit Aditya Media Yogyakarta, tahun 1997 (cetakan pertama tahun 1986).
- 16) *Citra HMI*, Penerbit Aditya Media Yogyakarta, tahun 1997 (cetakan pertama 1986).
- 17) *HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik* (editor), Penerbit Aditya Media Yogyakarta, tahun 1997.

2. Penelitian

- 1) *Partisipasi Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat Sapen Yogyakarta*. Penelitian diadakan dengan Koordinasi Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, November 1981.
- 2) *Penghayatan dan Pengamalan Keagamaan oleh Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum di Yogyakarta*. Penelitian diadakan dengan koordinasi Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, Maret 1984.

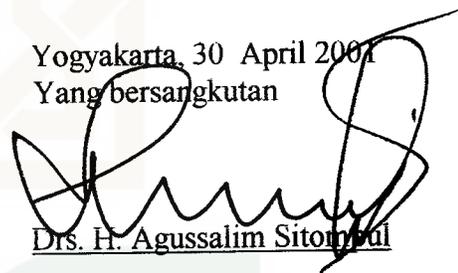
- 3) *Dampak Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Sunan Kalijaga Bagi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman (Ditinjau dari Aspek, Sosial dan Budaya)*. Penelitian diadakan dengan koordinasi Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juni 1990.
- 4) *Interaksi Muhammadiyah dengan Kekuatan Sosial Politik dan Sosial Budaya Tahun 1950-1965*. Penelitian diadakan tahun 1991.
- 5) *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 1947-1993*. Penelitian diadakan dengan koordinasi Balai Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Juli 1993. Sudah dicetak oleh Penerbit INTERMASA, Jakarta, 1995.
- 6) *Dra. Hj. Chadijah Nasution, Biografi dan karya-karyanya*. Penelitian Individual di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga TA 1995/1996.
- 7) *Pertumbuhan dan Perkembangan Fakultas Ushuluddin IAIN seluruh Indonesia*. Penelitian kolektif Dosen-Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta TA 1995/1996.
- 8) *Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)*. Penelitian individual di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga TA 1998/1999.
- 9) *Relevansi Antara Pemikiran Keislaman dan Keindonesiaan HMI (Suatu Tinjauan Historis dan Sosiologis)*. Penelitian Individual, Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga TA 1999/2000.
- 10) *Sejarah Islam Indonesia Pembahasan Tentang Teori-Teori Masuknya Islam ke Indonesia*. Penelitian Individual di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Anggaran 2000/2001

3. Seminar

- 1) Seminar Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam, IAIN Yogyakarta tahun 1985.
- 2) Simposium Citra Religius Kampus, Unissula Semarang tahun 1985.
- 3) Seminar Nasional Pendidikan Seumur Hidup, UII Yogyakarta tahun 1987.
- 4) Seminar Disiplin Nasional dan Pembangunan Nasional, Universitas Tamansiswa Yogyakarta, tahun 1988.
- 5) Seminar Ilmu Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, IAIN Yogyakarta tahun 1988.
- 6) Seminar Hukum Islam dan Pembangunan Hukum Nasional, Fakultas Syariah IAIN Yogyakarta tahun 1989.
- 7) Seminar Nasional Peningkatan Mutu Penanggulangan Cacat Mental, FNUKPC Yogyakarta tahun 1990.
- 8) Lokakarya Metodologi Penelitian Agama (Pemakalah) P3M IAIN Yogyakarta tahun 1990.
- 9) Lokakarya Peningkatan Kualitas Pengabdian Pada Masyarakat IKIP Yogyakarta tahun 1990.
- 10) Lokakarya Peningkatan Kualitas & Keterampilan Mubaligh (Pemakalah) Balai Pengabdian Pada Masyarakat P3M IAIN Yogyakarta. tahun 1990.
- 11) Seminar Hasil-Hasil Penelitian (Pemakalah) IAIN Yogyakarta tahun 1990.
- 12) Lokakarya Pengelolaan Program Pengabdian Pada Masyarakat (Pemakalah) Direktorat Bimbingan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, Jakarta tahun 1992.
- 13) Lokakarya Pengembangan Pola Dasar Pengabdian Pada Masyarakat IAIN (Pemakalah) Balai Pengabdian Pada Masyarakat P3M IAIN Yogyakarta, tahun 1992.
- 14) Penataran Pengabdian Pada Masyarakat (Pemakalah) UII Yogyakarta tahun 1992.
- 15) Sarasehan Nasional Ketua-Ketua Kelembagaan Pengabdian Pada Masyarakat, UNDIP Semarang, tahun 1992.
- 16) Seminar Desa Bina (Pemakalah) Fakultas Dakwah IAIN Yogyakarta tahun 1993.

- 17) Lokakarya Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat (Pemakalah) Balai Pengabdian Pada Masyarakat P3M IAIN Suka Yogyakarta tahun 1992.
- 18) Seminar Evaluasi Pelaksanaan KKN (Pemakalah) Balai Pengabdian Pada Masyarakat P3M IAIN Yogyakarta tahun 1993.
- 19) Seminar Nasional IPTEK tahun 1993, KORPRI DIY, Yogyakarta tahun 1993.
- 20) Lokakarya Evaluasi dan Pengembangan Silabi Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta tahun 1993.
- 21) Sarasehan Metode Penelitian Filsafat PA-TH, Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta tahun 1995.
- 22) Sarasehan Pengembangan Kurikulum Fakultas Ushuluddin Yogyakarta tahun 1995.
- 23) Sarasehan Pengembangan Inti MKDK Fakultas Ushuluddin Yogyakarta tahun 1995.
- 24) Seminar Pola & Pelaksanaan KKP, KKL, dan PPL Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta tahun 1995.
- 25) Seminar Internasional tentang : Agama-Agama Perkembangan Kontemporer, Depag RI, Ujung Pandang tahun 1996.
- 26) Seminar dan Lokakarya (Semiloka) tentang Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat (Pemakalah) Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Yogyakarta tahun 1999.
- 27) Workshop Koordinasi Pembinaan Jurusan dan Lembaga-Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin (Pemakalah), Fakultas Ushuluddin IAIN Yogyakarta tahun 1999.
- 28) Seminar dan Lokakarya (Semiloka) tentang Metodologi Pengabdian Pada Masyarakat (Pemakalah) Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Yogyakarta tahun 2000.

Yogyakarta, 30 April 2001
Yang bersangkutan



Drs. H. Agussalim Sitomul

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1

Tarombo atau Silsilah Lafran Pane Yang dimulai dari Raja Gulingan Pane Di Pangurabaan Sipirok Tapanuli Selatan¹

1. **Raja Gulingan Pane**² punya anak 6 orang :
 - 1) Ugari, 2) Naek, 3) Guru Pamutung, 4) Hima, 5) Mompar, 6) Sopola.Guru Pamutung punya anak 3 orang :
3. 1) Lokkotan, 2) Ramba, 3) Sopadan.
Sopadan punya anak 2 orang :
4. 1) Manobok, 2) Somorot
Manobok punya anak 4 orang :
5. 1) Mangaraja Pamutung, 2) Baginda Manohan, 3) H. Kodir, 4) Faian
Mangaraja Pamutung punya 3 orang anak :
6. 1) Enda, 2) Pandapotan, 3) MR Panongano
Enda punya anak 1 orang :
7. Sutan Panehobaan, yang terkenal dengan **Sutan Pangurabaan**³
Suran Pangurabaan punya anak 8 orang :
8. 1. Ny. Tarip, 2) Sanusi Pane, 3) Armen Pane, 4) Ny. Bahari Siagian, 5) Ny. Ali Nafiah, 6) **Lafran Pane**⁴, 7) Nilakusuma, 8) Krisnamurti
Lafran Pane punya anak 3 orang :
9. 1) Dr. Toga Fakhruddin Pane (alm.), 2) Ir. Muhammad Iqbal Pane (Jakarta), 3) Dra. Teti Sari Rahmiati (perempuan, Jakarta)
Dr. Toga Fakhruddin Pane punya anak 2 orang :
10. 1) **Tofani Arief Budiman** (Yogyakarta), 2) Emeria Dewi Paramaita (perempuan, Yogyakarta)
Ir. Muhammad Iqbal Pane punya anak 4 orang semuanya perempuan.
Dra. Teti Sari Rakhmiati Pane punya anak 2 orang, semuanya perempuan⁵

¹ Sewaktu masih di Porsea (Tapanuli Utara) marga Pane ini disebut Sitorus Pane sebagai cikal bakal dari marga Pane dan yang tinggal di Porsea 14 keturunan.

² Raja Gulingan pindah ke Pangurabaan Sipirok dan memakai marga Pane saja.

³ Sumber : Yayasan Pendidikan Jenderal Timur Pane, sekretariat Perguruan Gajah Mada, Jl. Durian no. 19 Medan, Tarombo (silsilah) marga Pane (Medan : 1965), hlm. 22.

⁴ Silsilah marga Pane sejak dari Raja Gulingan Pane hingga **Lafran Pane**, Lafran Pane adalah keturunan yang ke-8.

⁵ Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI (Th. 1947-1975)*, (Surabaya : Penerbit Bina Ilmu 1976), hlm. 157.

KEPUTUSAN
SIDANG MAJELIS PEKERJA KONGRES (MPK)
KE II HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
Nomor : 1/KPTS/MPK-2/07/1945
Tentang
PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI AZAS ORGANISASI
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

- MENIMBANG** : Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi HMI mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridloi Allah Subhanahuwata'ala di atas negara kesatuan Republik Indonesia maka perlu menetapkan Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila sebagai Azas Organisasi HMI untuk dikukuhkan dalam Kongres ke-16 Himpunan Mahasiswa Islam.
- MENGINGAT** : Pasal 4, 5 dan 11 AD HMI
Pasal 43 dan 45 ART HMI
- MEMPERHATIKAN** : Hasil pembahasan rumusan Komisi I tentang penyempurnaan ke-Organisasian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga HMI, yang diajukan PB HMI pada Sidang MPK II HMI di Ciloto Jabar tanggal 3-4 April 1985, bertepatan tanggal 11-12 Rajab 1405 H.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Menerima Draf Komisi I (organisasi) tentang Pancasila sebagai Azas Organisasi selanjutnya diusulkan untuk dikukuhkan pada Kongres ke-16 HMI.
2. Mengusulkan kepada Pengurus Besar HMI untuk menyiapkan memori penjelasan tentang butir 1 (satu) di atas, sebagai satu kesatuan dengan memperhatikan pikiran-pikiran yang berkembang di dalam persidangan Majelis Pekerja Kongres II HMI.

WABILLAHITTAUFIQ WAL HIDAYAH

Ditetapkan di : Ciloto
Pada tanggal : 12 Rajab 1405 H
04 April 1985 M
Waktu : Pukul 12.00 WIB

PIMPINAN SIDANG
MAJELIS PEKERJA KONGRES II
HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

dto

dto

dto

Dr. ABIDINSYAH SIREGAR
BADKO HMI SUMBAGUT

DRS. ZUARLIS SALEH
ANGGOTA MPK

Ir. DIDIK J. RACHBINI
PENGURUS BESAR HMI

Lampiran 3

**MEMORI PENJELASAN
TENTANG
PANCASILA SEBAGAI AZAS HMI**

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, yang beriman kepada Allah (al-Qur'an 3 : 110).

Pancasila yang terdiri dari nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sesungguhnya merupakan rumusan final dari suatu proses kesejahteraan yang panjang, dimana faktor-faktor dinamis sejarah yang telah memberikan sumbangan besar dan menentukan terhadap keutuhan Pancasila.

Faktor-faktor tersebut adalah keterlibatan terus menerus dari Pada nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dan sebagainya dalam proses pengisian jiwa dan semangatnya. Kenyataan ini telah memberikan kekuatan yang fungsional sebagai konsensus nasional, yakni menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadikan daya perekat ke-bhinekaan dan sekaligus sebagai daya ikat ke-ikaan.

Lebih jauh lagi menjamin keberatan dan kesempatan faktor-faktor di atas dalam memberikan yang terbaik bagi kebersamaan bangsa, bernegara serta bermasyarakat.

Ke-bhinekaan merupakan bukti sejarah, bahwa wilayah Nusantara kaya dengan kreatifitas kelompok, dan sesungguhnya kreatifitas itu bersumber dari nilai keagamaan, karena nilai keagamaanlah yang berisi dan menyahuti secara totalitas proses kehidupan dan tingkah laku kemanusiaan kepada siapa ia harus berbuat dan kepada siapa kelak mempertanggung jawabkannya. Sementara ke-Ikaan, bermakna sebagai rumusan kebersamaan nasional yang telah melalui proses interaksi nilai-nilai yang ada di dalam, dan dianut masyarakat dalam rangka menyahuti kepentingan bersama yang tentunya kebahagiaan bersama pula.

Karena itu hubungan antara ke-bhinekaan dan ke-ikaan merupakan dua muka dari satu mata uang. Ke-bhinnekaan akan lumpuh tanpa Ke-Ikaan, dan Ke-Ikaan akan beku tanpa Ke-bhinekaan. Harmonisasi Ke-bhinekaan dan Ke-Ikaan sesungguhnya merupakan jiwa dan semangat Pancasila. Dan Pancasila yang sedemikianlah yang pantas untuk dimasyarakatkan diperjuangkan dan dipertahankan.

Kenyataan inilah yang telah mengilhami para pendiri negara ini pada masa-masa getir era penjajahan hingga dinyatakan pada saat proklamasi 1945.

Konsekwensi logisnya adalah bahwa ukuran-ukuran normatif kehidupan berbangsa dan bernegara bersumber pada ke lima nilai Pancasila yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 45.

Diantara untaian sejarah inilah HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) lahir tepatnya pada tanggal 5 Februari 1947 untuk mengambil bagian tegas melakukan upaya peningkatan kemaslahatan bangsa dan sekaligus sebagai upaya peningkatan dan Pengembangan syi'ar Islam. Dalam hal peningkatan kemaslahatan bangsa, itu bermakna dan merupakan jaminan HMI terhadap cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan tekad peningkatan dan pengembangan Syi'ar Islam bermakna sebagai tanggung jawab untuk menghadirkan Islam dan Umat Islam secara fungsional dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian kehadiran Islam dan Umat Islam dalam kehidupan bangsa, bernegara, dan bermasyarakat adalah mutlak, dan keberadaannya jelas, tegas dan harus dipercayai.

Diatas keyakinan dan kehormatan yang demikianlah, sejarah bangsa Indonesia telah mencatat betapa HMI senantiasa berada di barisan terdepan pengawalan bangsa dan pengamana-

nan/penyelamatan Pancasila, kenyataan ini disebabkan adanya ketersambungan moral antara Pancasila sebagai dasar negara dengan HMI sebagai penang-gungjawab penyelenggaraannya dan pemasyarakatannya, hingga kesadaran itu pulalah yang akhirnya mewarnai HMI dan membentengi dirinya dalam komitmen bersama yang kemudian dinyatakan secara konstitusional, dan terpelihara semangatnya dalam pembukaan/ Muqaddimah Anggaran Dasar HMI sejak Kongres X HMI di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971.

Orientasi kegiatan HMI bertujuan untuk terbinanya suatu komunitas intelektual Moslem, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.

Komunitas yang sedemikian merupakan jawaban betapa HMI sadar sesadar-sadarnya bahwa Islam merupakan keyakinan dan cara terbaik memberikan yang terbaik dalam tugas rahmatan Lil 'alamin bagi bangsa, negara dan masyarakat. Karena itulah HMI berkeyakinan bahwa Islam dan Pancasila tidak akan bertentangan, selama ia di dudukkan pada fungsi dan latar kesejarahannya. Bahkan dari sana kita menemukan suatu kenyataan bahwa Pancasila semakin kaya, kokoh, utuh dan dinamis manakala ia merujuk pada sumber nilai dan norma Islam. Itu berarti Pancasila aman dalam pengakuan Islam.

Bagi HMI, Islam sekaligus merupakan sumber tata nilai dan tata laku juga ukuran normatif. Identitas ini sangat penting, khususnya mempertahankan tingkat dinamika sosial yang sehat dan kreatif. Ini merupakan hal yang mutlak untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Setiap upaya yang dapat menghilangkan (eliminasi) identitas kelompok masyarakat, justru akan memberikan peluang suburnya kemunafikan sistem sosial, yang lebih jauh menimbulkan dis-orientasi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, itu berarti pengingkaran terhadap Bhineka Tunggal Ika.

Sebaliknya kelompok masyarakat harus mampu memberikan jaminan yang tegas terhadap upaya pemasyarakatan Pancasila. Ketegasan yang demikian bagi HMI dapat diukur dari berbagai perannya dalam kehidupan berorganisasi. Pertama, sebagai Umat Islam ia mampu secara terus menerus memberikan yang terbaik dengan menjamin nafas kreatifitas yang fitri. Kedua, sebagai mahasiswa ia menjamin fungsionalisasi Pancasila dalam suasana yang rasional dan realistis. Ketiga, sebagai anggota masyarakat, ia berperan untuk pengamalannya dalam semangat keteladanan, dan keempat, sebagai generasi muda bangsa, ia senantiasa sebagai pelopor pemasyarakatan Pancasila yang sekaligus pula sebagai sosial kontrol/kritis terhadap setiap upaya penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang bertentangan dengan semangat kelahirannya pada tahun 1945. Tidak ada bahagian peran yang tidak diambil/melibatkan HMI, bahkan tidak pernah meninggalkan satupun cacat sejarah yang dapat dan pernah melukai bangsa dan negara ini.

Untuk semua harapan di atas HMI mampu dan ikhlas memberikan yang terbaik pada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia. Dan dengan begitu ia hadir sebagai umat yang terbaik yang lahir dan memberikan yang terbaik bagi setiap manusia tanpa kecuali, dengan mengajak kepada siapa saja kepada kebaikan dan menjauhi segala keburukan serta beriman (berpegang) kepada Allah SWT.

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA PIMPINAN HMI CABANG

NOMOR : 2/KPTS/DRT/A/07/1406

t e n t a n g

P E N Y E L A M A T A N O R G A N I S A S I

MENIMBANG

1. Bahwa insan cita HMI sebagaimana terumuskan dalam Anggaran Dasar HMI pasal 5, yakni terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil-makmur yang diridhai Allah SWT hanya termungkinkan tercapai manakala suasana dialogis dalam proses perkaderan dan suasana demokratis dalam proses pengambilan keputusan.
2. Bahwa suasana dialogis dan suasana demokratis tersebut dalam realitas historis HMI demikian dijunjung tinggi sehingga setiap masalah pelik apapun dihadapi dan diatasi dengan sebaik-baiknya dan konstitusional.
3. Bahwa lebih-kurang setahun terakhir ini, suasana dialogis dan suasana demokratis ini telah sirna dalam tubuh HMI oleh perilaku PB HMI yang dalam menyelesaikan masalah selalu melakukan pendekatan kekuasaan dengan mengabaikan konstitusi HMI.
4. Bahwa akibat perilaku PB HMI tersebut telah mengakibatkan kehidupan organisasi porak-poranda, perpecahan antara Cabang dengan cabang, Cabang dengan Komisariat, Komisariat dengan Komisariat, bahkan antara anggota dengan anggota serta anggota dengan pimpinan.
5. Bahwa kenyataan-kenyataan di atas telah membahayakan eksistensi HMI dan oleh karenanya perlu penyelamatan organisasi.

MENGINGAT

1. Mukaddimah Anggaran Dasar HMI
2. Anggaran Dasar HMI pasal 3, 9, dan 14
3. Anggaran Rumah Tangga pasal 13 dan 14
4. Hasil-hasil Keputusan lainnya dari Kongres HMI ke-15 di Medan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Ketetapan Pimpinan HMI Cabang di lingkungan BADKO Jawa Bahagian Tengah Nomor: Ist/KTP/A/04/1406 tentang sikap HMI Cabang di lingkungan HMI BADKO Jawa Bahagian Tengah - terhadap permasalahan yang berkembang di HMI BADKO Jawa Bahagian Tengah.
2. Surat HMI Cabang Jakarta Nomor: 083/KPTS/A/Sek/05/1406 tertanggal 12 Jumadil Awal 1406 H bertepatan 23 Januari 1986 M tentang Pemecatan Saudara Harry Azhar Azis dari keanggotaan HMI Cabang Jakarta dan HMI pada umumnya.
3. Surat Pernyataan Bersama Aparat HMI di lingkungan HMI Cabang Jakarta Nomor: 307/A/Sek/5/1406 tertanggal 18 Jumadil Awal 1406/29 Januari 1986 M tentang MOSI TIDAK PERCAYA kepada PENGURUS BESAR HMI.
4. Surat Pernyataan Pimpinan HMI Komisariat di lingkungan HMI Cabang Yogyakarta atas sikap dan perilaku PB HMI terhadap HMI Cabang Yogyakarta.
5. Surat Pernyataan Anggota HMI di lingkungan - HMI Cabang Yogyakarta kepada PB HMI yang berjudul "MEMDOBRAK TOTALITERISME PB HMI".
6. Surat HMI Cabang Yogyakarta Nomor: 319/A/Sek/05/1406 tertanggal 22 Jumadil Awal 1406 H / 2 Februari 1986 M tentang Pernyataan Dukungan Sikap terhadap policy HMI Cabang JAYA dan Koordinator MPK dalam upaya penyelamatan isi dan tubuh organisasi.
7. Surat HMI Cabang Bandung Nomor: 054/A/Sek/5/1406 tertanggal 27 Jumadil Awal 1406 H/7 Februari 1986 M tentang Pernyataan Dukungan Sikap yang diambil Koordinator MPK dalam rangka Penyelamatan Isi dan Tubuh organisasi.
8. Surat HMI Cabang Bandung nomor: 055/A/Sek/5/1406 H tertanggal 28 Jumadil Ula 1406 H/8 Februari 1986 M tentang tanggapan terhadap Sikap PB HMI dalam pengambilalihan HMI Cabang Jakarta.
9. Surat Pengurus HMI Cabang Tanjung Karang tentang ketidakjelasan Surat-Surat Peringatan - Keras PB HMI terhadap Aparat2 HMI Cabang.

10. Hasil Pleno Pengurus HMI BADKO SUMBAGSEL yang disampaikan dalam forum Pleno III dan Sidang MPK II di Gadag, Ciawi, Bogor.
11. Penetapan Pengurus HMI Cabang Ujung Pandang di luar KONPERCA XX HMI Cabang Ujung Pandang.
12. Surat Instruksi- Surat Instruksi PB HMI lewat telegram yang isinya kabur bagi Cabang Cabang dan lebih bernada ancaman.
13. Janji-janji PB HMI untuk menyelesaikan masalah yang berkembang yang tidak pernah ditepati di antaranya pertemuan Pimpinan Cabang .
14. Hasil pengamatan Sahar L. Hassan selaku koordinator MPK yang dituangkan dalam bentuk 'laporan' dengan judul: SELAMATKAN HMI DARI KEBRUTALAN.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
1. Tidak mengakui Kepemimpinan PB HMI di bawah Saudara Harry Azhar Azis dan Saudara Burhanuddin Mas'ud, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan untuk selanjutnya menetapkan/menunjuk Majelis Penyelamat Organisasi sebagai Badan Sementara untuk mengatasi kevakuman kepemimpinan HMI secara nasional sehingga terbentuknya PB HMI yang baru secara definitif (daftar nama terlampir).
 2. Menghimbau kepada Cabang-Cabang HMI di seluruh Indonesia agar tidak mengikuti Kongres XVI yang diselenggarakan oleh PB HMI di Padang pada akhir bulan Maret 1986 yang akan datang.
 3. Mendesak kepada Majelis Penyelamat Organisasi agar secepatnya menyelenggarakan Kongres XVI dengan menghadirkan Cabang-Cabang HMI di seluruh Indonesia .
 4. Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 5. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya hingga terbentuknya Kepomimpinan HMI yang bersih dan sehat serta menjunjung tinggi suasana dialogis dan demokratis.

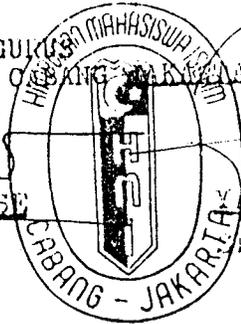
Ditotupkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Rajab 1406 H
15 Maret 1986 M

PIMPINAN HMI CABANG

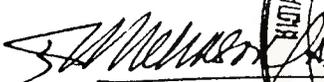
PENGURUS
HMI CABANG JAKARTA


M.S. KAABAN, SE
KETUA UMUM.




ANDRISMAN
SEKRETARIS UMUM.

PENGURUS
HMI CABANG YOGYAKARTA

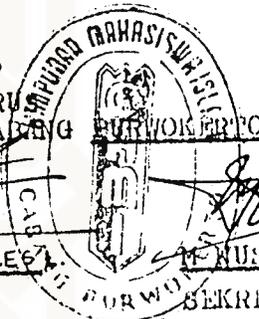

MOHAMMAD CHAERUDIN
KETUA UMUM.

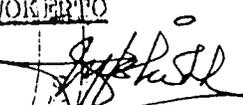



ABDUL KASRI
SEKRETARIS UMUM.

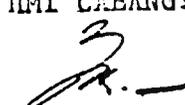
PENGURUS
HMI CABANG BOJONEGARA

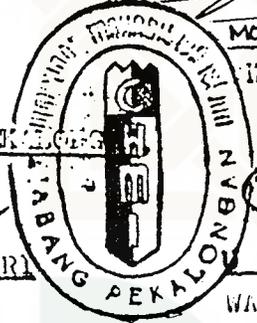

MOHAMMAD KAFFLES
KETUA UMUM.




AGUSKI ZETKA
SEKRETARIS UMUM

PENGURUS
HMI CABANG PEKALONGAN


SYAMSUL BACHRI
KETUA UMUM.




S.A.M.A.H
WAKIL SEKUM.

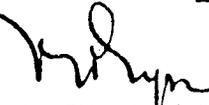
PENGURUS
HMI CABANG BALEKAMPONG

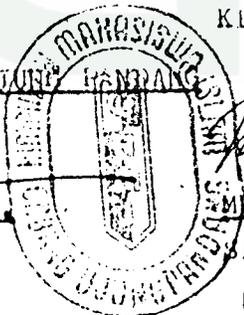

ABDUL CHOLIQ WAJAYA
KETUA UMUM.




YUSUF BACHTIAR
SEKRETARIS UMUM

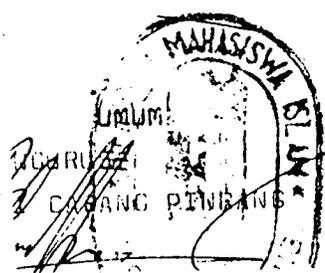
PENGURUS
HMI CABANG WANGUN


YASIN ARDY
KETUA UMUM.

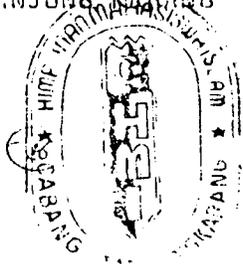


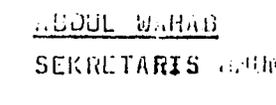

MILJUR MAHAI
SEKRETARIS UMUM.

PENGURUS
HMI CABANG TANJUNGPINANG




NURDIN BONE
KETUA UMUM




ABDUL WAHAB
SEKRETARIS UMUM

SUSUNAN ANGGOTA
MAJELIS PENYELAMAT ORGANISASI (MPO)

1. 3/1/1974
MOHAMMAD CHABERON AR
KETUM HMI CAB. YOGYA
2. [Signature]
MOHAMMAD SYABBANI
SEKRETARIS HMI CAB. YOGYA
3. [Signature]
JULIANTO SIREGAR
STAF KETUA HMI YOGYA
4. [Signature]
ABDUL CHOLIQ WIDJAYA
KETUM HMI CAB. BANDUNG
5. [Signature]
M. KAABAN, SE
KETUM HMI CAB. JAYA
6. [Signature]
YANDRISMAN
SEKUM HMI CAB. JAYA
7. [Signature]
EGGI SUDJANA, SH
STAF KETUA HMI JAYA
8. [Signature]
HASSANUDDIN
STAF KETUA HMI U. PADANG
9. [Signature]
ENDANG MUKHLIS
STAF KETUA HMI. PWT.
10. [Signature]
M. HUSNI ZETKHA
SEKUM HMI CAB. PWT.
11. [Signature]
JAUHARI DANY
BENDUM HMI CAB. METRO
12. [Signature]
ZULHARDI FAUZI
STAF KETUA HMI. BANDUNG.
13. [Signature]
M. JALALUDDIN
STAF HMI CAB. PEKALONGAN
14. [Signature]
MURDIN BONG
KETUM HMI CAB. T). KARANG
15. [Signature]
ARIFIN
16. [Signature]
M. MURHADI CH
SEKRETARIS HMI CAB. JAYA
17. [Signature]
HAYUMI
STAF KETUA HMI METRO
18. [Signature]
AHMAD SURYADI
SEKRETARIS HMI. PWT.

NOTE :

Anggota Majelis dari Cabang-Cabang lain yang belum tercantum akan menyusul.

1. ABDUL CHOLIH HIDAYAT
Ketua HMI Cab. Jkr

2. MURWICHO
Ketua HMI Cab Purwokerto.

3. [Signature]
LPL HIB PWA

4. ISKANDAR
Ketua Korkom Univ. Jayabaya jkt

5. [Signature]
SEKUM L. DAI - Cab. Jkr

6. [Signature]
Ketua AMIT
GERDUM UISD
KORCOM

7. [Signature]
Ketua Korkom HMI Cab. Solo

8. [Signature]
Ketua Korkom IKIP - JKT.

9. ENIT PURNAMAWATI
SEKUM KORCOM JAYA

10. [Signature]
Ketua Korkom ASISI - JKT.

11. [Signature]
SEKUM APARAT CAB. JKT.

12. [Signature]
Sekretaris HMI CAB Jkt

13. ACHMAD HERRY
BIAF KETUA HMI JAYA

14. ABDUL KASRI
Sekretaris Umum HMI Cab. Yogyakarta.

15. TUFON MARDATUN
(KETUA KEM CAB. YOGYAKARTA)

16. [Signature]
SEKUM KORKOM ABM XK.

17. FERRY DONAN
(Ketua Korkom HMI Cab. Yogyakarta)

18. [Signature]
Ketua Korkom HMI Cab. Yogyakarta

MAJELIS PENYELAMAT ORGANISASI

EGGI SUDJANA, S.H.

Ketua

Lampiran 5

Tanda Penghargaan

PANGLIMA DAERAH MILITER XVII/TJENDERAWASIH
KETUA MUSPIDA PROPINSI IRIAN BARAT

solaku

KETUA PROJEK PELAKSANA DAERAH

Dengan memandjatkan pudja sjukur kehadiran Tuhan Jang Maha Kuasa, serta berkat taufik dan hidajatNja, menjatakan penghargaan dan utjapan terima kasih jang se-besar²nja, kepada:

M Siradjuddin Jacub
Sekertaris **UMUM**
H.M.I Kabang Djajapura
- Sekertaris I front
Ummat Islam Irian Barat
- Memenangkan Pepera

atas semua kerdja sama dan sumbangsih dalam penjelenggaraan PEPERA, sehingga mentjapai hasil jang sesuai dengan pengharapan seluruh Bangsa dan Negara Republik Indonesia jang berwilajah dari SABANG sampal MERAUKE.

Semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan karunlaNja kepada kita sekalian.

DJAJAPURA : 17 AGUSTUS 1969.

KETUA,



SARWO EDHIE WIBOWO

Brigadir Djenderal TNI

XI

Lampiran 6 :

Data Berbagai Peristiwa yang Terjadi Pada Saat HMI Memasuki Fase Konsolidasi dan Pengembangan Organisasi selama 13 Tahun (1950-1963)

Seperti 1) tanggal 3 April 1950 Ketua Umum DPP Masyumi Mohammad Natsir mengajukan "mosi integral"¹, 2) setelah PKI hancur akibat pengkhianatan Madiun 18 September 1948, tanggal 7 Januari 1951 CC PKI yang baru terbentuk dan memilih sebanyak 5 orang Politbiro partai yang baru², 3) tanggal 6 April 1952, NU menyatakan keluar dari Masyumi³, 4) tanggal 30 Oktober 1952, Presiden mengemukakan gagasannya tentang *Demokrasi Terpimpin*⁴, 5) tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakkar memproklamasikan *Negara Islam Indonesia* dan *Tentara Islam Indonesia* di Sulawesi Selatan⁵, 6) tanggal 30 Agustus 1953, berdiri *Liga Muslimin*, yang diprakarsai Partai NU, PSII, Perti serta beberapa organisasi Islam lainnya⁶, 7) Di Aceh pun terjadi pergolakan yang sama, yang diikuti dengan proklamasi *Negara Islam Indonesia* (NII) dan *Tentara Islam Indonesia* (TII) tanggal 19 September 1953 oleh Daud Beureueh⁷, 8) PKI menetapkan pola perjuangan Partai yang baru, yang dicetuskan tahun 1954⁸, 9) pelaksanaan Pemilihan Umum I tanggal 29 September 1955, dan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante, tanggal 15 Desember 1955 berlangsung demokratis⁹, 10) Tanggal 28 Agustus s.d. 12 September 1956,

¹ Mosi integral disampaikan kepada Sidang Dewan Perwakilan RIS, yang mengusulkan agar Indonesia kembali ke negara kesatuan seperti sebelum RIS yang dibentuk 27 Desember 1949. Tanggal 19 Mei 1950, mosi Natsir tersebut disepakati antara RIS dan RI. Maka 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kedua diproklamkan dengan memakai UUDS 1950. Lantas Ibukota RI kembali dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta. Di Gedung Agung Yogyakarta, tanggal 17 Agustus 1950 pejabat Presiden RI Mr. M. Assaad, menyerahkan jabatannya kepada Presiden RI, Ir. Sukarno.

² Akibat peristiwa Madiun, para pimpinan PKI banyak yang lari ke luar negeri termasuk Aidit. Bulan Juli 1950 Aidit kembali ke Indonesia dan membentuk kembali CC PKI. Lima orang anggota Politbiro itu adalah *DN Aidit, Lukman, Nyoto, Sudisman, dan Alimin*.

³ Karena harapan NU untuk menduduki jabatan Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo-Prawoto Mangkusasmito mewakili Masyumi tidak terpenuhi, maka di samping persoalan-persoalan lain, sejak 6 April 1952 NU menyatakan keluar dari Masyumi dan menjadi Partai Politik. Keputusan itu disahkan dalam Muktamar NU ke-19 di Palembang tanggal 26 April - 1 Mei 1952. Dan keluarnya NU dari Masyumi itulah oleh Nurcholish Madjid disebut "*malapetaka perpecahan Partai*". Lihat Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*, hlm. 20.

⁴ Sebenarnya gagasan *Demokrasi Terpimpin* sudah muncul tahun 1952, walaupun pelaksanaan konkretnya terlihat sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak Proklamasi 17 Agustus sampai Dekrit 5 Juli 1959, Indonesia menganut *Demokrasi Liberal*.

⁵ Lihat Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot Hingga Pemberontak* (Jakarta : Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 108

⁶ Setelah keluarnya NU dari Masyumi perpecahan di kalangan umat Islam semakin parah. Masyumi yang ditinggalkan PSII dan NU. Masyumi sendiri tidak mau bergabung karena Liga Muslimin jauh lebih longgar dari Masyumi yang unitaris itu (paling tidak sewaktu didirikan).

⁷ Lihat P. Van Dijk, *Darul Islam sebuah Pemberontakan*, (Jakarta:Penerbit Grafiti Pers,1983),hlm. 288

⁸ Sebagai usaha untuk membangun kembali PKI, D.N Aidit mengajukan konsep *Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan*, yang terkenal dengan MKTBP, 1) perjuangan gerilya kaum tani di desa (lewat BTI) , 2) perjuangan revolusioner kaum buruh di kota (lewat SOBSI), 3) bergerak di kalangan ABRI (Biro Khusus). MKTB itulah yang terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, dan berhasil sampai meletusnya Gestapu /PKI tahun 1965.

⁹ Pemilihan Umum I tersebut, menampilkan 4 Partai besar yang mendapatkan perolehan suara anggota DPR, yaitu Masyumi 57 kursi, PNI 57 kursi, NU 45 kursi, dan PKI 39 kursi. Tentu perimbangan itu tergambar juga pada hasil Pemilu untuk Konstituante.

Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke Uni Sovyet¹⁰, 11) Mitos *Dwi Tunggal* Soekarno-Hatta pecah, dengan mundurnya Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI tanggal 1 Desember 1956¹¹, 12) sejak 1 November 1956, Konstituante hasil Pemilihan Umum 15 Desember 1955, mulai bersidang di Bandung¹², 13) pertengahan bulan November 1956 tiga organisasi mahasiswa lokal yaitu *Consenterasi Mahasiswa Yogyakarta* (CMY), *Consenterasi Mahasiswa Bandung* (CMB), dan *Consenterasi Mahasiswa Indonesia Bogor* (CMIB) berfusi menjadi *Consenterasi Gerakan Mahasiswa Indonesia* (CGMI)¹³, 14) di penghujung tahun 1956, muncul pergolakan daerah, tanggal 20 Desember 1956, berdirinya *Dewan Banteng* di Padang tanggal 20 Desember 1956, *Dewan Gajah* muncul di Medan tanggal 22 Desember 1956¹⁴, 15) sebagai kelanjutan dari kebijaksanaan politik Soekarno terhadap PKI, tanggal 21 Februari 1957, Presiden Sukarno mengumumkan konsepsinya¹⁵, 16) sebagai kelanjutan dari pergolakan daerah, tanggal 2 Maret 1957, diumumkan Perjuangan Semesta (PERMESTA)¹⁶, 17) dengan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1957, dinyatakan Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya atau SOB¹⁷, 18) Dewan Garuda diumumkan di Sumatera Selatan¹⁸, 19) tanggal 14 Maret 1957, dibentuk Kabinet Karya dengan Perdana Menteri Ir. H. Juanda¹⁹, 20) di Palembang tanggal 8 s.d. 12 September 1957, dilangsungkan Mukhtar Alim Ulama seluruh Indonesia²⁰, 21) di Moskow tanggal 19 November 1957, dikeluarkan *Manifest Moskow*²¹, 22) tanggal 15 Februari 1958,

¹⁰ Lihat *Kunjungan Presiden Republik Indonesia Soekarno ke Sovyet Uni*, (Moskow : Penerbit Seni Lukis Negeri, 1956), tanpa nomer halaman. Sewaktu berada di Uni Sovyet, Presiden Soekarno yang tidak disertai Ibu negara Fatmawati "*terperangkap skandal politik*". Di akhir kunjungan itu, pemerintah Sovyet mengajukan dua opsi kepada Presiden Soekarno, *pertama*, supaya Presiden Soekarno memberi kesempatan bagi PKI untuk berkembang di Indonesia, *kedua*, apabila Bung Karno tidak mau memberi kesempatan bagi PKI untuk berkembang di Indonesia, nama Bung Karno akan dijatuhkan.

¹¹ Dwi Tunggal Soekarno-Hatta yang harmonis sudah terwujud sejak kedua tokoh itu atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tetapi pasangan ideal itu terancam pecah karena terdapat perbedaan di antara keduanya, seperti masalah perekonomian, sikap menghadapi PKI.

¹² Di forum Konstituante muncul tiga usulan dasar negara dari berbagai golongan yang ada. *Usul pertama* dasar Pancasila dari golongan Nasionalis dan Komunis, *Kedua*, dasar Islam dari golongan Islam. *Ketiga*, dasar Sosial Ekonomi dari Partai Murba dan Partai Buruh. Ternyata tidak ada satu golonganpun yang berhasil menggolkan usul masing-masing, karena tidak mendapatkan suara 2/3 + 1 dari anggota Konstituante, yaitu 414 orang.

¹³ Sebagai taktik, dasar CGMI adalah Pancasila. Setelah tahun 1964, CGMI memproklamasikan diri sebagai organisasi Mahasiswa *Komunis* dan *non Komunis* yang progresif revolusioner, dan menjadi onderbouw PKI.

¹⁴ *Dewan Banteng* dipelopori Letkol Ahmad Husein, sedang *Dewan Gajah* dipelopori Kolonel Maludin Simbolon. Kedua Dewan dengan Dewan Garuda di Palembang yang dipelopori Letkol Burlian, nanti memproklamkan PRRI di Padang tanggal 15 Februari 1958.

¹⁵ Dalam konsepsi itu Bung Karno menginginkan Kabinet berkaki empat, yang terdiri dari kekuatan PNI, Masyumi, NU, dan PKI sebagai kaki keempat. Sebelumnya PKI berada di luar Kabinet. Dan inilah oleh pengamat politik disebut sebagai embrio Nasakom (Nasional - Agama - Komunis). Untuk itu lihat *Harian Indonesia Raya*, Jakarta, Nomor : 65 Tahun VIII, tanggal 5 Maret 1957.

¹⁶ Letkol. Vence Sumual mengumumkan Permesta di Sulawesi Utara, dan nanti bersama-sama PRRI melepaskan diri dari kekuasaan Presiden Soekarno di Jakarta.

¹⁷ Akibat terjadinya pergolakan di beberapa daerah untuk tetap dapat mengendalikan keadaan, yang sewaktu-waktu Presiden dapat mengambil tindakan pengamanan, maka Negara dinyatakan dalam keadaan bahaya atau SOB.

¹⁸ Seluruh Sumatera bergolak, Kolonel Burlian mengumumkan berdirinya Dewan Gajah, juga menyatakan memisahkan diri dari pemerintah Pusat.

¹⁹ Kabinet Karya, Ir. H. Juanda, dianggap Kabinet yang inkonstitusional, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada, maka masyarakat meminta supaya dibubarkan.

²⁰ Mukhtar Alim Ulama tersebut mengambil 3 keputusan, *pertama*, *haram* hukumnya diperintah PKI, *kedua*, kufur hukumnya menganut paham komunis, *ketiga*, supaya Kabinet dibentuk tanpa PKI.

²¹ Kebijakan politik Bung Karno yang memberi angin bagi PKI, maka di Moskow sebagai pusat kegiatan komunis internasional, membuat suatu program untuk mengkomunikasikan Indonesia, yang tertuang dalam *Manifest Moskow*. Lihat *Mingguan Anti Komunis*, Jakarta, Nomor : 4 Th. I, tanggal 5 Februari 1958.

proklamasi Pemerintah Revolusi Republik Indonesia (PRRI)²², 23) Ketua Umum DPP Masyumi, M. Natsir, memperingatkan Presiden Soekarno, bahwa dengan Kabinet Karya menyeret RI ke blok Rusia (Komunis)²³, 24) berita bahwa rencana PKI akan merebut kekuasaan di Ibukota²⁴, 25) mantan Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta menyatakan tidak setuju PKI duduk dalam pemerintahan²⁵, 26) penguasa Perang Pusat (Peperpu) dengan suratnya Nomor : 40/59 tanggal 3 Juni 1959, mengumumkan larangan adanya kegiatan politik²⁶, 27) tanggal 5 Juli 1959, Dekrit Presiden dikeluarkan²⁷, 28) tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato kenegaraannya yang berjudul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*²⁸, 29) berdasarkan Keputusan MPRS No : 3 Tahun 1960, pelajaran Agama mulai diberikan dari tingkat Sekolah Rakyat (SR, sekarang SD) sampai Perguruan Tinggi²⁹, 30) mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta menulis buku *Demokrasi Kita*³⁰, 31) tanggal 25 Juni 1960 DPR GR sebagai pengganti DPR hasil Pemilihan

²² Atas nama Perjuangan seluruh rakyat Indonesia, di Padang Letkol Ahmad Husein mengajukan tuntutan kepada Presiden Soekarno, agar dalam tempo 5 x 24 jam, supaya Kabinet Juanda dibubarkan. Ternyata tuntutan itu tidak dipenuhi, maka tanggal 15 Februari 1958, diumumkanlah pembentukan PRRI, yang melepaskan diri dari pemerintah pusat. Lihat *Mingguan Anti Komunis*, Jakarta, Nomor : 5 Th. 1 tanggal 16 Februari 1958.

²³ Lihat *Mingguan Anti Komunis*, Nomor : 4 Th. I, tanggal 9 Februari 1958.

²⁴ Peringatan itu tidak dihiraukan Presiden Soekarno. Ternyata 7 tahun kemudian (1965) terbukti bahwa peringatan itu benar, dengan meletusnya G 30 S/PKI tahun 1965. Lihat *Mingguan Anti Komunis*, No. 5 Th. 1 tanggal 16 Februari 1958.

²⁵ Menanggapi Konsepsi Presiden Soekarno, supaya Kabinet berkaki empat, Drs. Mohammad Hatta dalam ceramahnya di depan *Islam Study Group*, Yogyakarta, proklamator ini memperingatkan Presiden Soekarno supaya tidak melaksanakan konsepsinya itu, karena hal itu bertentangan dengan Pancasila. Lihat *Mingguan Anti Komunis*, No. 8 Th. I tanggal 9 Maret 1958.

²⁶ Di samping pernyataan negara dalam keadaan bahaya atau SOB, pengumuman Peperpu ini menandakan bahwa situasi dalam negeri sangat kritis. Larangan adanya kegiatan politik itu diumumkan karena Konstituante belum gagal menerima anjuran pemerintah kembali ke UUD 1945.

²⁷ Karena Konstituante belum berhasil membentuk UUD yang permanen, maka dengan persetujuan Konstituante kembali ke UUD 1945, maka lewat Dekrit 5 Juli 1959. Konstituante dibubarkan, dan UUD 1945 dinyatakan berlaku lagi.

²⁸ Atas usul Dewan Pertimbangan Agung (DPA), pidato Presiden ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN), dan disebut *Manifesto Politik* (MANIPOL). Kemudian Manipol berkembang dan menjadi satu dengan USDEK. Maka jadilah MANIPOL-USDEK, dengan kepanjangan Manifesto –Politik – Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian bangsa Indonesia, yang dicetuskan Presiden Soekarno setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, guna membuat gagasan politiknya menuju pemerintahan totaliter. Partai Islam Masyumi dan PSI menolak Manipol – Usdek itu, dengan resiko keduanya dibubarkan.

²⁹ Keputusan itu sangat strategis, karena dengan ketentuan itu, bangsa Indonesia berusaha untuk menyempurnakan sistem pendidikannya, sehingga dikotomi antara pelajaran agama dan pelajaran umum dapat dihilangkan. Sebelumnya tahun 1950, atas prakarsa trio Natsir (Perdana Menteri), Bahder Djohan (Menteri P & K), dan Wachid Hasyim (Menteri Agama) dalam dunia pendidikan, pada sekolah-sekolah umum diberikan pendidikan agama, dan sebaliknya di sekolah-sekolah agama, Madrasah, Pesantren diberikan pelajaran umum. Dan hasil penggabungan dua sistem pendidikan itu telah dapat dirasakan hasilnya mulai tahun 1970 sebagai Kebangkitan Intelektualisme Islam I, hingga sekarang.

³⁰ Majalah *Panji Masyarakat*, Jakarta pimpinan Buya Hamka menerbitkan buku *Demokrasi Kita* itu, sebagai kritik dan penolakan Mohammad Hatta terhadap *Demokrasi Terpimpin* yang digagas Bung Karno. Kata Bung Hatta, demokrasi sementara boleh hilang di Indonesia, tetapi suatu waktu muncul lagi. Benar sinyalemen Bung Hatta itu. Begitu Bung Karno jatuh Demokrasi Terpimpinnya dibuang jauh-jauh dan Demokrasi di Indonesia sayup-sayup muncul lagi dengan *Demokrasi Pancasila* Soeharto, yang sedikit lebih baik, dan maju dari Demokrasi Terpimpin Soekarno, tetapi Demokrasi yang sebenarnya belum terwujud, seperti tergambar dalam *Demokrasi Kita*, Mohammad Hatta.

Umum tahun 1955, diangkat dan dilantik Presiden Soekarno³¹, 32) Teddy Kardiman, lewat Kongres Darurat ke-5 Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) di Bandung tanggal 25 s.d. 30 Juli 1958 membajak IPPI³², 33) tanggal 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno memaksa Masyumi dan PSI bubar, dan apabila tidak membubarkan diri pada batas waktu yang ditetapkan, akan dinyatakan menjadi partai terlarang³³, 34) Kongres ke-2 CGMI di Salatiga memutuskan melikuidasi HMI³⁴, 35) Bertempat di Istana Tampaksiring Bali tahun 1961, Presiden Soekarno bersama Mr. Ali Sastroamijoyo (PNI), K.H. Idham Cholid (NU), dan D.N. Aidit (PKI) merumuskan konsep NASAKOM³⁵, 36) di Alun-Alun Utara Yogyakarta, tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengomandokan Trikora tanggal 19 Desember 1962³⁶, 37) Tahun 1962, berdiri Front Nasional yang menghimpun seluruh kekuatan dalam masyarakat yang tergabung dalam Partai-Partai dan organisasi massa³⁷, 38) Sejak 7 April 1962, dinyatakan bahwa pelaksanaan unsur-unsur syariat-syariat Agama Islam berlaku di seluruh Daerah Istimewa Aceh³⁸, 39) tanggal 4 Juni 1962 tokoh DI/TII Jawa Barat SM Kartosuwiryo tertangkap³⁹, 40) bertempat di Alun-Alun Utara Bandung, tanggal 20 Mei 1963, Presiden Soekarno diangkat menjadi Presiden seumur

³¹ Pengangkatan dan pelantikan anggota DPR GR yang dilakukan Presiden Soekarno bertentangan dengan UUD 1945. Masyumi memprotes karena merupakan malapetaka bagi umat Islam. Dan bagi anggota-anggota Masyumi yang menerima kenyataan DPR GR putus hubungan keanggotaan dengan Partai. Protes serupa disampaikan *Liga Demokrasi*, yang terdiri dari Masyumi, PSI, Partai Katholik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo), yang dibentuk pertengahan tahun 1960. Menurut Liga Demokrasi DPR GR ditolak secara prinsip, karena tidak demokratis dan tidak konstitusional, dan meminta supaya diadakan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lihat *Maklumat* Nomor 1, (Jakarta : Penerbit Pimpinan Partai Masyumi Bagian Penerangan, 1960), hlm. 1-4.

³² Untuk memperluas jaringan dan pengaruh PKI dalam organisasi Pelajar, maka PKI lewat Teddy Kardiman Wakil Ketua DPRD Kota Besar Bandung dari fraksi PKI melakukan tindakan brutal itu. Akibat tindakan kasar itu IPPI terbelah menjadi dua, yaitu IPPI Pancasila dan IPPI yang berhaluan komunis, yang pada tahun 1964-1965, ikut dalam barisan bersama Pemuda Rakyat, CGMI dan lain-lain menuntut pembubaran HMI Periksa Surat Edaran Pengurus Besar IPPI, Jl. Tanawarsa No. 32 Telf. 463 Yogyakarta, Nomor : 04/XV/58, tanggal 10 Oktober 1958, yang ditanda tangani Dahler M Sekretaris PB IPPI.

³³ Melalui Keppres Nomor : 200 untuk Masyumi dan Nomor : 201 untuk PSI tertanggal 17 Agustus 1960, kedua partai itu dipaksa bubar, karena pemimpin-pemimpinnya dituduh terlibat dalam peristiwa PRRI-Permesta. Lihat *Harian Pedoman*, Jakarta tanggal 18 Agustus 1960.

Sebelum batas waktu yang ditentukan harus bubar, maka DPP Masyumi dengan suratnya Nomor : 180/B/VI-25/60, tanggal 13 September 1960, yang ditanda tangani Prawoto Mangkusasmito dan Yunan Nasution, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Masyumi, disertai *Memorandum* politik, Masyumi menyatakan membubarkan diri.

³⁴ Lihat Agusssalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, (Surabaya : Penerbit Bina Ilmu, 1976), hlm. 42.

³⁵ Konsep NASAKOM, yang terdiri dari tiga unsur yaitu NASIONAL (NAS - diwakili PNI), AGAMA (A - diwakili Partai NU), dan KOMUNIS (KOM - diwakili PKI), menjadi suatu konsep untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Untuk pertama kali MASAKOM disampaikan Presiden Soekarno pada Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1961.

³⁶ Trikora atau Tri Komando Rakyat, berisikan tiga Komando Presiden Soekarno yaitu 1) gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua, buatan Belanda kolonial, 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, Tanah Air Indonesia, 3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

³⁷ Front Nasional didirikan atas kemauan politik PKI. Semua kegiatan partai politik, organisasi massa, dan masyarakat luas harus sepengetahuan dan sejjin Front Nasional. Dengan mekanisme ini, praktis kegiatan partai dan organisasi massa maupun rakyat dapat dikontrol dan berada di bawah pengawasan Front Nasional. Front Nasional mutlak dikuasai golongan nasionalis (PNI) dan golongan komunis (PKI). Front Nasional yang semestinya untuk kepentingan umum sering disalah gunakan dan dimanfaatkan bagi kepentingan politik golongan terutama PKI dan PNI seperti menuntut pembubaran suatu partai dan ormas, dan meretool pejabat-pejabat yang tidak disenangi.

³⁸ Lihat kembali *footnote* nomor 7.

³⁹ Gerakan DI/TII Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo diproklamkan 7 Januari 1949. Setelah Kartosuwiryo tertangkap, lantas dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer tanggal 16 Agustus 1962.

hidup⁴⁰, 41) dengan Keputusan Presiden Nomor : 139/1963, tanggal 10 Juli 1963, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dipaksa bubar⁴¹, 42) untuk mengimbangi kekuatan PKI di bidang kesenian dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)nya, tanggal 17 Agustus 1963, *Manifesto Kebudayaan*, yang terkenal dengan singkatan MANIKEBU berdiri⁴², 43) tanggal 16 September 1963, Malaysia diproklamirkan⁴³, 44) di IAIN Yogyakarta, Dewan Mahasiswa IAIN mengajukan protes kepada Rektor IAIN terhadap penyelenggaraan IAIN⁴⁴, 45) untuk meningkatkan perjuangan PKI, CC PKI mengeluarkan resume program PKI⁴⁵, 46) untuk meningkatkan ofensif revolusioner Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Cabang Jember, melarang HMI di Fakultas tersebut⁴⁶, 47) Peringatan HUT ke-44 PKI, berlangsung tanggal 23 Mei 1964⁴⁷, (48) Ketika berbicara di UGM Yogyakarta tanggal 16 Oktober 1964, Ketua CC PKI DN Aidit mengatakan bahwa Pancasila diterima PKI berdasarkan faktor-faktor obyektif⁴⁸, 49) tanggal 12 Desember

⁴⁰ Walau bertentangan dengan UUD 1945, namun dengan Keputusan MPRS Nomor : 3 Tahun 1963, tanggal 18 Mei 1963, mengangkat Soekarno menjadi Presiden seumur hidup.

Menurut Daud Sinjal, bahwa pengambil prakarsa untuk mengusulkan Bung Karno menjadi Presiden seumur hidup adalah seorang perwira Militer Akademi Yogyakarta yaitu Mayor Soehardiman yang baru saja membentuk SOKSI. Konsensus politik yang kontroversial itu disahkan MPR. Motivasi Soehardiman menggagalkan ketetapan MPRS yang jelas-jelas menyimpang dari UUD 1945 itu adalah untuk menggagalkan Pemilihan Umum yang dituntut PKI. Soehardiman dan kawan-kawan menyadari benar bahwa kalau Pemilu dilaksanakan yang bakal menang adalah PKI, karena partai yang mampu mengimbangnya, yakni PNI, sedang dilanda perpecahan. Kekuatan anti komunis lainnya, yakni PSI dan Masyumi sudah membubarkan diri tahun 1960. Sedangkan NU, PSII dianggap kurang mampu menyaingi PKI yang sedang di atas angin. Secara organisasi dan finansial, terlebih-lebih restu Bung Karno, yang gandrung Nasakom, PKI memang merasa paling siap menghadpai Pemilu. TNI – Angkatan Darat yang jelas-jelas anti PKI berusaha untuk menggagalkan Pemilu yang dituntut PKI segera setelah keadaan darurat perang dicabut. Bukan menentang ajang Demokrasinya, tapi AD tidak rela kalau sampai golongan yang pernah berkhianat itu berkuasa. Kalau PKI yang menang mutlak dalam Pemilu, tentu mereka akan mengganti Presiden, kemudian mengganti UUD, dan mengganti ideologi. Itu berbahaya, kata Soehardiman. Untuk itu periksa Daud Sinjal, *Laporan Kepada Bangsa Militer Akademi Yogyakarta*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Kotabaru Jakarta, 1996), hlm. 204.

⁴¹ GPII yang berdiri di Jakarta 2 Oktober 1945 dipaksa bubar, karena dituduh kontra revolusi, tidak mendasarkan programnya kepada Manipoi – Usdek. Agar tidak menjadi Organisasi terlarang dengan Surat PP GPII Nomor : 940/17/Um, tanggal 9 Agustus 1963, yang ditanda tangani Pj. Ketua Umum H.A. Buchari dan Ketua II Sumarso Sumarsono, disertai *Memorandum*, GPII menyatakan diri bubar. Lihat Agussalim Sitompul, *Sejarah perjuangan HMI*, hlm. 15.

⁴² Manifes tersebut diprakarsai dan ditanda tangani sejumlah sastrawan dan budayawan Ibukota yang anti komunis. Pada tahun 1964, dukungan terhadap Manikebu meningkat dan meluas di beberapa kota di luar Jawa. Salah seorang tokohnya adalah Taufiq Ismail. Usia Manikebu tidak panjang, karena sejak 8 Mei 1964, Manikebu dilarang pemerintah.

⁴³ Malaysia yang diproklamirkan itu terdiri dari *Malaya*, yang memperoleh Kemerdekaan dari Inggris 31 Agustus 1957, *Singapura*, *Sabah*, dan *Serawak*. Karena Malaysia itu dianggap prospek New Kolonialisme (Nekolim), Presiden Soekarno secara spontan tanggal 17 September 1963, mengumumkan konfrontasi dengan Malaysia.

⁴⁴ Peristiwa itu terjadi tanggal 10 Oktober 1963. Peristiwa yang sama tanggal 17 Oktober 1963 terjadi di IAIN Jakarta, juga dengan motif yang sama. Karena kedua peristiwa banyak di antara Dosen maupun mahasiswa diambil tindakan seperti pemutasian, dipecat, dan *skorsing*.

⁴⁵ Resume tertanggal 23 Desember 1963 itu memuat tentang kebijakan/program PKI di bidang ekonomi, pemerintahan, organisasi, kebudayaan, dan sosial ekonomi. Tetapi PKI membantah, bahwa resume itu dikeluarkan CC PKI.

⁴⁶ Alasan pelarangan tertanggal 2 Mei 1964, karena HMI dituduh terlibat PRRI/Permesta, anti Pancasila, anti Bung Karno, dan lain-lain.

⁴⁷ Dengan congkak Wakil Ketua I CC PKI, Lukman, ketika memberikan sambutan pada HUT partai tersebut mengatakan, "*PKI yakin semakin-yakinnya bahwa PKI akan terus hidup, dan tidak ada satu kekuatan di dunia ini yang dapat mematikan dan menghancurkannya sebelum tujuannya terakhir Komunisme tercapai.*"

⁴⁸ Tanggal yang sama di Jakarta di muka Kader Revolusi di Aula Bank Indonesia Aidit mengatakan, "*Dan disimilah betulnya Pancasila sebagai alat pemersatu. Sebab kalau sudah jadi satu semuanya, para saudara, Pancasila tidak perlu lagi.*"

1964, *Deklarasi Bogor* dicetuskan⁴⁹, 50) Presiden Soekarno membubarkan dan melarang Barisan Pendukung Soekarnoisme⁵⁰, 51) di Jakarta tanggal 19 s.d. 26 Desember 1964, organisasi mahasiswa, pemuda, pelajar Islam menyelenggarakan Munas, dan berhasil membentuk Generasi Muda Islam (GEMUIS)⁵¹, 52) tanggal 2 Januari 1965, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa⁵², 53) Di desa Kanigoro, Kras, Kediri, tanggal 13 Januari 1965, terjadi *Peristiwa Kanigoro*⁵³, 54) Dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor : 17/SK/M/1965 tanggal 24 Februari 1965, mencabut Izin terbit surat kabar/majalah pendukung BPS⁵⁴, 55) Bandung menjadi ajang berlangsungnya Konferensi Islam Asia Tenggara (KIAA) tanggal 6 s.d. 13 Maret 1965⁵⁵, 56) bulan Maret 1965, Wakil Perdana Menteri/menteri Luar Negeri Dr. Subandrio mengajukan konsepsi pembubaran HMI⁵⁶, 57) Hardi, SH dan kawan-kawan dipecat dari PNI, karena dicap sebagai "*Marhaenis Gadungan*"⁵⁷, 58) tanggal 13 September 1965 Presiden Soekarno menganugerahkan *Bintang Mahaputera* kepada Ketua CC PKI di Istana Negara⁵⁸, 59) hari-hari menjelang Gestapu/PKI, dengan Keputusan Presiden Nomor : 29/1965, tanggal

⁴⁹ Deklarasi Bogor itu merupakan pernyataan kebulatan tekad 10 Partai Politik, yaitu PNI, NU, PSII, PKI, Perti, Parkindo, Partai Katholik, Murba, Partindo, dan IPKI, yang memuat 4 pasal, dukungan politik konfrontasi dengan Malaysia, memerlukan Persatuan Nasional yang progresif revolusioner berporoskan NASAKOM, menempuh jalan musyawarah dalam masalah tanah, dan bantahan bahwa Bung Karno akan meletakkan jabatan.

⁵⁰ Sebelumnya tanggal 1 Oktober 1964 Badan Pendukung Sukarnoisme, suatu badan dari berbagai penerbitan surat kabar dari para wartawan, sebagai bentuk perlawanan menentang gerakan PKI didirikan. Dan dengan Surat Keputusan Komando Tertinggi (KOTI) Nomor 72/KOTI/1964, BPS dibubarkan.

⁵¹ Di Jakarta, tanggal 4 s.d. 7 Desember 1963, diadakan Kongres Pemuda Islam Indonesia (KPII), dan berhasil membentuk Persatuan Organisasi Pemuda Islam Seluruh Indonesia (PORPISI). Ternyata organisasi tidak berumur panjang, lantas tahun 1964 dibentuk organisasi yang serupa, yang diberi nama GEMUIS.

⁵² Dengan keluarnya Indonesia dari PBB, maka Indonesia terisolir dari pergaulan antar sesama bangsa di dunia. Dengan sendirinya poros Jakarta - Pyong Yang, semakin penting.

⁵³ Peristiwa itu dilakukan Suryadi dengan 3000 anak buahnya, terdiri dari anggota BTI dan Pemuda Rakyat menyerbu peserta dan Dosen Mental Training PII yang diselenggarakan Pengurus PII Wilayah Jawa Timur, serta melakukan penghinaan terhadap kesucian Agama Islam, dengan menginjak-injak Al Quran, menghina dan mengganggu orang Sholat. Akibat dari peristiwa itu, dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor : 1 Tahun 1965, tanggal 27 Januari 1965, tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

⁵⁴ Surat kabar yang dicabut Ijin terbitnya itu, di Jakarta 11 buah surat kabar dan 9 majalah, yang semuanya merupakan surat kabar anti PKI.

⁵⁵ Di tengah berlangsungnya KIAA di Bandung itu, tanggal 12 Maret 1965, dicetuskan *Deklarasi Ummat Islam*, yang ditanda tangani wakil-wakil dari Partai NU, PSII, Muhammadiyah, Al Wasliyah, Gasbiindo. Deklarasi itu memuat, bahwa setiap rongrongan terhadap sebagian umat Islam, merupakan rongrongan terhadap seluruh umat Islam, maka harus dihadapi dengan segala kekuatan. Di saat menjelang berlangsungnya KIAA, yang pesertanya datang dari negara-negara Asia Afrika, maka di Ibukota golongan PKI dan antek-anteknya melaksanakan berbagai aksi dan demonstrasi yang menuntut pembubaran HMI. Maka untuk menunjukkan solidaritas umat Islam Indonesia kepada HMI, dikeluarkanlah Deklarasi Umat Islam di Bandung tanggal 12 Maret 1965..

⁵⁶ Subandrio telah berhasil dibina PKI, untuk itu dijuluki "Durno" di tahun 1966 ia ambil bagian untuk pembubaran HMI dengan membuat konsepsi pembubaran HMI yang akan diajukan dalam sidang kabinet. Tetapi karena terlebih dahulu diketahui Menpangad Letjen Ahmad Yani, konsep itu dirobek-robek. Dan acara pembubaran HMI dalam Sidang Kabinet dicoret Ahmad Yani, dan disetujui Presiden Soekarno.

⁵⁷ Walaupun Hardi, SH, cs. dipecat dari PNI, tetapi malah kubu ini pada bulan Agustus 1965 membentuk DPP PNI tandingan di bawah pimpinan Osa Maliki (Ketua Umum) dan Usep Ranuwiharja, SH (Sekjen) - Osa-Usep. Sejak itu PNI terbelah, yang satu lagi tetap dipimpin Ali Sastroamijoyo dan Surachman (ASU).

⁵⁸ Menurut kesaksian sejarah, Aidit itu absen dalam Perang Kemerdekaan. Tetapi dengan pemberian Bintang Mahaputra itu Aidit adalah seolah-olah orang yang paling berjasa. Tetapi di luar Istana Negara, pemuda, pelajar, mahasiswa Islam yang tergabung dalam GEMUIS mengadakan demonstrasi besar-besaran, memprotes pemberian Bintang Mahaputera itu, sambil menunjukkan solidaritasnya kepada HMI yang secara terus menerus dituntut bubar oleh kaum komunis, dengan menyatakan akan mempertahankan HMI sampai titik darah penghabisan, dan *Langkahi mayatku sebelum ganyang HMI*, begitu bunyi spanduk yang mereka bawa. Lihat *Harian Berita Yudha*, Jakarta : tanggal 14 September 1965 dan *Harian Suara Islam*, Jakarta, tanggal 14 September 1965.

21 September 1965, Partai Murba dibubarkan⁵⁹, 60) tanggal 29 September 1965, barusan PKI dan antek-anteknya mengambil kesempatan terakhir menuntut pembubaran HMI sekarang juga kepada Presiden Soekarno⁶⁰, 61) pada hari H yang telah ditentukan PKI sendiri, tanggal 30 September 1965 terjadi pengkhianatan dan pemberontakan PKI kedua dengan peristiwa G 30 S.⁶¹

⁵⁹ Karena dituduh sebagai pendukung utama BPS, dan berseberangan dengan PKI, walaupun sama-sama kubu sosial, Presiden untuk ketiga kalinya membubarkan Partai, setelah Masyumi dan PSI tahun 1960.

⁶⁰ Pada penutupan Kongres ke-3 CGMI di Jakarta 29 September 1965, Aidit beragitasi, apabila anggota CGMI tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik pakai kain saja. HMI soal kecil. Aidit memprovokasi supaya anggota CGMI menuntut Bung Karno supaya mengomandokan pembubaran HMI. Tetapi Bung Karno dalam kata sambutannya mengatakan, bukan hanya HMI yang akan saya bubarkan kalau dia kontra revolusi, tetapi juga PKI, CGMI, kalau kontra revolusi juga akan saya bubarkan. Mendengar pidato itu, barisan PKI kecewa besar dan frustrasi. Tunggu apalagi, hanya Aidit yang tahu.

⁶¹ Karena PKI sudah siap main kayu, dan ibukota yang sudah dalam keadaan hamil tua, maka PKI melancarkan kudeta, perebutan kekuasaan dari pemerintah yang sah, ingin mendirikan Negara Sovyet di Indonesia, mengganti dasar negara Pancasila dengan Komunis. Pemberontakan itu dilakukan dengan membentuk *Dewan Revolusi*, dengan Komandan Letkol Untung. Akibat pemberontakan itu telah gugur para Pahlawan Revolusi, yaitu Ahmad Yani, Suprpto, Haryono, MT, S. Parman, D.I. Panjaitan, Sutoyo Siswomiharjo, Piere Tendean, Katamso, dan Sugiyono, serta rakyat yang tidak berdosa.

Lampiran 7 :

Enam Esensi Kepribadian HMI

Setelah meninjau sekedarnya seperti yang diuraikan dalam Mukaddimah, latar belakang sejarah HMI, dasar dan tujuan HMI, kedudukan HMI di masa datang, maka dapatlah diketahui bahwa unsur-unsur yang ikut menentukan pembentukan kepribadian HMI adalah banyak dan luas sekali. Di antara unsur-unsur yang tidak terhitung jumlahnya itu, sudah barang tentu ada yang merupakan unsur pokok, unsur penting, unsur tidak penting dan sebagainya. Dalam perumusan berikut ini hanyalah dibatasi pada perumusan unsur pokok yang merupakan esensi kepribadian HMI. Unsur pokok yang merupakan esensi kepribadian HMI itu ialah :

1. *Dasar tauhid*, yang bersumber kepada Al Quran dan Sunnah Rasulullah yaitu dasar keyakinan bahwa *tiada Tuhan selain Allah*, dan *Allah itu adalah Mah Esa*, yang merupakan inti dari Iman, Islam dan Ikhsan.
2. *Dasar Keseimbangan*, yaitu keseimbangan yang harmonis antara pemenuhan tugas dan akhirat, jasmaniah dan rohaniah, akal dan kalbu, iman dan ilmu, untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
3. *Kreatif*, yaitu memiliki kemampuan, daya cipta, dan daya pemikiran rasional dan kritis, sehingga memiliki kebijaksanaan untuk dapat berilmu amaliah dan beramal ilmiah.
4. *Dinamis*, yaitu selalu dalam keadaan gerak dan terus berkembang serta dapat dengan cepat memberikan respon terhadap setiap tantangan yang dihadapi, sehingga ia menduduki fungsi pelopor yang militan.
5. *Pemersatu*, yaitu sikap dan perbuatan angkatan muda yang merupakan kader salah satu umat Islam dan bangsa Indonesia, yang mengusahakan secara aktif terlaksananya integrasi umat Islam Indonesia serta menggalang persatuan nasional.
6. *Progresif Revolusioner*, yaitu sikap dan perbuatan angkatan muda yang patriotik, yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan tanah air di atas kepentingan pribadi, serta membela kaum yang lemah dan tertindas menentang kezaliman dan kebatilan dalam segala bentuk dan manifestasinya terutama kapitalisme dan komunisme serta ikut aktif di dalam pembentukan dan pengisian masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur material dan spiritual serta diridloi Allah SWT.¹

¹ Kepribadian HMI merupakan hasil musyawarah HMI seluruh Indonesia di Pekajangan Pekalongan tanggal 23-28 Desember 1962, dan disahkan pada Kongres HMI ke-7 di Jakarta tanggal 8-14 September 1963, dan diperbaharui pada Kongres ke-8 HMI di Solo pada tanggal 10-17 September 1966. Untuk itu lihat *Kumpulan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, Tafsir Azas, Garis-Garis Pokok Perjuangan dan Kepribadian HMI* (Yogyakarta : Penerbit Panitia Mukerca HMI Cabang Yogyakarta, 1966), hlm. 6.

STATEMENT

PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM

No. : 219/B/Sek/58

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIEM

Himpunan Mahasiswa Islam sebagai satu organisasi Mahasiswa Indonesia berdasarkan Islam yang menjamin hak2 azasi manusia, menolak dan tidak dapat menerima theorie dan praktek doktrin Komunisme.

Sedjarah bangsa2 Azerbaijan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan, Kazakistan, Kirgistan yang penuh dengan rangkaian penderitaan berupa perkosaan terhadap hak2 azasi manusia, penjiksaan, penindasan, pembuangan dan pembunuhan yang dilakukan oleh regiem Komunis adalah bukti yang berbitjara sendiri, dan merupakan peringatan yang tragies bagi seluruh bangsa didunia yang kini hidup damai dalam alam demokrasi.

Pembunuhan setjara massaal dan diluar batas2 peri kemanusiaan dengan mempergunakan bukti2 yang senga-dja dipalsukan yang dilakukan oleh Stalin baik terhadap musuh2nja maupun terhadap kawan2nja sepimpinan party, sebagaimana yang diuraikan oleh Nikita Khrushchev dalam kongres ke 20 Party Komunis Sovjet Unie dalam bulan Februari 1956 yang lalu, merupakan tantangan yang mengerikan terhadap martabat umat manusia.

Penindasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Sovjet terhadap ribuan Mahasiswa Hongaria yang telah memelopori demonstrasi dan pertempuran untuk kemerdekaan tanah air mereka dari regiem Komunis dalam bulan October 1956, merupakan lambang hitam dalam sedjarah Mahasiswa didunia dan merupakan peringatan bagi setiap Mahasiswa dinegara manapun dia berada untuk tidak memberikan kesempatan kepada aliran Komunis untuk berkembang apalagi untuk berkuasa.

Pengadilan setjara rahasia dan penghukuman mati setjara diam2 terhadap bekas Profesor dan bekas Perdana Menteri Imre Nagy adalah perkosaan yang kedji terhadap hak2 azasi manusia yang didjamin dalam piagam P.B.B.

Penghantjuran setjara sistimatis kegunaan mesjdjid2 dan geredja2, penghapusan kaum ulama dan pendeta di Sovjet Unie dan negara satelitnja, merupakan antjaman bagi umat2 yang bertuhan diseluruh dunia.

Penghianatan dan pemberontakan Party Komunis Indonesia dalam bulan September 1948 di Madiun yang menjebabkan djatuhnja banjak korban dikalangan Tentara Nasional Indonesia, pamongpradja dan rakjat djelata, serta hantjurnja sebagian peralatan perang dan sipil merupakan bantuan yang langsung terhadap tentara Belanda yang sedang siap2 menerkam Republik Indonesia disaat itu, dan achirnja berkat penghianatan ini, tentara Belanda dapat menguasai daerah Republik Indonesia dan dapat menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta, beberapa Menteri dan perwira tinggi.

Dalam menghadapi bahaya Komunis ini kami sangat menghargai pernyataan2 yang telah dikeluarkan oleh Dewan2 Pimpinan Party Nasional Indonesia : Daerah Djawa Barat, Djawa Tengah, Djawa Timur, Nusatenggara, Sumatra Selatan, Sumatra Timur dan Sumatra Utara pada achir tahun 1957 yang lalu, yang isinja menolak kerdja sama dengan pihak Party Komunis Indonesia.

Kepada kawan2 Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia djuga tak lupa kami menjatakan penghargaan yang sebesar2-nja atas inisiatif mereka yang telah memperingatkan masjarakat untuk waspada terhadap bahaya Komunisme.

Disamping penghargaan tsb. diatas, rasanja perlu kami mengkonstatir keinginan masjarakat ramai bahwa yang terpenting dewasa ini adalah penglaksanaan dari penjataan2 tsb., karena pengaisman2 pahit dinegara Eropah Timur sudah tjukup mendjadi bukti bagi negara2 demokrasi untuk tidak bekerdja dengan apa yang disebut golongan Komunis.

Kapada golongan non Komunis di Indonesia baik sebagai anggota Angkatan Perang, Polisi dan Pegawai sipil maupun sebagai Pemuda, Peladjar, Mahasiswa, Buruh, Tani, dan Rakjat seluruhnja kami andjurkan agar supaja tetap ber-hati2 atas adanja aksi2 subversif imperialis Komunis yang sangat pandai dan litjik menungga-
ngi keadaan dan mengobar2-kan semangat untuk keuntungan golongannja yang berpusat di Moskou, disamping sub-
versif imperialis Barat.

Kepada Party2 Islam, Kristen dan Katholik kami mengandjurkan dengan seichlas2-nja agar kerdja sama dengan PKI yang setjara langsung memberikan kesempatan yang luas kepada PKI untuk berkembang kemudian berkuasa, segera dihentikan, demi untuk keselamatan umat yang ber Tuhan dan hak2 azasi manusia dan demi untuk tetap berkumandangnja ajat2 sutji diseluruh Indonesia.

Djakarta, 26 Djuni 1958.
8 Zulhidjah 1377

PENGURUS BESAR H.M.I.

Sekretaris Umum,

t.t.d.

Ketua Umum,

t.t.d.

Lampiran 9 : Daftar Buku-Buku yang Menjadi Sumber Pemikiran Keislaman – Keindonesiaan HMI dari Tahun 1947 - 1997

A. Periode 1947-1965

1. *Pedoman Lengkap Kongres Muslimin Indonesia 20-25 Desember 1949 di Yogyakarta*, (Yogyakarta : Penerbit Panitia Pusat Kongres Muslimin Indonesia Bagian Penerangan.
2. *Kepribadian Himpunan Mahasiswa Islam*, (Dikeluarkan oleh Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, 1964)

B. Periode 1966-1984

1. *Sejarah Perjuangan HMI*, (Penerbit : Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, 1966)
2. Utomo Danandjaja, *Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Jakarta : Diterbitkan oleh Islamic Research Centre, 1970)
3. A. Halim Mubin, *Fragmen Lintasan Sejarah Perjuangan HMI Periode Yogyakarta*, (Makassar, 1970)
4. *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan*, (Jakarta : Penerbit Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, 1971)
5. E. Saifuddin Anshari, *Kritik Atas Faham dan Gerakan "Pembaharuan" Drs. Nurcholish Madjid*, (Bandung : Penerbit Bulan Sabit, 1973)
6. Deliar Noer, *Masalah Ulama Intelektuil Atau Intelektuil Ulama Suatu Tesis Buat Generasi Muda Islam*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1974)
7. Agussalim Sitompul, *Sejarah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (TH. 1947-1975)*, (Surabaya : Penerbit Bina Ilmu, 1976)
8. *HMI Sepanjang Jalan*, (Jakarta : Penerbit Departemen Penerangan PB HMI, 1975)
9. Djohan Effendi, Ismed Natsir, *Pergolakan Pemikiran Islam Catatan Harian Ahmad Wahid*, (Jakarta : Penerbit LP3S, 1981)
10. Victor Tanja, *Himpunan Mahasiswa Islam Sejarah dan Kedudukannya di Tengah-Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1982)
11. Agussalim Sitompul, *HMI Dalam Pandangan Seorang Pendeta Antara Impian dan Kenyataan Koreksi Terhadap Buku Victor Tanja*, (Jakarta : Penerbit PT. Gunung Agung, 1982)

C. Periode 1985-1997

1. Agussalim Sitompul, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, (cetakan pertama, Jakarta : Penerbit Integrita Dinamika Press Maret 1986) dan (cetakan kedua, Yogyakarta : Penerbit Aditya Media, Agustus 1997).
2. Agussalim Sitompul, *Citra HMI*, (cetakan pertama, Yogyakarta : Penerbit Sumbangsih Offset, 1986) dan (cetakan kedua, Yogyakarta : Penerbit Aditya Media, 1997)
3. Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966*, (Jakarta : Penerbit Haji Masagung, 1989)
4. Agussalim Sitompul, *Kapita Selekta Aktifitas dan Pemikiran HMI*, (Yogyakarta : Penerbit Sumbangsih Offset, 1990)

5. Muhriji Fauzi, HA, Ade Komaruddin Mochammad, *HMI Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta : Penerbit PT. Gunung Kulabu, 1990)
6. Achmad Zacky Siradj, *Kenangan 70 Tahun Achmad Tirtosudiro Profil Prajurit Pengabdian*, (Jakarta : Penerbit PT. Intermedia, 1992)
7. Agussalim Sitompul, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam 1947-1993*, (Jakarta : Penerbit PT. Intermedia, 1995)
8. Agussalim Sitompul (Ed.), *Korp HMI-Wati Dalam Sejarah 1966-1994*, (Jakarta : Penerbit Korp HMI-Wati PB HMI, 1995)
9. Ridwan Saidi (Ed.), *Biografi, Pemikiran, dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo Sosok Pejuang Muslim Nasionalis dan Pendidik Kader-Kader Himpunan Mahasiswa Islam*, (Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Informasi Pembangunan, 1995)
10. Deliar Noer, *Aku Bagian Umat Aku Bagian Bangsa*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996)
11. Mar'ie Muhammad, *HMI - Perubahan - Globalisasi Pikiran dan Renungan Untuk Generasi Muda*, (Pidato peringatan Dies Natalis ke-49 HMI, 5 Februari 1996), (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1996)
12. M. Rusli Karim, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1997)
13. Agussalim Sitompul, (Ed.), *HMI Mengayuh di Antara Cita & Kritik*, (Yogyakarta : Penerbit Aditya Media, 1997)
14. Moksen Idris Sirfefa, M. Alfan Alfian M (Ed.), *Mencipta dan Mengabdikan Komitmen Nilai Islam Untuk Masa Depan Bangsa*, (Jakarta : Penerbit Pengurus Besar HMI, 1997)
15. Ramli HM Yusuf, (Ed.), *Lima Puluh Tahun HMI Mengabdikan Republik*, (Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, 1997)
16. Anas Urbaningrum, *Menuju Masyarakat Madani Pilar dan Agenda Pembaharuan*, (Jakarta : Penerbit Yasrif Watampone, 1997)
17. Fachry Ali (Pengantar), *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman*, (Jakarta : Penerbit Majelis Nasional KAHMI, 1997)
18. Fasih, dkk., *Orde Baru dan Masa Depan, Sebuah Renungan Untuk Generasi Penerus*, (Surabaya : Penerbit Majelis Wilayah KAHMI Jawa Timur, 1997)

Daftar nama buku yang isinya antara lain memuat berbagai pengertian, penjelasan tentang pemikiran keislaman - keindonesiaan

Buku pertama, *Keislaman dan Keindonesiaan Menatap Masa Depan* ditulis Nurcholish Madjid, dan diterbitkan Yayasan Wakaf Paramadina, tahun 1986. Secara topikal, judul buku begitu kena dengan topikal pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI. Setelah kata Pengantar yang diberikan Nurcholish pada buku *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Bangsa Indonesia*, yang ditulis Agussalim Sitompul, (1986), yang telah memuat pengertian tentang keislaman-keindonesiaan HMI, buku ini merupakan buku kedua yang memberi pengertian yang elaboratif tentang integrasi keislaman dalam keindonesiaan. Nurcholish mengatakan, dan merupakan substansi pemikiran dalam buku kecilnya itu bahwa menyadari sepenuhnya tentang perkembangan modern yang sangat kompleks, maka dicetuskan satu wawasan, yaitu mengintegrasikan

antara keislaman dan keindonesiaan, wawasan azasi berdasarkan keislaman pada hakekatnya menyatu dengan wawasan azasi keindonesiaan berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila yang telah mantap sebagai nilai-nilai kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Kesejajaran itu menurut Nurcholish menyatakan diri dalam bentuk hubungan saling menopang di antara keduanya. Yaitu bahwa ajaran-ajaran agama Islam menyediakan bahan kaya dan tidak habis-habisnya untuk mengisi nilai-nilai Pancasila. Dan Pancasila, kata Nurcholish, memberi kerangka konstitusional bagi pelaksanaan nilai-nilai keislaman di Indonesia, sehingga semakin relevan dengan masalah bangsa dan negara¹. Melihat dari judul buku, dan substansi yang tertuang di dalamnya, maka pemikiran Nurcholish tentang integrasi keislaman dan keindonesiaan memiliki kontribusi besar dalam ikut serta memberi pengertian tentang keislaman-keindonesiaan. Pemikiran ini kebetulan disampaikan di lingkungan Yayasan Wakaf Paramadima, dan di lain kesempatan diberikan untuk HMI seperti yang tertuang dalam kata Pengantarnya dalam buku *Pemikiran HMI* yang ditulis Agussalim Sitompul, pada tahun yang sama, tahun 1986, tanpa ada perbedaan substansinya.

Buku *kedua*, ditulis Fachry Ali dan Backtiar Effendi, keduanya adalah tokoh dan alumni HMI dari cabang Ciputat. Buku yang diterbitkan Mizan, 1987, berjudul *Merambah Jalan Baru Islam*, memuat banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan pemikiran HMI, sehingga berpengaruh dalam pembentukan pengertian atau konsep pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI. Seperti ditulis pada pendahuluan buku itu, akan digambarkan suatu proses interaksi antara Islam dengan lingkungan Indonesia, yang kemudian mengubah bentuk pemikiran Indonesia. Akan didiskusikan juga timbulnya gejala *peta baru pemikiran Islam*. Salah satu substansi pemikiran yang dapat ditangkap seperti termuat pada halaman 134 disebutkan :

*Tesis tesis "pemikiran baru" yang diangkat ke permukaan oleh Nurcholish, dengan segera mendapatkan tanggapan, terutama dari kalangan intelektual Muslim. Dari berbagai tanggapan yang muncul dapat diasumsikan bahwa pada dasarnya, kalangan terpelajar Islam merasakan pula perlunya pemikiran-pemikiran segar yang dapat membawa umat keluar dari stagnasi kegiatan berpikir.*²

Substansi berikutnya, seperti dikutip berikut ini
Berbeda dengan kelompok "pemikiran baru". Bagi mereka, pemikiran dan persepsi keislaman selama ini merupakan sikap apologetik. Mungkin saja mereka menyakini bahwa Islam tidak bertentangan dengan modernisasi, dan bahwa cita-cita modernisasi adalah sama dengan cita-cita Islam. Tetapi dalam pandangan kelompok "pemikiran baru" pokok persoalannya tidak terletak pada apakah Islam sesuai dengan modernisasi atau tidak, yang menjadi perhatian mereka adalah bahwa, dalam kenyataannya, meskipun umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, kontribusinya terhadap pembangunan nasional sangat sedikit. Jelas sekali tampak bahwa perhatian kelompok "pemikiran baru" ini tidak kepada doktrin Islam, seperti yang menjadi perhatian kelompok seniornya, melainkan pada realitas umat Islam Indonesia sendiri. Dengan demikian pandangan

¹ Nurcholish Madjid, *Keislaman dan Keindonesiaan Menatap Masa Depan*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Wakaf Paramadima, 1986), hlm. 12.

² Lihat Fachry Ali dan Backtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru*, hlm. 134.

kelompok "pemikiran baru" ini lebih bersifat empiris dan historis sesuai dengan sejarah perkembangan umat Islam Indonesia sendiri.³

Demikian diungkap Fachry dan Bachtiar.

Butir-butir pemikiran yang terungkap itu, adalah pemikiran atau pandangan yang memberi dampak terhadap pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI, yang kebetulan kedua penulis buku itu adalah tokoh, aktivis, dan pemikir HMI pada zamannya. Substansi berikutnya, terlihat dari ungkapan yang mengatakan bahwa dengan "pembauran" ini kelompok pemikir baru berharap umat Islam Indonesia dapat mengambil bagian dalam merencanakan perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Dari proses inilah dikatakan sebagai dasar intelektualisme generasi muda Islam terbentuk, terutama di kalangan anggota HMI, untuk memperjelas ungkapan di atas, oleh penulisnya diberi catatan kaki, sebagai pengakuan dari penulisnya bahwa pemikiran-pemikiran yang termuat dalam berbagai literatur (termasuk buku yang sedang dibahas ini), seperti yang penulis katakan menemukan relevansinya. Kita kutipkan catatan kaki itu:

Pengaruh "pemikiran baru" di kalangan HMI sangat kuat. Ide-ide mereka memberikan inspirasi intelektual di kalangan anggota HMI, yang berbeda dengan intelektualisme Islam dekade 1950-an. Keberanian kelompok "pemikir baru" yang secara terbuka mengkritik umat Islam Indonesia, membuka wawasan akan kelemahan-kelemahan umatnya sendiri. Sejak itulah, secara perlahan-lahan muncul intelektual-intelektual dan teknokrat-teknokrat muda dari kalangan HMI. HMI dalam hal ini mendapat warna baru, suatu organisasi mahasiswa intelektual, yang tidak memandang mazhab bagi pengelompokan dirinya, kritis, terbuka, dan berwawasan luas. Cap ini berkembang sejak awal-awal tahun 1970-an sampai dengan 1977. Namun cap ini semakin lama, semakin hilang di kalangan HMI dewasa ini.⁴

Substansi isi buku berikutnya seperti kutipan berikut ini :

Proses Islamisasi, dengan demikian, bukanlah suatu yang formal Islamisasi dalam refleksi pemikiran mereka adalah karya-karya produktif yang berorientasi ke perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik menuju terciptanya masyarakat adil dan demokratis.⁵

Ungkapan di atas merupakan salah satu pikiran yang ikut membentuk format pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI yang bercorak substantif, yang mementingkan isi ketimbang yang bersifat formal. Aktivis, alumni, dan pemikir HMI yang memiliki corak pemikiran seperti itu antara lain dapat disebut nama Adi Sasono, M. Dawam Rahardjo, dan Kuntowijoyo.

New modernisasi, merupakan pemikiran HMI dewasa ini. Inipun disinggung dalam buku itu, seperti kutipan berikut;

New modernisme ini merupakan produk baru yang mengatasi dua pola pemikiran besar sebelumnya modernisasi dan tradisionalisme. Perbedaan pokok antara new modernisasi dengan kedua pola pemikiran di atas adalah kesediaannya untuk

³ Lihat Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru*, hlm. 155.

⁴ Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru*, hlm. 159.

⁵ Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru*, hlm. 171.

*mengakomodasikan ide-ide modernis yang paling maju sekalipun, serta ide-ide tradisional sekaligus.*⁶

Kenyataan HMI sekarang ini, dalam format pemikiran Islam Indonesia telah sampai kepada pola pemikiran *New modernisme*, seperti yang sudah dibahas terdahulu.

Itulah beberapa kutipan dan ulasan substansi yang terdapat dalam buku itu, yang oleh penulis dikatakan memiliki pengaruh yang kuat dan relevan bagi pembentukan pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI. Tentunya masih banyak substansi yang dapat diolah, tetapi dibatasi sampai di sini.

Buku *ketiga*, adalah *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* merupakan kumpulan tulisan-tulisan Nurcholish Madjid, yang diberi Pengantar M. Dawam Raharjo, terbit tahun 1987. Buku dengan kulit berwarna "merah-putih" melambangkan semangat keindonesiaan yang sangat kental, dan dibingkai dengan keislaman "dan kemodernan". Seperti yang dikatakan M. Syafi'i Anwar, bahwa kalau diamati secara seksama dan tekun, pemikiran Nurcholish pada dasarnya merupakan dialektika tiga ide dalam kesatuan, yakni *keislaman*, *kemodernan*, dan *keindonesiaan*. Kesatuan ide tulis M. Syafi'i Anwar memang mirip dengan bukunya *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987). Tiga substansi itulah yang dibahas dalam buku itu, meliputi 30 buah kumpulan tulisan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan pemikiran HMI. Tentu satu-persatu ide itu tidak akan dibahas di sini.⁷

Buku *keempat*, *Islam Doktrin dan Peradaban Sebuah Telaah Kritis tentang masalah keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*, ditulis Nurcholish Madjid, terbit tahun 1992. Buku ini merupakan kumpulan makalah penulisnya yang disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) yang diselenggarakan Yayasan Wakaf Paramadima, sebanyak 33 buah tulisan, dengan Kata Pengantar yang sangat elaboratif sebanyak 54 lembar.

Seperti yang ditulis M. Syafi'i Anwar, bahwa buku karya Cak Nur ini lebih memperdalam, mempertajam, memperkaya khasanah pemikiran Nurcholish. Sebab melalui buku keduanya itulah, pandangan Nurcholish sebagai pemikir new modernis, menampakkan sosoknya secara lebih utuh kata M. Syafi'i Anwar. Metoda-metoda serta pendekatan yang diterapkannya nampak bertambah jelas. Dalam memahami pemikiran Nurcholish tentu saja patut diperhatikan pula semua lontaran-lontaran pemikirannya dalam berbagai kesempatan. Lebih lanjut Syafi'i Anwar menyatakan, secara umum pemikiran Nurcholish dapat dirumuskan dalam konstruksi dialektika dan kesatuan gagasan tentang *keislaman*, *keindonesiaan*, dan *kemodernan* itu. Dialektika dan kesatuan tiga ide besar itu, melahirkan ide-ide pendukung (supporting ideas), yang berfungsi memperkuat konstruksi bangunan ide, yakni "*new-modernisme*", *integrasi*, dan *pembangunan*". Sedang yang memperkuat seluruh konstruksi bangunan ide adalah teologi *inklusif*.⁸

Gambaran yang ditulis Syafi'i itu adalah relevansi dalam ikut menumbuhkan kembangkan pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI, yang datang dari seorang alumninya yang sangat berpengaruh, serta memiliki kompetensi dengan otoritas tinggi

⁶ Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru*, hlm. 175.

⁷ M. Syafi'i Anwar, "Sosiologi Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid", dalam *Ulumul Quran*, Nomor 1 Vol IV Th. 1993, hlm. 47.

⁸ M. Syafi'i Anwar, "Sosiologi Pembaharuan....." dalam *Ulumul Quran*, hlm. 47.

dalam bidang pemikiran di abad 20 dan 21. Pada kata pengantar, Nurcholish menyatakan bahwa setiap langkah melaksanakan ajaran Islam di Indonesia memperhitungkan kondisi sosial budaya yang ciri utamanya ialah *pertumbuhan, perkembangan, dan kemajemukan*. Sebagai konsekuensi dari realitas tersebut adalah bagaimana melaksanakan ajaran agama Islam dalam masyarakat ini terkait dengan masalah *kesadaran historis* tulis Nurcholish, yaitu kesadaran bahwa segala sesuatu mengenai tatanan hidup manusia ada sangkut pautnya dengan perbedaan zaman dan tempat.⁹ Dasar-dasar pemikiran seperti itu sangat kuat dalam ikut membentuk pemikiran dan pengertian pemikiran keislaman-keindonesiaan, dimana pemikiran tersebut banyak memasuki wacana pemikiran HMI, serta menjadi bahan acuan yang diminati para kader dan pengurus HMI.

Buku *kelima, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, oleh M. Syafi'i Anwar, (tahun 1995). Semula buku ini adalah tesis MA dari penulisnya pada Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta. Buku ini membuat pemetaan dan analisis politik terhadap format hubungan Islam dan birokrasi Orde Baru pada kurun waktu 1966-1993. Penulisnya berupaya mengungkapkan turun naiknya hubungan tersebut, *pertama*, periode awal Orde Baru tahun 1966 hingga 1970-an, yang mencerminkan pola hubungan hegemonik antara Islam dengan pemerintahan Orde Baru. *Kedua*, periode 1980-an, hubungan antara Islam dan birokrasi bersifat *resiprokal*, yakni suatu hubungan yang menjurus pada saling tumbuhnya pengertian timbal balik pemahaman di antara kedua belah pihak, yang dapat mempertemukan kepentingan masing-masing, sedang *ketiga*, dekade 1990-an, berkat artikulasi dan peranan cendekiawan Muslim di mana hubungan antara Islam dan Orde Baru menurut M. Syafi'i Anwar berkembang menjadi saling akomodatif. Hal ini ditandai semakin responsifnya birokrasi Orde Baru terhadap Islam, lalu diikuti berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) 4 Desember 1990.¹⁰

Selain pokok-pokok masalah tersebut, yang menarik adalah dua sub dari bab III buku itu, mengupas tentang tipologi pemikiran politik cendekiawan muslim yaitu *formalistik, substantivistik, transformatif, totalistik, idealistik, dan realistik*. Sub bab satunya membahas semua pokok dan wacana pemikiran politik cendekiawan Muslim dekade 1980-an, yakni tentang *Islam dan negara nasional, Islam dan ideologi Pancasila, integrasi keislaman dan kemodernan, Islam dan Demokrasi, dan Islam dan pluralisme*.¹¹ Materi dari dua sub bab itu, sangat relevan dan memiliki kontribusi dalam memberi pengertian terhadap masalah yang dibahas dalam disertasi ini, yakni pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI. Dalam bukunya ini, M. Syafi'i Anwar banyak menyerap dan mengambil rujukan terhadap pemikiran-pemikiran Nurcholis Madjid. M. Syafi'i Anwar juga membahas hal tersebut dalam tulisannya di *Jurnal Ulumul Quran* yang berjudul *Sosiologi Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*. Substansi tulisannya pada jurnal tersebut seperti *Islam dan Modernitas Bukan Penghadapan, Konsep Integrasi Keislaman dan Keindonesiaan, dan Teologi inklusif. Komitmen pada Pluralisme*.¹²

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, hlm. 1xi

¹⁰ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi*, hlm. ix.

¹¹ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi*, hlm. 143 s.d. 235.

¹² M. Syafi'i Anwar, "Sosiologi Pembaharuan Pemikiran....." dalam *Ulumul Quran* Nomor 1 Vol IV Th. 1993, hlm. 46.

Buku keenam, *Islam Agama Kemanusiaan*. Buku ini hasil karya Nurcholish Madjid, (tahun 1995). Sebagaimana buku yang lain, buku ketiga Nurcholish Madjid yang diterbitkan Paramadina merupakan kumpulan dari 14 tulisannya. Buku ini seperti tulisan Nurcholish yang lain, mainstreamnya tetap sama, yakni memperkenalkan ajaran Islam secara lebih *kemanusiaan, adil, inklusif, dan egaliter* yang didasari secara *strict* oleh *tauhid* dan *etika*, seperti diungkapkan pada pengantar editor. Juga diantarkan, bahwa urgensi buku ini sebagai upaya yang pas dan cocok sebagai gagasan pribumisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam, sehingga nilai-nilai Islam ini diharapkan dapat merasuk ke segala aspek kehidupan manusia Indonesia, agar kemudian bisa menciptakan visi ke depan yang lebih progresif dan percaya diri.¹³

Bagian pertama dari buku ini mengupas tentang Islam dan tradisi Islam di Indonesia, dengan sub bahasan antara lain, *Islam dan Negara, Pengalaman Mencari Titik Temu bagi Masyarakat Majemuk Indonesia, Potret Pemikiran Islam dalam Konteks Islam Universal Reorientasi Wawasan Pemikiran Keislaman Mencari Alternatif Bentuk Peran Tepat Umat Islam Indonesia abad ke-21*.¹⁴

Pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam wacana tersebut ikut memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran HMI, apalagi itu datang dari seorang alumni HMI semacam Nurcholish Madjid, yang boleh dikatakan bahwa pemikiran HMI identik dengan pemikiran Nurcholish dan pemikiran Nurcholish identik dengan pemikiran HMI.

Buku ketujuh, ditulis tokoh dan pemikir HMI Fachry Ali dengan judul *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*, (tahun 1996). Buku ini merupakan kumpulan tulisan sebanyak 99 buah. Diakui oleh penulisnya bahwa isi buku ini merupakan kepingan-kepingan refleksi yang berserakan di sana-sini. Berkaitan dengan studi ini, secara topikal ada beberapa judul yang relevan dengan pengembangan pemikiran-pemikiran HMI, seperti *Catatan untuk Cak Nur dan Pak Munawir, Akar Struktural Lahirnya Pemikiran Nasionalisme, Nasionalisme Indonesia, Islam dan Nasionalisme, Pancasila dan Perubahan Tradisi Politik di Indonesia, Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia, Perkembangan Negara, Masyarakat dan Kebhinekaan Kita, Ha Em Ie, Menguak Mitos HMI, dan Involusi dan Disartikulasi Pemikiran Islam di Indonesia*.¹⁵

Buku kedelapan, *Tradisi Islam Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*, ditulis Nurcholish Madjid (tahun 1997). Sebagaimana halnya beberapa buku Nurcholish, buku ini adalah kumpulan tulisan Cak Nur sebanyak 18 tulisan. Melihat isinya, buku ini juga menyimpan berbagai pemikiran yang berpengaruh terhadap pemikiran keislaman-keindonesiaan HMI, dengan melihat wacana yang tersimpan di dalamnya seperti *Masalah Kesenjangan Intelektual Dan Kultural, Mengembangkan Etos Keilmuan, Peta Pemikiran Islam Di Indonesia, Peran HMI dalam Perjuangan yang Proaktif, Peran Agama dalam Perubahan Masyarakat Indonesia yang Pluralistik*.¹⁶

¹³ Muhammad Wahyu Nafis, "Pengantar Editor" dalam Nurcholish Madjid, "Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, (Jakarta : Penerbit Paramadina, 1995), hlm. vi.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, hlm. 1 s.d. 90.

¹⁵ Fachry Ali, *Golongan Agama dan Etika Kekuasaan, Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia*, (Surabaya : Penerbit Risalah Gusti, 1996), hlm. viii-x.

¹⁶ Lihat daftar isi buku tersebut yang terdiri dari empat bagian

Lampiran 10

Kelahiran HMI 50 tahun yang lalu mencatat dengan tegas komitmen HMI terhadap umat dan bangsa. Hal ini nampak jelas dalam rumusan tujuan HMI pada saat kelahirannya, yakni : *pertama*, mempertahankan negara Republik Indonesia, dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia, *kedua*, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Rumusan tujuan tersebut menggambarkan bahwa sejak awal, HMI berbicara tentang Islam dan Indonesia sebagai satu kesatuan yang integral. Islam dan Indonesia adalah kenyataan sosio-kultural yang niscaya. Karena itu tidak boleh dipisahkan. Ini juga yang kemudian mendasari kepribadian HMI yang memadukan keislaman dan keindonesiaan dalam komitmennya. Bagi HMI memisahkan Islam dan Indonesia justru akan membelah visi, misi, komitmen dan kepribadiannya.

Kalau kita cermati, rumusan tujuan itu tegas-tegas menunjukkan komitmen kebangsaan HMI. Komitmen kebangsaan itu muncul dari tebalnya rasa wawasan kebangsaan HMI. Karena HMI sadar bahwa kelahiran dan perjuangan HMI bukan semata untuk martabat umat, tetapi juga bagi peningkatan derajat bangsa Indonesia.

HMI lahir pada konteks situasi kebangsaan, *nation – state* Indonesia yang belum dua tahun diproklamasikan harus berhadapan dengan ancaman kembalinya penjajah Belanda. Hal tersebut di atas menjelaskan bahwa kelahiran HMI membawa serta cita-cita besar tentang masa depan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian sebenarnya sejarah kelahiran HMI adalah keniscayaan bagi kepentingan umat Islam dan bangsa pada umumnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejarah HMI adalah bagian logis dari sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan. Memisahkan sejarah HMI dengan sejarah nasional kita bukan saja tidak mempunyai dasar historis tetapi juga bertentangan dengan fakta historis yang diukir oleh nilai-nilai dan suasana kebatinan ketika HMI lahir. HMI lahir dari kerangka aktualisasi nilai-nilai Islam. Islam dipahami dan ingin diaktualisasikan pada ruang sosial yang bernama Indonesia. Dari gambaran di atas tampak dengan jelas bahwa cita-cita besar yang dibawa HMI bagi bangsanya merupakan terjemahan dari kesadaran kebangsaan umat Islam. Sebagai mayoritas, maka problem yang dihadapi umat Islam secara otomatis adalah problem bangsa Indonesia secara keseluruhan. Konsekuensinya, kemajuan bangsa Indonesia akan terwujud apabila umat Islam mengalami kemajuan.¹

¹ Akbar Tanjung, "HMI, KAHMI dan Wawasan Kebangsaan", dalam Fachry Ali, (Pengantar), *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*, (Jakarta : Penerbit Majelis Nasional KAHMI, 1997), hlm. 151.

Lampiran 11 : Daftar khasanah HMI yang meliputi Buku-buku, Risalah Sarjana Muda, Skripsi, Tesis, dan Disertasi,¹

A. Buku

- Ali, Fachry, (pengantar), *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan, Menghadapi Pergantian Zaman*, (Jakarta : Majelis Nasional KAHMI, 1997)
- Anshary, E. Saifuddin, *Kritik atas Paham dan Gerakan "Pembaharuan" Drs. Nurcholish Madjid*, (Bandung Penerbit Bulan Sabit, 1973)
- Danandjadja, Utomo, (ed.), *Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Jakarta : Penerbit Islamic Research Centre, 1970)
- Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, *Kepribadian HMI*, (Yogyakarta, 1966)
- Departemen Kader PB HMI, *Sarasehan*, (Jakarta, 1975)
- Departemen Penerangan PB HMI, *Sekuntum Mawar*, (Jakarta, 1976)
- Effendi, Djohan dan Ismet Natsir, *Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 1981)
- Elvriadi, *Reformasi Langit*, (Pekanbaru : Penerbit HMI Cabang Pekanbaru, 1999)
- Fauzi HA, Muhammad dan Ade Komaruddin Mochammad, *HMI Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta : Penerbit PT. Gunung Kulabu, 1990)
- Haris, Misbah Soim, *Spiritualitas Sosial Untuk Masyarakat Beradab (Catatan Berserak di Era Otoritarianisme)*, (Yogyakarta : Penerbit Barokah Offset, 1999)
- HMI Cabang Samarinda, *Hijau Hitam Membangun*, (Samarinda, 1974)
- HMI Cabang Makasar, *Ijo Itam Berjuang*, (Makassar, 1966)
- HMI Cabang Yogyakarta, *Gerakan Mahasiswa '77 - '78 Antara Mitos dan Keharusan Sejarah*, (Yogyakarta, 1981)
- H.M. Yusuf Ramly, *50 tahun HMI Mengabdikan Republik*, (Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan Indonesia, 1997)
- Ikrar, Taruna, *HMI di Ambang Krisis, Menguji Vitalitas HMI*, (Jakarta : Penerbit Subeka Agung, 1999)
- KAHMI Majelis Wilayah Jawa Timur, *Orde Baru dan Visi Masa Depan, sebuah Remungan untuk Generasi Penerus*, (Surabaya, 1997)
- Koordinator Nasional KOHATI PB HMI, *Perspektif Wanita Indonesia dan KOHATI*, (Jakarta, 1976)
- KOHATI Cabang Yogyakarta, *Prospek Wanita Indonesia dan Peranan KOHATI dalam Mengisi Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta, 1972)
- _____, *Sebuah Tinjauan Perspektif Profil Kepemimpinan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta, 1980)
- Kurnia, Ahmad Doli, *Membongkar Mitos Kebesaran HMI*, (Jakarta : Penerbit HMI Publisher, 1999)
- Lematang, Tarmizi S, *Satu Episode dalam Kemelut HMI*, (Yogyakarta, 1983)
- Mauladi, Viva Yoga, *Kader Umat Kader Bangsa*, (Jakarta : Penerbit INTRANS, 1999)
- _____, *Menggapai Civil Society Harapan dan Prospek Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta : Penerbit INTRANS, 1999)
- Mubin, A. Halim, *Fragmen Lintasan Sejarah Perjuangan HMI Periode Yogyakarta* (Makasar : Penerbit HMI Badko Intim, 1970)

¹ Daftar Khasanah HMI tentang *Buku-Buku, Risalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi* tersebut di atas, ada dalam perpustakaan pribadi Agussalim Sitompul. Selain itu masih banyak risalah, skripsi, tesis, dan disertasi, belum dapat diperoleh semuanya.

- Muhammad, Mar'ie, *HMI – Perubahan – Globalisasi*, (Pidato dalam acara Peingatan Dies Natalis ke-49 HMI 5 Februari 1996), (Jakarta : 1996)
- Noer, Deliar, *Masalah Ulama Intelektual atau Intelektual Ulama suatu Tesis buat Generasi Muda Islam*, (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1974)
- _____, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa Otobiografi Deliar Noer*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1996)
- Pengurus Besar HMI, *Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP)*, (Jakarta, 1971)
- _____, *Nilai Identitas Kader (NIK)*, (Jakarta, 1986)
- _____, *HMI Sepanjang Jalan*, (Jakarta, 1975)
- _____, *Dies Natalis ke-43 HMI*, (Jakarta, 1990)
- _____, *Pandangan dan Komentar Tokoh Tentang HMI*, (Jakarta, 1994)
- _____, *Urgensi Reformasi bagi Pembangunan Bangsa yang Bermartabat*, (Pidato Dies Natalis ke-51 HMI di Graha Insan Cita, Depok, 22 Februari 1998, disampaikan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum), (Jakarta, 1998)
- _____, *Dari HMI untuk Kebersamaan Bangsa menuju Indonesia Baru*, (Pidato Dies Natalis ke-52 HMI di Auditorium Sapta Pesona Departemen Pariwisata Seni dan Budaya tanggal 5 Februari 1999, disampaikan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum), (Jakarta, 1999)
- _____, *Merajut Kekuatan Oposisi Mengembangkan Demokrasi Membangun Peradaban Baru Indonesia*, (Pidato Dies Ride HMI dalam Rangka Peringatan Dies Natalis ke-53 HMI di Taman Ismail Marzuki, tanggal 5 Februari 2000, disampaikan Ketua Umum PB HMI M. Fakhruddin), (Jakarta : PB HMI, 2000)
- Razak, Nasruddin, dkk., *Sejarah Perjuangan HMI*, (Yogyakarta : Penerbit Departemen Penerangan HMI Cabang Yogyakarta, 1966)
- Sabaruddin Amrullah dan Viva Yoga Mauladi, *HMI dalam Sorotan Pers, 50 Tahun HMI*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1997)
- Saidi, Ridwan, (ed.), *Biografi, Pemikiran, dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwihardjo Sosok Pejuang Muslim Misionalis dan Pendidik Kader-Kader Himpunan Mahasiswa Islam*, (Jakarta : Penerbit Lembaga Studi Informasi Pembangunan (LSIP), 1995)
- Siradj, A. Zacky, (Penyunting), *Kenangan 70 Tahun Achmad Tirtosudiro Profil Prajurit Pengabdian* (Jakarta : Penerbit Intermedia, 1992)
- Sirfeffa, Moksen Idris, dan M. Alfian Alfian M. (ed.), *Mencipta dan Mengabdikan Komitmen Nilai Islam untuk Masa Depan*, (Jakarta : Penerbit PB HMI, 1997)
- Sitompul, Agussalim, *Himpunan Mahasiswa Islam dan Pembangunan* (Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga), (Yogyakarta, 1976)
- _____, *Sejarah Perjuangan HMI 1947-1975*, (Surabaya, : Penerbit Bina Ilmu, 1976)
- _____, *HMI Dalam Pandangan Seorang Pendeta*, (Jakarta : Penerbit Gunung Agung, 1982)
- _____, *Citra HMI*, (Yogyakarta : Sumbangsih Offset, 1986)
- _____, *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Aditya Media, 1997)
- _____, *Historiografi Himpunan Mahasiswa Islam 1947-1993*, (Jakarta : Penerbit Untermasa, 1995)
- _____, (Editor) *Korps HMI-Wati dalam Sejarah 1966-1994*, (Jakarta : diterbitkan Kohati PB HMI, 1995)
- _____, (Editor) *HMI Mengayuh di antara Cita dan Kritik*, (Yogyakarta : Penerbit Aditya Media, 1997)
- _____, (ed.), *Kapita Selekta Aktivitas dan Pemikiran HMI*, (Yogyakarta : Penerbit Sumbangsih)

- Sitompul, Muhammad Saleh, dkk., (editor), *Insan Cita HMI Tantangan Era Kebangkitan Nasional Kedua*, (Pematangsiantar & Simalungun : Penerbit HMI Cabang Pematangsiantar & Simalungun, 1993)
- Sulastomo, *Hari-Hari Yang Panjang 1963-1966*, (Jakarta : Penrbit C.V. Masagung, 1989)
- Suharsono, *HMI Pemikiran & Masa Depan*, (Yogyakarta : Penerbit CIIS Press, 1997)
- Sutarto H.P. et al., *Kapita Selekta Latihan Kader I*, (Surakarta : Penerbit LPLK HMI Cabang Solo, 1997)
- Syafriel, Firsan Setiawan, *Menuju HMI Baru*, (Jakarta : Penerbit Jakarta, 1999)
- Tarmizi, S. Lematang, *Satu Episode dalam Kemelut HMI*, (Yogyakarta, 1983)
- Urbaningrum, Anas, *Menuju Masyarakat Madani Pilar dan Agenda Pembaruan*, (Jakarta : Penerbit Yarsif Watampone, 1997)
- _____, (Pengantar), *Menuju Masyarakat Cita : Refleksi Atas Persoalan-Persoalan Kebangsaan*, (Ambon : Penerbit Pengurus HMI Badko Maluku - Irian Jaya, 1999)

B. Risalah (untuk Sarjana Muda)

- Tarmizi S. Lematang, *Nilai-Nilai Mendidik yang Terkandung dalam Organisasi Pelajar dan Mahasiswa Islam*, (suatu studi terhadap PII dan HMI), (Risalah untuk memperoleh gelar Sarjana Muda dalam Ilmu Tarbiyah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga), (Yogyakarta, 1978)

C. Skripsi (untuk Strata 1, Drs, S.Ag.), berdasarkan urutan tahun

- Muhammad Mansur, *Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)*, (Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, di bawah bimbingan (d.b.) Dr.H.A. Mukti Ali), (Yogyakarta, 1971)
- Syamsir Salam, *Peranan HMI Cabang Yogyakarta dalam Kegiatan-Kegiatan Pendidikan*, (Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Tarbiyah pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga d.b. H. Husein Yahya), (Yogyakarta, 1972)
- Syaukani Bustami, *Partisipasi dalam Organisasi Suatu Studi HMI Cabang Yogyakarta*, (Skripsi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Sosial Politik dengan Spesialisasi Ilmu "Administrasi Negara" pada Fakultas Sosial Politik UGM Yogyakarta d.b. Drs. Usman Tampubolon), (Yogyakarta, 1975)
- Agussalim Sitompul, *Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dalam Pembangunan*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga d.b. Drs. Harith Abdoussalam dan Drs. Burhanuddin Daja), (Yogyakarta, 1976)
- Makmur Salim, *Studi Tentang Pemikiran HMI Terhadap Perjuangan Umat Islam dalam Menjawab Perkembangan Dunia Modern di Indonesia*, (Skripsi untuk mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya), (Surabaya, 1983)
- Sulhawi Rubba, *Studi tentang Peranan HMI dlaam Kegiatan Dakwah Islam di Surabaya*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Dakwah pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya) d.b. Drs. A.A.I. Dalimunthe, (Surabaya, 1985)
- Agus Mulyana, *Peranan HMI dalam Menghadapi PKI di Indonesia 1947-1966*, (skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Sejarah pada FP IPS IKIP Bandung d.b. Drs. H. Ismaun), (Bandung, 1990).

- Ahmad Haryono, *Studi Komparasi antara Mahasiswa Aktivistis dengan Mahasiswa Non Aktivistis Organisasi Ekstra Universitas terhadap Prestasi Belajar di IAIN Sunan Ampel Tulungagung tahun 1989*, d.b. Drs. H. Abdul Mujib, (Tulungagung, 1990)
- Ayub Hardiyanto, *Gerakan Protes Mahasiswa Jember Studi Kasus Konflik HMI dengan Utrecht 1964*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Jember d.b. Drs. Muhammad Hadi Sundoro), (Jember, 1991)
- Siti Orbani Bahagiawati, *Partisipasi HM dalam Penumpasan G 30 S/PKI tahun 1965-1966 di Solo*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana Kependidikan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pendidikan Sejarah pada FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta, d.b. Dra. Sutiyah), (Surakarta, 1992)
- Muhammad Nur H.I. Ibrahim, *HMI dalam Perspektif Sejarah Indonesia (tahun 1947-1965)*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Adab pada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) d.b. Drs. M. Mashur Amin), (Yogyakarta, 1992)
- Wakhirun, *Sikap Politik HMI terhadap G 30 S/PKI dalam Konstelasi Politik di Indonesia (Perspektif Fiqih Siyasah)*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, d.b. Drs. H. Zarkasyi Abdul Salam), (Yogyakarta, 1993)
- Pepen Supendi Almas, *Prilaku Politik Mahasiswa dalam HMI (Suatu Studi Komparatif antara aktivis dan non aktivis anggota HMI Cabang Jakarta)*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan pada FP IPS IKIP Jakarta d.m. Drs. Uheis M. Urip, S.H.), (Jakarta, 1995)
- Edi Masnur, *HMI Cabang Yogyakarta 1963-1965 di Tengah Arus Komunis*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra UGM Yogyakarta), (Yogyakarta, 1995)
- Novrida Gabena, *Persepsi Aktivistis Organisasi Intra Universitas Riau terhadap Eksistensi HMI Pasca Kongres HMI XIX di Pekanbaru*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Pekanbaru d.b. Drs. M. Johar Firdaus), (Pekanbaru, 1996)
- Muhammad Usman, *Perkembangan Pembaharuan Pemikiran Islam di HMI*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ushuluddin pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga d.b. Drs. H. Agussalim Sitompul), (Yogyakarta, 1996)
- M. Zakaria Ahmad, *Sikap Politik HMI terhadap Bahaya Laten Komunis dalam Konstelasi Politik di Indonesia (Analisis Hukum Islam)*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya d.b. H. Muchsin Mahfud, S.H.), (Surabaya, 1997)
- Nunuk Rijojo Adi, *Pembinaan Agama Islam terhadap Pedagang Asongan di Malioboro Yogyakarta oleh HMI Cabang Yogyakarta 1992-1996*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Dakwah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Masjid Syuhada (ST IDMS) Yogyakarta d.b. Drs. H. Agussalim Sitompul (Yogyakarta, 1997)
- Syafiqotul Zakiyah, *Korps HMI-Wati (KOHATI) tahun 1966-1971* (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 Agama dalam Ilmu Adab Jurusan SKI pada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga d.b. Drs. H. Mundzirin Yusuf), (Yogyakarta, 1997)
- Kholis Malik, *HMI dan Asas Tunggal Pancasila 1982-1986 (Telaah Kritis Terhadap Penerimaan Pancasila Sebagai Asas Organisasi)*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana program S-1 pada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Jurusan SKI d.b. Drs. H. Jahdan Ibnu Humam Saleh, M.S.), (Yogyakarta, 1997)

Sigit Kuartianto, *Konsep Perkaderan HMI Sebagai Proses Pendidikan Menuju Manusia Integratif* (suatu studi filsafat pendidikan), (skripsi untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta), d.b. Drs. Endang Zailani Sukaya), (Yogyakarta, 1997)

Amir, *Kelompok Cipayung (HMI, GMKI, PMKRI, GMNI, PMII) Peranannya Sebagai Gerakan Kebersamaan dan Pemikiran Organisasi Mahasiswa Ekstra Universitas Dalam Pembentukan KNPI (1973-1978)*, (skripsi untuk memperoleh gelar sarjana Jurusan Sejarah pada Universitas Pajajaran (UNPAD) Jatinangor), (Jatinangor, 1997)²

D. Tesis (Strata 2 Magister), berdasarkan urutan tahun

Hasanuddin M. Saleh, *Dinamika HMI dalam Isu Asas Tunggal Pancasila*, (tesis pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada untuk memperoleh gelar Magister Sains d.b. Dr.M. Yahya Muhaimin), (Yogyakarta, 1996)

Tesis ini sudah diterbitkan dengan Perubahan Judul sehingga menjadi *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 1996)

Muhammad Rusli Karim, *Modernisasi Politik di Indonesia : Satu Kajian Mengenai Peran Islam dan HMI MPO*, (Tesis yang dikemukakan untuk memperoleh Ijazah Sarjana Sastra pada Fakultas Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia), (Kualalumpur, 1995).

Tesis ini sudah diterbitkan dengan judul yang sudah ditambah menjadi *HMI MPO Dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mizan, 1997)

E. Disertasi (Strata 3 – Doctor of Philosophy) berdasarkan urutan tahun

Victor Emanuel Tanja, *Himpunan Mahasiswa Islam (Islamic Student's Association and Its History Place Among Moslem Reformis Movement In Indonesia*, (tesis Submitted to the Faculty of The Harford Seminary Foundation in Partial Fulfillment of The Requirements For Tthe Degree of Doctor of Philosophy), (Harford, Connecticut, 1979).

Disertasi ini sudah diterjemahkan oleh Saudara Hersri ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Himpunan Mahasiswa Islam Sejarah dan Kedudukannya di Tengah-Tengah Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1982)

Saifullah SA, *Konsep Nasionalisme HMI Sebagaimana Tercermin Dalam Pidato Dies dan Penerapannya Dalam Gerakan Angkatan '66*, (Disertasi diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk memperoleh gelar Doctor dalam Ilmu Agama Islam d.b. Prof. Dr. Harun Nasution dan Prof.Dr. Mulyanto Sumardi), (Jakarta, 1994)

² Daftar khasanah HMI tentang *Risalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Dokumen* yang disebutkan di atas semua ada dalam Perpustakaan pribadi Drs.H. Agussalim Sitompul. Masih banyak Risalah dan skripsi yang sudah selesai ditulis beberapa orang peneliti belum dapat diperoleh.

Lampiran 12 : Sambutan Ketua Umum PB HMI M. Yahya Zaini pada Upacara Peresmian Pembukaan Kongres ke-20 HMI di Istana Negara Jakarta tanggal 21 Januari 1995

Assalamu'alaikum

Yang terhormat, Presiden RI, Bapak H. Muhammad Soeharto

Yang terhormat, Para Menteri Kabiner Pembangunan VI

Para peserta kongres, tamu undangan, alumni HMI dan segenap anggota HMI yang berbahagia

Puji syukur marilah kita panjatkan terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Yang dengan rahmat itu kita masih tetap mempunyai kekuatan untuk terus meningkatkan pembangunan nasional. Shalawat dan salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan risalah suci kepada kita, yang dengan itu kita mampu menempatkan pembangunan nasional kita yang khas. Perlu kami sampaikan bahwa yang hadir di acara pembukaan ini adalah segenap Pengurus Besar HMI anggota MPK (Majelis Pekerja Kongres), utusan dari cabang dan Badko dari seluruh Indonesia, alumni HMI dan para undangan lainnya.

Berbesar hati karena Kongres ke-20 ini memiliki makna strategis. *Pertama*, karena tegaknya Orde Baru selama 25 tahun pertama dan sedang mengawali pembangunan jangka panjang tahap kedua, sehingga kongres ini diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang lebih bermanfaat, bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. *Kedua*, semenjak orde baru lahir baru pertama kali ini Kongres dibuka Presiden. HMI sebagai eksponen orde baru melihat kesediaan Presiden untuk membuka acara ini sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap kiprah dan perjuangan HMI. Jarih payah HMI yang terus gigih dan konsisten membina sumber daya manusia melalui aktifitas perkaderannya, ternyata tidak sia-sia. Banyak sudah kader-kader terbaik yang lahir dari kandungan HMI. Mereka mengabdikan dalam berbagai jalur dan profesi di masyarakat, mulai yang birokrat, cendekiawan, politisi, profesional dan adapula yang dengan tulus ikhlas mengabdikan dirinya menjadi pekerja sosial, membina masyarakat terasing di daerah-daerah pedalaman. Selebihnya, berkenannya Bapak Presiden untuk membuka kongres ini menunjukkan betapa perhatian pemerintah begitu besar terhadap HMI. Dengan perhatian itu kita bertekad untuk lebih memantapkan kerja-kerja organisasi untuk melahirkan kader-kader HMI sebagai sumber-sumber insani pembangunan bangsa yang berkualitas. Kita juga terus bertekad tetap merawat komitmen, konsistensi dan vitalitas idealisme untuk berjuang menegakkan amanat penderitaan rakyat. Tegaknya amanat penderitaan rakyat tersebut bagi HMI merupakan bagian terpisahkan dari kiprah HMI di tengah masyarakatnya. Sejak awal berdirinya, yaitu pada tanggal 5 Februari 1947 komitmen HMI terhadap amanat penderitaan rakyat dengan jelas telah terpatri dalam rumusan tujuannya, yaitu :

1. Mempertahankan kemerdekaan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia
2. Menegakkan dan mengembangkan syiar Islam

Rumusan tujuan tersebut secara tegas memprioritaskan aktivitas dan kiprah HMI yang tidak terbatas pada kegiatan yang mendidik mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan,

penghayatan dan wawasan keagamaannya. Karena situasi politik pada waktu itu memanggil HMI untuk ikut melibatkan diri dalam kancah perjuangan fisik melawan penjajah. Dengan demikian, sejak awal, keberadaan dan kerja-kerja HMI mencerminkan keutuhan dimensi kebangsaan, keislaman dan kemahasiswaan. Keutuhan ketiga dimensi tersebut selalu menjadi pegangan gerak dan parameter keberhasilan aktivitas organisasi, sampai hari ini dan seterusnya.

Bapak Presiden dan hadirin sekalian,

Dimensi kebangsaan memberikan pelajaran bahwa HMI merupakan bagian integral logis dari bangsa Indonesia, maka menjadi tugas dan kewajiban HMI untuk ikut menegakkan dan mengisi dinamika negara kesatuan RI. Negara Kesatuan RI adalah merupakan bejtuik final dari tatanan kenegaraan kita. Siapapun yang ingin mengganggu eksistensi dan keutuhan negara kesatuan RI akan berhadapan dengan eksponen-eksponen yang setia terhadap keutuhan negara RI, termasuk HMI. HMI tetap berdiri teguh di jalan konstitusi, sehingga tidak ada lagi tempat untuk memperoalkan eksistensi negara kesatuan RI. Saat ini mempersoalkan eksistensi negara berarti langkah mundur. Justru yang mesti dilakukan adalah bagaimana mensubstansi pembangunan dengan hal-hal yang positif dan konstruktif.

Dimensi kedua adalah dimensi keislaman. Sebagai organisasi mahasiswa yang bernafaskan Islam, HMI bertanggung jawab untuk mendirikan kader-kadernya agar mereka memiliki integritas moral, akhlak yang baik dan berkepribadian. Manifestasi ajaran Islam itu tercermin dari dinamika pemikiran keagamaan HMI yang selama orde baru ini turut memperkaya khasanah pemikiran Islam di Indonesia. Kajian-kajian mengenai masalah Islam dan kenegaraan, Islam dan modernisasi, Islam dan pembangunan, Islam dan kemanusiaan, dan modernisasi, Islam dan pembangunan, Islam dan kemanusiaan, Islam dan keadilan merupakan agenda yang selalu mendapat perhatian serius dari kader-kader HMI. Kajian-kajian tersebut bukan semata-mata ingin memperkaya wawasan dan memperluas pandangan tetapi kita menginginkan suatu pemahaman dan pengamalan keagamaan yang ramah, terbuka, dan kritis. Dengan demikian agama diharapkan dapat menjadi sumber etos bangsa dalam mencapai kemajuan. Inilah spritualitas baru yang akan mempertemukan dimensi kedalaman agama dengan persoalan riil masyarakat dan bangsa kita. Yakni bagaimana memposisikan agama sebagai resep bagi penyelesaian problem-problem kemanusiaan.

Dimensi ketiga adalah kemahasiswaan. Sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang berbasis mahasiswa HMI mempunyai karakteristik yang khas. Dengan basis tersebut HMI mempunyai posisi yang strategis, karena ia berada di tengah-tengah masyarakat ilmiah, yang bebas dan kritis. Posisi tersebut akan menjadi potensi yang luar biasa apabila anggota dapat dikembangkan dengan baik sehingga mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin yang handal di masa depan. Oleh karena itu kita selalu memprioritaskan program pembinaan anggota sebagai prioritas utama dalam setiap periode kepengurusan, rutin dan konsisten kita yakin mampu menjawab tantangan kepemimpinan yang semakin kompleks.

Hadirin yang kami muliakan,

Kita sadar persis bahwa letak kekuatan HMI adalah pada sisi intelektualitas ini. Intelektualitas bagi HMI adalah bekal dan piranti untuk membaca wajah masyarakat, sekaligus bagaimana menawarkan pemikiran-pemikiran alternatif bagi kemajuannya. Intelektualitas HMI adalah kesadaran etik akademis yang diberi ruh idealisme dan semangat kedalaman keislaman.

Sebagai organisasi kemasyarakatan di tengah ormas lain dan organisasi politik, HMI telah sejak lama mempertegas keberadaannya melalui sebuah konsep yang disebut independensi. Yakni HMI memiliki independensi etis dan organisatoris. Independensi etis berarti HMI hanya beriprah kepada hakekat kemanusiaan yang selalu cenderung kepada kebenaran. Sedang independensi organisatoris berarti secara organisatoris HMI akan selalu aktif berkiprah dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tanpa harus terikat/underbouw terhadap kekuatan sosial politik manapun.

Dengan independensi tersebut bukan berarti HMI tidak punya sikap dan netral. Tetapi justru semakin memberikan keleluasaan pada HMI untuk berkiprah dalam berbagai medan perjuangan. Selama ini kita juga telah membuktikan bahwa HMI secara serius dan terus menerus melaksanakan pembinaan kadernya melalui training-training, aksi sosial dan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut di samping ingin membangun watak dan kepribadian tetapi juga untuk membekali mereka dengan kemampuan kepemimpinan dan penghayatan rasa kerakyatan.

Konsepsi mengenai independensi tersebut pada situasi dan kondisi saat ini sungguh terasa makin relevan. Relevansi itu sejalan dengan peningkatan kualitas hidup yang menyadarkan bangsa ini akan keberadaannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Bangsa kita telah semakin kritis, sehingga menuntut agar diberi peranan yang lebih besar di dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Ini adalah produk dari pembangunan, dan karena itu musti terus diakomodir dalam proses pembangunan itu sendiri. Tanpa kejelian untuk menangkap gertak aspirasi dan perubahan itu, maka justru akan memunculkan limbah pembangunan yang bersifat konter produktif. Tentu ini tidak kita harapkan.

Yang menurut HMI patut diperhatikan adalah perkembangan yang kurang seimbang antara pembangunan ekonomi dan politik. Perkembangan mengesankan di bidang ekonomi kurang diikuti oleh bidang politik. Bukan kita ingin menyatakan bahwa kehidupan politik selama orde baru justru memperlihatkan kemampuannya untuk secara nyata berhasil menciptakan stabilitas sehingga memungkinkan kita untuk hidup secara damai dan terus dapat membangun. Keberhasilan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar seperti bahaya disintegrasi, pertentangan ideologi maupun berbagai produk politik yang makin memperkokoh bangunan kenegaraan kita tentu harus kita syukuri. Akan tetapi sebagai bagian dari masyarakat kita masih merasakan bahwa tingkat perubahan-perubahan di bidang politik tidaklah sebanding dengan apa yang terjadi di bidang ekonomi.

Dalam perspektif pembangunan politik kita, institusi-institusi politik atau badan-badan demokrasi belum maksimal memainkan fungsi dan perannya. Akibatnya, aspirasi masyarakat masih sering tersumber. Kondisi inilah yang menuntut kita, pemerintah dan masyarakat untuk terus menggelindangkan proses demokratisasi dengan bingkai nilai-nilai Pancasila. Negara yang kuat dan kokoh adalah tuntutan negara modern. Tetapi ini

harus diikuti oleh pemberdayaan masyarakat. Dalam suasana demikian, proses saling kontrol akan terbangun. Dinamika saling kontrol inilah yang akan menjadi energi bagi pembangunan nasional kita.

Bapak Presiden dan hadirin sekalian.

Menghadapi perkembangan masyarakat yang demikian, diperlukan pengertian & perubahan, dalam kehidupan politik kita karena perkembangan masyarakat telah memungkinkan untuk itu.

Hanya saja kita ingin menegaskan bahwa aspirasi dan proses pembaharuan itu semata-mata harus diarahkan untuk semakin mendewasakan bangunan sistem politik kita. Kita tidak menghendaki perubahan untuk perubahan, yang hanya dimanfaatkan untuk kepentingan dan nafsu politik jangka pendek. Di sinilah HMI yang independen makin terasa relevansinya. Dengan sifat independensi tersebut kita tidak mudah terseret oleh tarikan kepentingan politik sesaat itu. Kita akan tegak sebagai moral force yang tetap menempatkan gagasan-gagasan dan proses pembaharuan sebagai upaya kritis untuk lebih mengembangkan dan mendewasakan sistem politik. Demokrasi bukan untuk demokrasi. Demokrasi adalah untuk melempangkan jalan bagi terwujudnya tujuan nasional.

Pendewasaan sistem harus dimulai dari langkah-langkah untuk kembali menata kehidupan politik yang selaras dengan doktrin dan falsafah bangsa kita sebagai bangsa yang menghargai nilai-nilai keluhuran, adiluhung sudah seharusnya kita menempatkan pembaharuan itu dalam suatu bingkai etika yang kokoh. Di depan kita dihadapkan pada tantangan yang makin kompleks sebagai akibat pertumbuhan penduduk, masalah lingkungan, lapangan kerja, tuntutan HAM dan peningkatan kualitas demokrasi. Semua tantangan itu tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana secara sistemik bisa mengelola persoalan-persoalan itu, tanpa kehilangan arah orientasi dan jatidiri. Selain itu, kita melihat *masih banyak distorsi dalam proses membangun. Gejala penyalahgunaan kekuasaan, kesewenang-wenangan, praktek kolusi* adalah cerminan tidak berfungsinya sistem nilai yang menjadi kontrol dan landasan etik dari bekerjanya suatu sistem.

Itulah sebabnya mengapa kita wajib untuk melakukan refleksi kritis. Bagi HMI hal tersebut muncul lantaran meminggirnya etika dalam proses bermasyarakat dan berbangsa kita. Etik musti dikembalikan peran sentralnya sebagai bagian dasar kesadaran gerak dalam dinamika ekonomi, politik maupun sosial budaya. Belajar dari pengalaman banyak negara, terbukti bahwa etika yang kuat akan melahirkan etos dan spirit untuk mencapai kemajuan. Kemajuan dengan sekecil mungkin masalah kemanusiaan.

Etik diperlukan guna mengembangkan kehidupan sosial rakyat yang lebih adil dan demokratis, sedangkan etos berfungsi untuk menggerakkan rakyat dalam mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang kehidupan sosial. Kesenjangan-kesenjangan sosial yang disebabkan oleh strategi pembangunan yang cenderung menguntungkan sebagian kecil golongan sosial.

Atau dalam perspektif kajian keagamaan, mendesak dikembangkan wacana-wacana yang memberi perhatian kepada golongan *dhuafa* (lemah dalam ekonomi politik, budaya) dan *mustadh'afin* (golongan tersisih dari proses pembangunan). Kita harus memulai untuk mengembangkan etika dengan secara lugas dan berani dalam proses transformasi keagamaan menuju terbentuknya tatanan kehidupan sosial yang egaliter, adil, demokratis dan emansipatif.

Dengan itu, kita ingin mengintrodusir bagaimana pentingnya pemimpin punya etika, politisi punya etika, pengusaha punya etika, rakyat punya etika, buruh punya etika, dan seterusnya. Kalau sudah demikian, maka proses kehidupan masyarakat kita, perjalanan nilai-nilai kemanusiaan. Di siinlah akan terbangun masyarakat yang dinamis tapi damai, penuh persaudaraan.

Itu yang kita dambakan selama ini. Dan itu yang akan kita perjuangkan bersama.

Demikian sambutan saya, semoga bisa menjadi bahan renungan dan masukan bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

Kepada Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak H. Muhammad Soeharto, kami mohonkan sambutan dan pengarahan, serta sekaligus meresmikan upacara pembukaan Kongres HMI ke-20 ini. Terima kasih.

Billahittaufig Wal Hidayah,
Wassalamu;alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Januari 1995
Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam

M. Yahya Zaini
Ketua Umum

EMPAT UPAYA TERPADU UNTUK MEMPERTAJAM VISI DAN MISI HMI DI MASA DEPAN

Oleh : Muhammad Yahya Zaini

Sejarah perjalanan HMI telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, dengan berbagai pengalaman pahit-manis, suka-duka serta pasang surut perjuangan. Kemampuannya menanggulangi berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi telah mengantarkannya tumbuh secara dewasa hingga hari ini. Kehadirannya tidak hanya dirasakan bermanfaat bagi anggota dan pengurusnya, bagi dirinya sendiri, melainkan telah memberikan andil yang besar bagi kemajuan masyarakat dan bangsanya. HMI telah menjadi bagian yang menyatu dengan masyarakat dan bangsanya. Karena itu dinamika HMI tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kemasyarakatan dan kebangsaan. Demikian pula saat ini, dimana bangsa Indonesia baru saja memasuki suatu babak baru dalam gerak pembangunannya, yaitu era PJP II, yang dimaksudkan sebagai era kebangkitan nasional kedua. Kita sepakat bahwa masa transisi seperti ini merupakan masa yang penuh dengan berbagai perubahan nilai dan kepentingan, sekaligus menghajatkan adanya kesiapan yang sungguh-sungguh dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya kesiapan sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari komponen bangsa, HMI juga tidak akan terlepas dengan berbagai tantangan tersebut. Karena itu dituntut adanya daya analisis yang tajam dan daya antisipasi yang tinggi dalam setiap langkah dan kiprahnya. Masa transisi tersebut bersamaan dengan masa transformasi bangsa Indonesia yang sedang berupaya melakukan adjusmentasi dalam segenap tatanan kehidupan masyarakat dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industri modern dan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Situasi kritis seperti ini niscaya akan melahirkan berbagai permasalahan dan persoalan mendasar. Hal ini juga akan menyentuh bagian-bagian fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Munculnya isu arus bawah, maraknya aksi mahasiswa di berbagai kota, derasnya tuntutan terhadap implementasi hak-hak azasi manusia, kuatnya aspirasi demokratisasi dan harapan terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa; merupakan beberapa permasalahan yang senantiasa menuntut perhatian HMI. Disini HMI dengan segala potensi yang dimiliki dituntut untuk proaktif agar mampu menghele perubahan.

Sementara secara mikro, HMI masih dihadapkan pada tantangan dan kendala internal yang sedikit banyak dapat mengganggu kinerja organisasi dalam menghadapi situasi eksternal yang kian berubah dengan cepat. Sampai saat ini, HMI masih terlihat bergelut dengan sejumlah konflik dan friksi antar intern aparatnya. Dirasakan adanya penurunan militansi dan idealisme anggota, sistem perkaderan yang masih cenderung konvensional. Hal ini berimplikasi terhadap lambannya HMI merespon berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi. Dalam situasi demikian, HMI harus melakukan penataan sistematis dan organisasional terhadap kondisi internalnya, agar ia dapat lebih responsif, adaptif dan adaptif terhadap perkembangan eksternal.

Perkembangan eksternal dan internal tersebut, senantiasa menampilkan problem dan perubahan-perubahan. Dalam konteks ini, HMI perlu menentukan sikap dan wawasan terhadap perubahan tersebut, agar tidak terjebak dan terjerumus ke dalam sikap dan wawasan "perubahan untuk perubahan", dalam arti melakukan perubahan sekedar asal berubah, tanpa ditopang oleh landasan dan arah yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalannya sekarang adalah: bagaimana upaya yang mesti dilakukan HMI untuk dapat mengikuti, menghadapi dan mendayagunakan perubahan tersebut bagi kepentingan HMI, masyarakat, bangsa dan negara, dengan tetap bertumpu secara teguh di atas landasan perjuangan organisasi, serta tetap konsisten pada arah, cita-cita dan tujuan HMI, khususnya, dan tujuan bangsa umumnya, tanpa harus tercerabut dari akar kepribadian, identitas dan jati diri HMI.

Jawaban terhadap permasalahan tersebut adalah bahwa HMI dituntut untuk secara terus menerus melakukan revitalisasi, reaktualisasi, refungsionalisasi dan bahkan restrukturisasi, secara terpadu, kreatif, luwes, dinamis dan antisipatif, terhadap nilai-nilai dasar, eksistensi, visi dan misi organisasi, dalam rangka mendorong peran HMI untuk menciptakan dan mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang maju, adil dan makmur di bawah naungan ridho Allah SWT. (pasal 5 AD HMI).

Revitalisasi

Dengan revitalisasi tidaklah berarti bahwa HMI telah kehilangan inti daya energi vitalitas eksistensi, visi dan misi, melainkan justru merupakan perwujudan dari tekad secara sadar

dan bertanggung jawab, yang disertai oleh keyakinan yang mendasar, untuk terus melanjutkan pilihan sejarahnya sesuai cita dan tujuan organisasi. Melakukan upaya revitalisasi berarti meyakini dan menyadari, sedalam-dalamnya bahwa, keluarga besar HMI, secara bersama-sama mengemban tugas luhur dan mulia, untuk mengaktualisasikan eksistensi, visi dan misi HMI. Dan tugas mulia dan luhur ini, dibentuk oleh inti daya hidup yang membentuk jati diri HMI sebagai kader dan organisasi, dengan ciri ke-Islaman, ke-Indonesianan dan ke-Mahasiswaan. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan upaya terus memperkukuh kualitas komitmen kreatif HMI kepada nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesianan. Ini merupakan kunci jawaban yang sangat mendasar, terutama karena HMI sebagai organisasi telah merasakan, mengalami dan bahkan telah diuji oleh sejarah, sehingga HMI menjadi semakin yakin bahwa dalam suatu masyarakat Indonesia yang pluralistik, maka harmonisasi komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesianan adalah merupakan pilihan terbaik organisasi.

Tanpa proses revitalisasi terhadap eksistensi, visi, doktrin dan misi HMI secara sadar dan bertanggung jawab, perjalanan HMI di masa mendatang akan menjadi surut dan bahkan lumpuh, karena ketiadaan energi vitalisasi yang membentuk serta menopang gerak hidup dan kehidupan HMI. Tanpa komitmen yang utuh dan padu terhadap nilai ke-Islaman dan ke-Indonesianan, maka punahlah keberadaan HMI. Kesadaran bahwa upaya revitalisasi terhadap eksistensi, visi, doktrin dan misi HMI tersebut, akan membawa HMI ke arah proses refleksi yang kritis dan kreatif. Proses ini kemudian sangat diperlukan guna memberikan kualitas basis pemecahan persoalan secara lebih kuat dan akomodatif, dalam lingkup pemikiran dan wawasan yang utuh, padu dan komprehensif.

Reaktualisasi

Sebagaimana halnya dengan revitalisasi, maka upaya reaktualisasi tidak berarti bahwa HMI telah tidak mampu lagi mengaktualisasikan eksistensi, visi, doktrin dan misi HMI, dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi. Reaktualisasi dalam hal ini dipahami sebagai upaya untuk melanjutkan, mendinamisasikan dan menumbuhkembangkan penghayatan dan pengalaman HMI terhadap nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesianan, secara utuh, padu, harmonis dan menyeluruh. Reaktualisasi menuntut dimilikinya suatu kemampuan yang mumpuni dalam melakukan interpretasi dinamis dan kreatif secara terus menerus atas jati diri HMI, sebagai bagian dari upaya melanjutkan kelangsungan hidup organisasi. Melalui reaktualisasi inilah, HMI berupaya menjaga kelangsungan eksistensi, visi, idealisme dan misi organisasi, dan sekaligus berupaya meningkatkan peran, kualitas, harkat, martabat dan citra HMI dalam arus perubahan zaman. Karena itulah, interaksi yang positif, kreatif, dinamis dan inovatif harus pula dilaksanakan secara sistematis dan konsisten, di dalam semangat kebersamaan yang utuh, terpadu dan menyeluruh.

Tanpa adanya proses aktualisasi dan reaktualisasi di dalam kehidupan organisasi, maka niscaya akan terjadi kelambanan dan bahkan mungkin kemandegan eksistensial. Akibatnya, HMI tidak akan mampu melahirkan kreasi baru, serta memberikan respon baru kepada kebutuhan dan tantangan perjuangan yang terus menerus berubah. Ini artinya, inti daya energi vitalisasi HMI akan kehilangan makna dan kekuatannya. Dan adalah suatu imperatif yang logis dan konsekuen, bahwa aktualisasi dan reaktualisasi ini harus bermuara kepada upaya untuk menciptakan tata kehidupan organisasi yang Islam, emansipatif, egaliter dan demokratis. Dalam perspektif ini, maka adanya tuntutan untuk mengkaji kembali NIK dan sistem Perkaderan HMI, seyogyanya disambut baik oleh segenap warga HMI dengan upaya-upaya intelektual dan konseptual yang bisa dipertanggungjawabkan.

Refungsionalisasi

Refungsionalisasi tidak berarti bahwa saat ini telah terjadi kerusakan terhadap sistem atau pun mandegnya gerak HMI yang disebabkan oleh struktur organisasi telah mengalami disfungsi secara total. Upaya refungsionalisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai keharusan kreatif dan terus menerus guna mengembangkan struktur dan fungsi-fungsi organisasi, untuk mendukung dan menopang proses aktualisasi dan reaktualisasi sistem kehidupan organisasi di semua aspeknya, dalam rangka pengembangan peran dan fungsi organisasi itu sendiri.

Berbicara mengenai fungsionalisasi dan refungsionalisasi struktur ini, sebenarnya kita sedang memperbincangkan sistem organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini yang berkenaan dengan pola dasar, dimana pasal-pasal yang terdapat di dalam AD/ART serta Pedoman Himpunan lainnya, telah cukup memberikan acuan, mengenai bangun struktur serta fungsi-fungsi dasar organisasi HMI. Dengan demikian, untuk memberikan nafas baru, atau daya gerak baru agar daya gerak organisasi bisa luwes, adaptif dan antisipatif terhadap perubahan yang sedang berkembang, maka upaya refungsionalisasi

merupakan suatu langkah strategis. Karena upaya ini pada intinya ingin mengembalikan dan mengembangkan lebih lanjut fungsi-fungsi organisasi, yang karena pengaruh ruang dan waktu mengalami bias atau distorsi dalam implementasinya. Adanya gugatan terhadap kurang berfungsinya Lembaga Kekaryaan, terjadinya penyimpangan fungsi-fungsi organisasi dari level teratas sampai ke bawah, sehingga tidak memunculkan gerak organisasi yang sinergik dan sistematis. Benturan visi dan kepentingan antar level organisasi, misalnya terjadinya konflik Komisarariat dengan Cabang, Cabang dengan Badko atau Badko dengan PB HMI, karena kaburnya fungsi antar tingkatan tersebut, merupakan isyarat bahwa upaya refungsionalisasi organisasi dalam berbagai tingkatan merupakan suatu keniscayaan. Karena tanpa upaya refungsionalisasi ini, berarti kita tetap membiarkan terjadinya praktik-praktek disfungsi para aparat HMI pada berbagai level, yang akan berakibat terjadinya disorientasi dan penyimpangan terhadap eksistensi, visi dan misi organisasi HMI secara keseluruhan.

Restrukturisasi

Eksistensi manusia di dalam perjalanan sejarah, selalu diwarnai pergumulan dan perjuangannya menghadapi perubahan alam dan zaman. Dalam perspektif ini, manusia senantiasa secara kreatif menciptakan struktur dan fungsi-fungsi tertentu, sehingga dengan demikian eksistensinya dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu sistem yang organik. Disini struktur dan fungsi tersebut harus menjadi pendukung gerak dan proses dengan aktualisasi yang selalu berkembang dan berubah. Kadang-kadang sistem tetap dipertahankan, namun ada kalanya, harus disempurnakan dan diperbaharui. Kalau dibutuhkan, struktur dan fungsi dapat dirombak, agar ia lebih adaptif, antisipatif dan dinamis dalam menjawab tantangan zaman.

Kondisi inipun berlaku bagi HMI. Struktur organisasi yang digunakan selama ini, tidak ubahnya seperti struktur organisasi politik. Fenomena yang terjadi seperti konflik dan friksi di kalangan pengurus, dominannya orientasi politik dan orientasi ke atas, adanya tuntutan terhadap pemekaran Badko-Badko HMI dengan otonomi yang lebih besar serta kurangnya popularitas dan wibawa struktur-struktur fungsional, semisal Lembaga Kekaryaan—sehingga pernah memunculkan gagasan untuk membentuk konsorsium—, merupakan akibat konsekuensial dari masih berlakunya struktur organisasi yang sangat vertikal. Fenomena ini identik dengan apa yang terjadi di organisasi politik. Oleh jadi, situasi inilah yang membuat HMI selalu berjalan di tempat tanpa bisa melakukan perubahan yang signifikan. Pada titik ini harus muncul keberanian melakukan langkah restrukturisasi terhadap seluruh komponen sistem organisasi HMI. Karena bercermim dari kondisi di atas, secara jujur harus diakui bahwa struktur organisasi HMI belumlah mencerminkan struktur organisasi kader yang ideal.

Upaya pencarian model dan sistem manajemen organisasi yang lebih relevan dengan fungsi organisasi HMI sebagai organisasi kader, kini terasa semakin mendesak dan membutuhkan semangat dan tekad yang sungguh-sungguh. Munculnya konsep model organisasi matriks, umpamanya, bisa kita jadikan alat banding terhadap model dan struktur organisasi yang kita kenal selama ini, seperti struktur organisasi garis, fungsional, garis dan fungsional ataupun garis dan staf. Pilihan terhadap struktur organisasi yang paling relevan dengan fungsi organisasi HMI, niscaya sangat berpengaruh terhadap suasana, orientasi dan pola interaksi kader HMI di masa-masa yang akan datang. Gagasan restrukturisasi ini tidak dimaksudkan untuk merombak secara total sehingga sama sekali baru, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian struktural, tanpa menghilangkan identitas, jati diri dan citra HMI.

Penutup

Demikianlah gambaran singkat tentang empat upaya terpadu yang mesti dilakukan HMI dalam rangka menumbuhkembangkan eksistensi, visi dan misi HMI di tengah-tengah dinamika kehidupan mahasiswa, pemuda, masyarakat dan bangsanya. Dari paparan di atas, jelas terlihat eratnya hubungan antara pengembangan eksistensi, visi dan misi HMI dengan upaya revitalisasi, reaktualisasi, refungsionalisasi dan restrukturisasi organisasi yang harus dilakukan secara terus menerus tanpa henti.

Kongres News; terbit setiap minggu.
Media informasi Kongres HMI Ke-20
menerima konsep pemikiran dari seluruh
instansi dan pengurus HMI di semua tingkatan.
Sumbangkan pikiran anda untuk
"Kongres Berkualitas", maks. 4 (empat)
halaman kuarto.

-News Team-

Menegakkan Khittah

Perjuangan dan Visi HMI

Anas Urbaningrum

Ketua Umum Pengurus Besar
Himpunan Mahasiswa Islam

Momentum Kongres HMI ke-21 di Yogyakarta memiliki makna historis dan futuristik, yang penting untuk dicatat. Ditilik dari kacamata sosiologis, posisi sosial HMI kini sedang tinggi. Ini lantaran ia ditopang pilar-pilar yang kokoh, salah satunya berupa kiprah dan peran para alumninya.

Namun ironisnya, gemerlap prestasi sosial itu justru diikuti menurunnya gradasi HMI, pada pelbagai dimensinya. Saat ini, HMI tengah gencar-gencarnya menerima kritik. Pelbagai ragam kritik itu, jika disarikan akan mengerucut pada tiga hal. *Pertama*, macetnya proses reproduksi intelektual; *kedua*, menipisnya kritisisme; dan *ketiga*, munculnya krisis nilai (Islam) dalam dinamika empirik organisasi.

Beriringan dengan gencarnya kritik itu, HMI juga masih disibukkan oleh persoalan klasik di seputar pelaksanaan perkaderan, konflik intern organisasi, dan sebagainya. Juga dengan tuntutan lingkungan strategis di masa depan, khususnya kompetisi kualitas sumberdaya manusia dan tantangan sektor ekonomi dalam era perdagangan bebas.

Oleh karena itu, dibutuhkan terapi yang tepat guna memulihkan kredibilitas HMI dalam peraturan-peraturan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, yang selaras dengan semangat zaman. Berikut kami paparkan visi HMI dua tahun ke depan, yang perlu disahuti kader HMI agar organisasi ini senantiasa solid menghadapi tantangan zaman yang terus bergejolak itu.

Politik etis HMI

Para aktivis HMI, tak boleh terjebak secara psikologis atas kesuksesan yang selama ini dicapai HMI. Kesuksesan itu tidak boleh ditanggapi dengan kepuasan. Justru hal tersebut dapat dijadikan pemacu semangat, motivasi, dan etos kritik untuk terus memproses dan menjalankan dinamika organisasi sesuai dengan semangat zaman.

Sebagai organisasi yang sudah tua, HMI betapa pun akan tetap dihitung sebagai *political force*. Oleh karena itu, HMI harus paham dengan dinamika politik. Ini penting untuk memposisikan HMI sebagai subjek politik, dan bukan objek politik.

Akan tetapi harus dicatat dengan tegas, bahwa politik HMI adalah politik kemahasiswaan. Politik HMI adalah politik kaum intelektual yang merupakan terjemahan dari kritisisme, etos transforma-

tif, dan dibingkai oleh etika dan moralitas. Politik HMI bukan politik kekuasaan, melainkan politik kemanusiaan yang sarat dengan nilai-nilai. Kekuatan politik HMI perlu diorientasikan menjadi turbin penggerak bagi fungsi HMI sebagai gerakan moral (*moral movement*). Dan gerakan moral HMI akan lebih tajam bila mampu mensinergikan potensi HMI sebagai *moral force* dan *political force*.

Karena itu, HMI harus merawat independensi politiknya di hadapan kekuatan apa pun. HMI tidak boleh menjadi partisan politik siapa pun juga. HMI hanya akan berkonfrontasi dengan masalah-masalah yang akan mengganggu terselenggarakannya nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam tata pergaulan sosial. Termasuk siap menghadapi kekuatan-kekuatan yang antikeadilan, antikeadilan, dan antikebenaran. Inilah politik etis HMI.

Peningkatan visi intelektual

Upaya membangkitkan kembali kekuatan intelektual dari kader-kader HMI hukumnya *fardhu*. HMI harus semakin menyadari bahwa dinamika intelektual kelompok dan organisasi lain semakin berkembang, sementara justru semakin meredup di HMI — yang dulu senantiasa berada di garda depan dalam perkembangan wacana pemikiran. Karenanya, HMI dituntut untuk melanjutkan prestasi sejarah tersebut.

Membangkitkan kembali kekuatan intelektual ini membutuhkan beberapa hal. *Pertama*, lingkungan yang kondusif, berupa kebijakan organisasi dan komitmen pemimpin organisasi di pelbagai tingkatan. *Kedua*, menyediakan sarana bagi debat pemikiran, misalnya penerbitan jurnal ilmiah.

Sementara bentuk-bentuk praksis dari komitmen intelektual, yakni sikap-sikap *responsibility* harus ditajamkan dengan institusi penyangga yang berdimensi advokasi. Kader-kader HMI harus semakin banyak dikenalkan dan disentuhkan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, sehingga intelektual HMI bukan intelektual buku atau teori, tetapi juga yang dapat diterjemahkan ke dalam upaya-upaya konkret di masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan wacana pemikiran yang belakangan sangat intensif dan akseleratif — minimal — dapat diikuti oleh HMI. Bahkan kalau memungkingkan HMI justru mampu menjadi lokomotif bagi perkembangan wacana-wacana baru. Karena dengan jalan ini, upaya untuk menyuarakan *idea of progress* akan dapat dijawab. Selain itu, ketajaman dan penguasaan wacana pemikiran itu dapat diterjemahkan

menjadi kritisisme, yang korektif, konstruktif, dan futuristik.

Penguatan basis

HMI dituntut pula untuk menterjemahkan komitmen keindonesiaan dan keislaman sekaligus. Dalam kerangka ini, maka HMI harus menyeimbangkan keterlibatan dan interaksinya, antara Generasi Muda Islam (Gemuis) dan Kelompok Cipayung. Forum Gemuis sangat strategis karena merupakan embrio bagi kokohnya bangunan ukhuwah islamiyah di masa datang. Sedangkan Kelompok Cipayung adalah forum yang sangat penting bagi kukuhnya ukhuwah wathoniyah. Dua-duanya penting, karena memang menjadi komitmen HMI semenjak kelahirannya.

Sementara itu, juga dibutuhkan reorientasi aktivitas yang diorientasikan untuk mengakomodasi aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan mahasiswa Hal ini penting bagi upaya memperkuat kembali basis HMI di kampus. Semangat HMI sebagai *second campus* akan terwujud bila secara empirik, aktivitas HMI benar-benar bersifat alternatif dan komplementer dengan dunia kampus. Dalam hal ini HMI harus berpikir dan berusaha keras untuk membangun dinamika kampus yang sehat dan berkualitas, bersama-sama kekuatan kemahasiswaan yang lain.

Dalam rangka mendinamisir kehidupan kampus, maka HMI harus mulai mendorong dan menyuarakan pentingnya kehadiran organisasi ekstraversitas di kampus. Kehadiran organisasi ekstraversitas sangat dibutuhkan untuk membangun dinamika kemahasiswaan yang sehat, sehingga akan lahir tokoh-tokoh mahasiswa. Tokoh kampus setidaknya harus dibekali lima hal, yakni wawasan dan kedalaman ideologis, keterampilan politis, kapasitas intelektual, kemampuan mengembangkan komunikasi sosial, dan kekuatan untuk membangun solidaritas sosial dari pelbagai potensi kemahasiswaan.

Modernisasi organisasi

Upaya modernisasi organisasi harus menjadi perhatian yang serius. Dimensi-dimensinya bukan hanya *hard ware*, tetapi juga *soft ware* dan *br ware*. Tidak semata struktural, tetapi juga kultural.

Beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian adalah: *pertama*, mendorong keluarga besar HMI untuk membangun sekretariat yang permanen, dengan segala pirantinya. Dalam hal ini, HMI harus memainkan peran sebagai fasilitator dan motivator bagi upaya-upaya pembangunan sekretariat tersebut. *Kedua*, menumbuhkan kultur riset dan semangat datatiff dalam organisasi

Ketiga, menguatkan kultur taat asas, dengan peningkatan pemahaman dan loyalitas pada aturan main atau mekanisme organisasi.

Keempat, meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi, baik secara vertikal maupun horisontal. Selain forum-forum resmi organisasi, perlu diperbanyak forum-forum alternatif (partikelir) yang bermanfaat. **Kelima**, dengan menerbitkan media komunikasi berupa buletin aktivitas. Ini penting bagi sosialisasi kebijakan-kebijakan organisasi secara lebih kentara sekaligus bermanfaat untuk membangun kesamaan visi organisasi, baik berkaitan dengan persoalan-persoalan ekstern maupun intern organisasi.

Peningkatan kualitas perkaderan

Perkaderan HMI di masa datang harus benar-benar berkualitas. Dalam bahasa yang cukup menggugah, yakni bagaimana kita senantiasa mengembangkan perkaderan, membangun peradaban. Kualitas perkaderan itu sangat ditentukan oleh kemampuan HMI untuk menjauhkan diri dari formalisme perkaderan. Karena formalisme perkaderan kemudian hanya dipahami pada sekedar pertrainingan. bagi HMI, sekedar pertrainingan adalah reduksi yang sangat berbahaya bagi totalitas perkaderan yang sesungguhnya.

Perkaderan formal penting sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan administratif struktural yang bersifat formal, serta kerangka-kerangka dasar yang harus dikembangkan lebih lanjut. Sementara perkaderan non-formal dan informal adalah medan yang lebih luas untuk proses penempatan kualitas kader. Intelektualitas, profesionalitas, loyalitas, relegiusitas, dan integritas para kader HMI dapat diasah lebih tajam dalam perkaderan yang nonformal dan informal, seperti *up-grading*, diskusi, seminar, riset, dan sebagainya.

Peningkatan kualitas keislaman

Komitmen HMI pada Islam sebagai ajaran dan umat Islam sebagai entitas empiriknya musti benar-benar berupaya diwujudkan. Ini bisa dilakukan dengan beberapa hal, yakni: *pertama*, melanjutkan upaya pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Ini hanya mungkin apabila HMI membangkitkan kembali wacana-wacana keislaman. Melanjutkan ini bukan berarti sekedar mengikuti garis-garis pemikiran yang selama ini berkembang, seperti gaya Nurcholish Madjid, tetapi lebih dari itu justru mampu mengkriisi pelbagai ragam pemikiran yang berkembang. Termasuk bagaimana mencoba meramunya menjadi wajah baru yang lebih derivatif dan implementatif. Problem para pemikir Islam saat ini adalah bagaimana menderivasikan pemikiran-pemikiran besar itu menjadi teori sosial.

Karena hanya dengan teori sosial yang kuat, maka proses *social engineering* terbuka untuk dilakukan.

Kedua, semakin memperjelas "identitas empirik" di tengah dunia kemahasiswaan. Ini penting untuk menangkis gejala yang mulai berkembang di beberapa kampus umum: "Islam Yes, HMI No". Meningkatkan kegandrungan mahasiswa pada spiritualitas dan meingkatnya praktik keberagamaan di kampus tidak paralel dengan peningkatan kuantitas dan kualitas dalam rekrutmen kader HMI. Kecenderungan ini muncul karena HMI dikesankan sebagai tidak jelas keislamannya, secara empirik.

Ketiga, memperkuat ruh spiritualitas dalam dinamika organisasi untuk mengimbangi perkembangan rasionalitas yang kadangkala terlalu jauh.

Pengembangan visi kewirausahaan

Bagi HMI, *enterpreunerships* termasuk orientasi baru, tetapi musti mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Bukan saja karena merupakan salah satu terjemahan konkret dari semangat profesionalitas, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang strategis bagi kepentingan umat dan bangsa di masa depan. Umat boleh kuat secara politik dan intelektual. Tetapi kalau secara ekonomi masih marginal, maka upaya *empowering* umat Islam akan mendapat hambatan yang sangat berarti. Untuk itu, sangat mendesak dilahirkannya generasi muda muslim yang bergerak menjadi *entrepreneur*.

Orientasi pada kewirausahaan ini pada jangka menengah akan mengarah pada pembentukan *middle class* ekonomi, yang akan menjadi pilar bagi kekuatan ekonomi umat. Hal ini juga sekaligus akan memperkuat posisi ekonomi bangsa dalam dinamika ekonomi internasional yang semakin kompetitif. Dalam konteks organisasi, hal ini akan memunculkan *new organisasional paradigma* yang sangat penting bagi HMI. Hal demikian, secara internal juga bermanfaat untuk mengurangi dominasi orientasi politik, sebagaimana terjadi beberapa tahun terakhir ini.

Penguatan visi kewirausahaan ini juga musti disambut dengan upaya yang lebih konkret, seperti membuka akses kepada pelaku-pelaku ekonomi yang sudah cukup mapan, akses modal, dan sebagainya. Tugas untuk itu tidak akan maksimal kalau hanya dilakukan secara personal. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang lebih sistematis secara intibusional. Kami percaya bahwa visi merupakan keyakinan bagi para anggota HMI di seluruh tanah air. Memilih visi ini berarti memilih keyakinan sendiri. Memilih keyakinan sendiri berarti menjaga harga diri organisasi dan merupakan terjemahan dari independensi dan otonomi. ■

